

MOESLIM CHOICE



ISSN_2614-2783



9 772614 278007

Rp 75.000

MENANTI KIPRAH MUSLIMAH DI SENAYAN

RAMADAN
TERAKHIR
PEMERINTAHAN
JOKOWI-MA'RUF

GELOMBANG
HIJRAH
KE IBU KOTA
NUSANTARA

AMBANG BATAS
PARLEMEN
MENJELANG
SENJA

ONGKIR
GRATIS
EKSPOR
UMKM

YANG SERU
JELANG
PEMILIHAN
GUBERNUR

MOESLIMCHOICE.COM

PORTAL NEWS



ALAMAT REDAKSI/IKLAN
PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No. 8,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786

EMAIL :
moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :
[moeslimchoice](https://www.facebook.com/moeslimchoice)

TWITTER :
[@moeslimchoice](https://twitter.com/moeslimchoice)
you tube channel:
[moeslimchoice tv](https://www.youtube.com/moeslimchoice)

MCTV
MOESLIMCHOICE.TV

MOESLIMCHOICE
MAGAZINE

moeslimchoice.com

PENANGGUNG JAWAB

H. Usman Rizal

DIREKTUR

HM. Kamel Fahresy SH

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Hj. Melati Tagore

REDAKTUR PELAKSANA

Rahmat Romli

SEKRETARIS REDAKSI

Niken Rizky Apriandani

REDAKTURIrmayani, Rosyidah Rozali,
Fahmi Jamba, M. Rahmat,
M. Husnie**REDAKTUR BISNIS**.H. M Firmansyah
Muhammad Rizky,
Muhammad Raden Solehin**REPORTER**Aldi Rinaldi,
M. Iqbal, Ida Iryani, M. Yadhi,
Muhammad Fiqri,
Muhammad Khaidir**KEPALA BIRO SUMSEL**

Rahmat Romli

FOTOGRAFER & VIDEOGRAFER

Al Amin

TATA LETAK/COVER

Kosasih Chiko

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Dra. Nur Khamidah

DIVISI PENGEMBANGAN IT

Irvan, Wahyu, M. Fikri

DISTRIBUSI

Itang AB, M. Isro

PERCETAKAN

PT. RESPATIH SAHABAT SEJATI

Isi di luar tanggung jawab
percetakan

>>SALAM REDAKSI

RAMADAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ramadan 1445 hijriyah tiba beriringan dengan Maret 2024 dalam kalender gregorian. Bulan kesembilan dalam kalender hijriyah bertemu dengan bulan ketiga.

Asal kata Ramadan terkait dengan suhu yang panas, ar-ramad, ramida, bermakna panas atau kekeringan. Namun ada pula ar-ramid, yang bermakna awan hujan di penghujung musim panas menjelang musim gugur di kawasan yang mengenal empat musim.

Nah, pada Ramadan 1445 kali ini, iklim di Indonesia dan kawasan Nusantara masih berada pada musim penghujan. Namun memang sedang berada di masa transisi, peralihan menuju musim kemarau yang diprakirakan datang lebih cepat karena gejala El Nino, penurunan suhu di kawasan timur Samudera Pasifik seiring dengan berkurangnya hujan, kemarau dan kering, di kawasan Pasifik bagian barat yang berbatasan dengan kawasan timur Samudera Hindia, tempat Indonesia berada.

Pada saat bersamaan, kita juga mengalami transisi politik menuju berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Transisi politik di tingkat pemerintahan pusat itu sedang berproses dengan berakhirnya Pemilu 2024 dan penghitungan suara hasil Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan DPR serta DPD.

Transisi musim dan suksesi kepemimpinan itu juga ditandai dengan kenaikan harga bahan kebutuhan pangan sehari-hari, terutama harga pangan pokok, beras. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga beras terjadi di setidaknya 179 kabupaten/kota. Rata-rata harga beras menyentuh angka mencapai Rp 14.380 alias naik 2,92 persen dibandingkan dengan harga pada Januari 2024.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, kenaikan harga beras terus terjadi pada awal Februari 2024. Pada pekan pertama Februari, harga rata-rata beras naik 0,93 persen, dan naik lagi pada pekan kedua 1,65 persen dari bulan sebelumnya.

Bu Pudji mengemukakan pula, harga beras di sekitar 20 persen wilayah Indonesia lebih tinggi dari harga rata-rata nasional pada pekan ketiga Februari 2024. Pada saat yang sama, panen padi dalam negeri pada Maret 2024 diperkirakan hanya mencapai 3,51 juta ton beras. Angka pada Maret tahun sebelumnya tercatat 5,13 juta ton. Hasil panen tampaknya turun pula pada Ramadan kali ini.

Bolehlah kita menyimpulkan, ibadah shaum atau puasa pada Ramadan kali ini akan menjadi lebih berat dari biasanya. Namun, bagi yang berkelebihan, Ramadan 1445 H juga menjadi ladang amal lebih besar karena para penerima zakat, infaq dan sedekah akan meningkat.

Bagaimana dengan tradisi mudik yang menyertai akhir Ramadan? Semoga tetap tersedia bagi yang memerlukannya.

Apapun situasi dan kondisi Ramadan, hikmahnya adalah agar kita lebih bertaqwa sebagaimana firman Allah subhanahu wata'ala dalam Al Quran surat Al Baqarah (2) ayat 183: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." ♦

>>COVER EDISI INI

**ALAMAT REDAKSI/IKLAN**PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No.
8, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12750Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786**EMAIL :**

moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :

moeslimchoice

TWITTER :

@moeslimchoice

YOU TUBE CHANNEL:

moeslimchoice TV

>>DAFTAR ISI



06 **LAPORAN UTAMA**
 Satu dari empat anggota DPR yang mengemukakan gagasan tentang hak angkat adalah muslimah. Tiga lainnya laki-laki. Apakah kehadiran perempuan di parlemen sudah memenuhi harapan?

20 **EKONOMI SYARIAH**
 Sudah muncul gagasan menunda pemberlakuan kewajiban sertifikat halal yang terjadwal pada Oktober 2024. Proses sertifikasi halal bagaikan mendaki jalan terjal.

24 **SUMSEL SYARIAH**
 Agus Fatoni Penjabat, (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), ingin agar semua sarana milik Pemerintah dimanfaatkan secara optimal dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

38 **KEMENAG**
 Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1445 Hijriah, Kementerian Agama (Kemenag) menggelar paman-tauan hilal (rukyatulhilal) awal Ramadhan pada 10 Maret 2024 yang bertepatan dengan 29 Sya'ban 1445 H.



46

BIROKRASI

Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN sudah dipersiapkan matang menjadi tempat diselenggarakan Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Event ini menandai resminya Ibu Kota Negara Republik Indonesia (RI) pindah dari Jakarta ke IKN, Kalimantan Timur (Kaltim).

82

PILKADA SUMSEL

Sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumatera Selatan (Sumsel), Mawardi Yahya puas dengan perolehan suara Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang lebih dari 65 persen di seluruh wilayah Provinsi Sumsel. Capaian itu jauh di atas perolehan suara nasional Prabowo-Gibran yaitu 58 persen lebih.

90

LAPORAN KHUSUS

Ramadan selalu datang dan pergi lagi. Terlewat sekali, tak kan pernah kembali.

REGULER

- 3 | SALAM REDAKSI
- 18 | UFUK
- 34 | WISATA HALAL
- 58 | PILKADA
- 66 | PARLEMEN
- 70 | MUBA BERSINERGI
- 72 | KAJIAN
- 80 | KESEHATAN
- 86 | RESENSI
- 88 | INSPIRATIF
- 98 | KOLOM 2

76

MUALAF

Selvi Ananda membuat Gibran Rakabuming Raka jatuh cinta pada pandangan pertama di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 2009. Lalu 14 tahun kemudian, tepatnya sejak Oktober 2023, Selvi mendadak menjadi perhatian publik di Tanah Air maupun di mancanegara.



PEREMPUAN DAN PARLEMEN

Satu dari empat anggota DPR yang mengemukakan gagasan tentang hak angket adalah muslimah. Tiga lainnya laki-laki. Apakah kehadiran perempuan di parlemen sudah memenuhi harapan?

Duduk sambil membaca catatan ketika mendapat giliran berbicara setelah menginterupsi Sidang Paripurna DPR, anggota DPR dari Fraksi Partai Kesatuan Bangsa Luluk Nur Hamidah tampil mengemukakan aspirasinya dengan lancar dan jelas, artikulatif. Setelah menyampaikan salam, memperkenalkan diri sebagai anggota Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV, juga adab menghormati sidang serta menyapa siapa saja yang menyaksikannya, Luluk langsung mengemukakan aspirasi terkait hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Setelah itu, Luluk mengemukakan Permohonan Hak Angket, "Apakah perwujudan ke-

daulat rakyat dan oleh karena itu, tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. "Karena ini terkait dengan kedaulatan rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran keadilan tanggung jawab dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain," kata Luluk.

Menurut dia, pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, sambungnya, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat pelaksanaan Pemilu 2024 telah berjalan se-

kan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan silent majority. Untuk itu, ia menilai, DPR RI perlu melakukan langkah konstitusional. "Alangkah naifnya kalau lembaga DPR hanya diam saja seolah-olah tidak terjadi sesuatu," ujar perempuan kelahiran Jombang, Jawa Timur, pada 1971 itu.

"Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang serta terang-terangnya sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu," sambung Luluk.

Melalui hak angket inilah, kata dia, kita

Sebagai petahana anggota legislatif, Luluk Nur Hamidah bersaing ulang dengan Bambang Wuryanto (Bambang Pacul), Agustina Wilujeng Pramesti, Paryono, dan Dolfie O.F.P. dari PDIP; juga Endang Maria Astuti dari Partai Golkar; dan Hamid Noor Yasin dari PKS. Belum lagi pendatang baru seperti Diah Pikatan, cucu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Soal kehadiran muslimah dan umumnya keterwakilan perempuan di parlemen sudah diafirmasi oleh ketentuan Undang-Undang Pemilu yang mengatur bahwa setiap partai politik agar memenuhi afirmasi 30 persen calon anggota legislatif dari kaum hawa ini. Pencalonan 30 persen perempuan sebagai anggota legislatif pertama kali tercantum



cara jujur dan adil. "Jika prosesnya penuh intimidasi apalagi dugaan kecurangan pelanggaran etika atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya."

Sebagai pelaku sejarah gerakan Reformasi 1998, Luluk mengaku belum pernah melihat ada proses pemilu yang sebrutal dan menyakitkan seperti Pemilu 2024. Ia menilai, etika dan moral politik Pemilu 2024 berada di titik minus jika tak dapat disebut nol. Karena itu, ia merasa DPR RI perlu melakukan gerakan konkret.

Apalagi, para akademisi, budayawan, gur besar, mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan. Ia mengingatkan, DPR RI memiliki tanggung jawab moral politik terkait soal ini.

Salah satunya, kata Luluk, mendengar-

akan menemukan titik terang seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu. "Oleh karena itu Pimpinan dan seluruh anggota DPR saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat, kejujuran, keadilan, etika yang tinggi, karena di sini fungsi kita yang sedang ditunggu oleh rakyat," tandas Luluk dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Selasa, 5 Maret 2024.

Nah, belum jelas apakah Luluk akan kembali ke Senayan, Gedung DPR, sebagai wakil rakyat pada periode 2024-2029. Terlebih lagi Dapil Jateng IV yang mencakup Kabupaten Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri, dinilai sebagai wilayah dengan persaingan ketat memperebutkan tujuh kursi.

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019, pasal yang mengatur mengenai pencalonan 30 persen perempuan jumlahnya relatif lebih banyak dibanding sebelumnya, yaitu 14 pasal. Mengutip laman web DPR, dalam implementasinya, 16 partai politik peserta Pemilu 2019 dapat memenuhi pencalonan 30 persen perempuan dalam daftar Calon Anggota Legislatif (Caleg) sebagaimana diatur dalam Pasal 245 dan Pasal 246 ayat (1) dan ayat (2).

Namun demikian, sebagian besar Caleg perempuan masih ditempatkan pada nomor urut 3 dan 6. Dengan demikian zipper system yang diharapkan dapat meningkatkan angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat dikatakan belum efektif.

Untuk itu, diperlukan strategi lain yang melibatkan peran parpol. Salah satunya melalui revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Syarat keterwakilan 30 persen perempuan yang diberlakukan untuk kepengurusan parpol di tingkat pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) harus direvisi. Begitu pula, syarat keterwakilan 30 persen perempuan tersebut juga harus diberlaku-

bakal calon legislatif laki-laki.

Berdasarkan data ini, mayoritas keterwakilan calon anggota legislatif (caleg) perempuan pada 18 partai politik (parpol) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mencapai angka di atas 30 persen. Ketentuan ini pun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilu bahwa komposisi penyelenggaraan pemilu harus melibatkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen.

Di antara partai yang mendaftar, Partai

Lebih lanjut, diikuti oleh Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Bulan Bintang sebanyak 41 persen. Sementara proporsi keterwakilan perempuan terendah ditempati oleh Partai Solidaritas Indonesia, yakni hanya 32 persen.

Keterwakilan perempuan di parlemen dan partisipasi politik perempuan merupakan hal penting dalam memastikan hadirnya kebijakan-kebijakan yang mendukung, memberdayakan, dan memfasilitasi kebutuhan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Jika dihitung secara akumulasi nasional, kuota perempuan dalam daftar caleg sebenarnya sudah mencakup minimal 30 persen. Pada Pemilu 2009, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan 34,6 persen daftar calon tetap (DCT) anggota DPR adalah perempuan, kemudian meningkat menjadi 37 persen pada Pemilu 2014, dan pada Pemilu 2019 mencapai 40 persen. Karena itu, momentum Pemilu 2024 ini diharapkan dapat menggugah kesadaran bersama untuk mewujudkan dan mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.

Namun, jika turun ke perincian, banyak yang meragukan kesanggupan partai-partai politik dalam memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan tadi. Dari data KPU, untuk 84 Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPR dan 18 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024, hampir seluruh parpol peserta Pemilu tidak memenuhi persyaratan kuota minimum 30 persen kandidat perempuan dalam daftar pencalonan.

Toh Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245 menyebutkan syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen harus terpenuhi di setiap dapil. Jadi, bukan akumulasi total secara nasional.

Pada akhir 2023, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Keterwakilan Perempuan sudah menyoroti rendahnya kedisiplinan partai politik memenuhi kewajiban mendaftarkan 30 persen caleg perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) DPR RI. Berdasarkan DCT yang telah diumumkan KPU RI pada 3 November 2024, 17 dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 gagal memenuhi kewajiban afirmasi perempuan itu.

"Hanya satu parpol yang memenuhi syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen pada semua DCT di 84 dapil, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS)," kata Direktur Eksekutif Netgrit, Hadar Nafis Gumay, dalam rilis hasil analisis DCT koalisi Kamis, 9 November 2023

Netgrit yang merupakan salah satu representasi koalisi menambahkan, PKB dan PDIP menjadi partai politik paling bermasalah dengan keterwakilan perempuan terbanyak. PKB gagal memenuhi 30 persen caleg perempuan



kan untuk kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum pernah mengemukakan, bakal calon legislatif dari 18 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 sebanyak 10.323. Dari total tersebut, 37,7 persen atau 3.896 bakal calon legislatif perempuan dan 62,3 persen atau 6.427

Ummat tercatat sebagai parpol dengan proporsi keterwakilan perempuan tertinggi. Melansir Antara, proporsi perempuannya sebesar 50 persen dari 580 calon legislatif (caleg). Kemudian disusul oleh Partai Garuda sebanyak 46 persen dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan persentase keterwakilan perempuan sebanyak 43 persen.

di 29 dapil, disusul PDIP 26 dapil.

Selanjutnya, berturut-turut adalah Demokrat 24 dapil, Golkar dan Gerindra 22 dapil, PKN 21 dapil, Partai Gelora 19 dapil, PAN 17 dapil, Nasdem dan PBB 16 dapil, PPP 12 dapil, Garuda 9 dapil, Partai Buruh 6 dapil, Perindo dan Partai Ummat 5 dapil, lalu PSI 4 dapil.

"Data ini sangat tidak sesuai dengan deklarasi pemilu berintegritas oleh penyelenggara pemilu. Karena KPU jelas melakukan pembiaran atas pelanggaran sistem pencalonan pemilu dan amanat undang-undang," kata Hadar yang merupakan anggota KPU RI 2012-2017.

Sedangkan peneliti Perludem Nurul Amalia Salabi mengemukakan, keterwakilan perempuan di Parlemen bisa menjadi

politik itu tidak lulus mencalonkan 30 persen pencalonan perempuan di setiap daerah pemilihan," sambungnya.

"Jadi memang kalau kita lihat karena amanat di dalam undang-undang nomor 7/2017 tentang Pemilu sebetulnya keterpenuhan keterwakilan perempuan minimal 30 persen itu harusnya di setiap Dapil, bukan kemudian ditarik angka rekapitulasi atau agregasi secara nasional," tambah Nurul.

Belum lagi soal kemungkinan terpilih para perempuan yang menjadi caleg. Nurul mengkhawatirkan di Pemilu 2024 jumlah perempuan yang terpilih akan berkurang dari 2,9 persen seperti saat ini.

"Kalau kita lihat berapa persentase perempuan yang terpilih dari jumlah persentase perempuan yang dicalonkan, biasanya dua

leg, Afirmasi atau Fiksi?" di Universitas Jayabaya, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024.

Faktor lainnya, lanjut Melli, langka sekali perempuan yang secara mandiri dapat mengeluarkan uang yang diperlukan, tanpa dapat bergantung pada fasilitas dan bantuan sosial yang umumnya hanya tersedia kepada caleg petahana atau "incumbent". Sedangkan biaya politik untuk caleg perempuan, kata dia, berpotensi lebih besar dibandingkan dengan yang dikeluarkan caleg lelaki.

Alasannya, caleg perempuan memiliki tantangan berbeda. "Karena kita harus melewati banyak perantara untuk dapat menembus ke pihak-pihak yang memiliki pengaruh untuk mengamankan atau memperkuat kedudukan kita sebagai caleg," katanya.

Lebih dari itu, Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) pernah menjatuhkan sanksi kepada para anggota KPU terkait penyusunan regulasi yang mengatur cara menghitung kuota bakal calon anggota legislatif perempuan minimal 30 persen pada Pemilu 2024. Menurut Majelis DKPP, dalam sidang pemeriksaan terungkap ada perubahan norma ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR terkait Pasal 8 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Hasilnya, dalam penghitungan keterwakilan 30 persen jumlah bakal calon anggota legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan, diatur pembulatan ke bawah. Padahal, aturan yang berlaku sebelumnya, diatur pembulatan ke atas.

Selain itu, Pasal 8 Ayat (2) Peraturan KPU No 10/2023 sudah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung No 24 P/HUM/2023. Sebab, dengan metode pembulatan ke bawah, ada sejumlah daerah pemilihan yang jumlah bakal caleg perempuannya menjadi kurang dari 30 persen.

Oleh sebab itu, menurut anggota Majelis DKPP, M Tio Aliansyah, tindakan para anggota KPU dinilai tidak cermat dan tidak profesional dalam mengakomodasi masukan DPR sehingga melahirkan ketidakpastian hukum bagi peserta pemilu. Meski KPU berhak berkonsultasi ke DPR dan pemerintah, para anggota KPU harus memahami, hasil konsultasi itu tidak bersifat mengikat. "DKPP berpendapat tindakan para teradu tidak dibenarkan menurut hukum dan etika," ujar M Tio Aliansyah.

Bagaimana dampak sidang paripurna DPR awal Maret 2024 dan soal keterwakilan perempuan sejauh ini? Dapat bersifat positif dan negatif. Dinamika politik akan bercerita pada saatnya. ♦



berkurang dari 30 persen di Pemilu 2024. "Yang menjadi kekhawatiran kita sebetulnya keterwakilan perempuan di Parlemen itu menjadi menurun. Kenapa? Kalau kita lihat data pencalonan perempuan sebagai Anggota Legislatif dari Pemilu 2014 sampai 2019 itu terus meningkat. Misalnya di 2014 pencalonan perempuan mencapai 37 persen, kemudian di 2019 itu hampir 40 persen pencalonannya ketika dicalonkan oleh partai politik," kata Nurul di hari H pemungutan suara, 14 Februari 2024.

Keterwakilan perempuan sebenarnya sudah mencapai 40 persen, namun kata dia, Peraturan KPU terkait teknis penghitungan persyaratan 30 persen bakal calon perempuan di satu daerah pemilihan, menghalangi pencapaian target afirmasi perempuan di parlemen. "Karena ada elemen dalam penghitungan untuk pencalonan perempuan yang berubah di dalam PKPU tersebut, sehingga kalau misalnya kita melihat data pencalonan sekarang hampir semua partai

kali lipat lebih misalnya di 2019 ada hampir 40 perempuan yang dicalonkan dan terpilih ternyata 20 persen. Nah ini ditakutkan akan berkurang pada Pemilu 2024 dari 30 persen," tukas Nurul.

Dari kalangan perempuan, Melli Darsa, Caleg Partai Golkar di Dapil III Jabar, mengemukakan sistem pemilu yang memiliki banyak partai dan masing-masing partai harus menyediakan begitu banyak calon merupakan tantangan yang dihadapi caleg perempuan menjadi lebih berat lagi.

Menurut dia, pelaksanaan kebijakan keterwakilan perempuan itu bagaikan janji yang sulit ditepati. "Hingga saat ini kebijakan ini masih belum efektif dan cenderung hanya merupakan suatu 'lip service'," kata dia.

Apalagi, sambungnya, rakyat dibuat bingung harus pilih siapa di kertas suara dengan banyak nama tersebut. "Ini belum mempertimbangkan kesanggupan finansial yang dibutuhkan untuk nyaleg," kata Melli dalam seminar "Keterwakilan Perempuan Lewat Pi-



MENANTI KIPRAH MUSLIMAH DI SENAYAN

Peluang sejumlah wajah baru muslimah politisi dari berbagai partai untuk duduk sebagai anggota DPR hasil Pemilu 2024 sudah terbuka lebar. Namun, semua masih menunggu rekapitulasi hasil penghitungan suara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum.

Masih dini memastikan wajah-wajah baru muslimah anggota legislatif di DPR hasil Pemilu 2024. Kepastiannya tetap harus menunggu pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum yang terjadwal pada 20 Maret 2024.

Namun, dari perhitungan suara yang masih berlangsung sebelum rekapitulasi, sejumlah nama kaum hawa muncul di berbagai media sebagai kandidat wajah baru yang diperkirakan meraih kursi legislatif periode 2024-2029. Salah satunya adalah Putri Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menjadi caleg Partai Amanat Nasional (PAN) di Dapil Lampung 1.

Menggunakan hak pilihnya di TPS 179 Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur, Putri bersama ayahnya yang juga Ketua

Umum PAN, menjadi caleg di Provinsi Lampung Dapil I. Dapil ini menyediakan 10 kursi DPR RI bagi para caleg yang bersaing. Wilayah Dapil I Lampung mencakup enam kabupaten dan dua kota di provinsi paling selatan di Sumatera itu.

Kabupaten yang berada di Dapil I Lampung adalah Lampung Barat, Lampung Selatan, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, dan Tanggamus. Sedangkan dua kotanya adalah Bandar Lampung dan Metro. Boleh dibilang Dapil I Lampung meliputi kawasan barat hingga ke tengah. Dari tengah ke timur, masih ada Dapil II Lampung.

Nah, sejak awal penghitungan, Putri sudah berada di urutan tiga besar caleg DPR RI Lampung I. Sekitar sepekan setelah hari pemungutan suara, Kamis, 22 Februari 2024 petang, situs pemilu2024.kpu.go.id

menampilkan data masuk sebesar 75,62 persen. Pada saat itu, Putri sudah mendapatkan 80.923 suara dan menduduki peringkat pertama perolehan suara. Pada saat yang sama, posisi kedua diduduki oleh Muhammad Kadafi Ketua Kadin Lampung yang mencalonkan diri dari PKB dengan 79.002 suara.

Perkembangan menjelang rekapitulasi nasional oleh KPU, tim relawan Kadafi menghitung perolehan suara dari rekapitulasi di delapan kabupaten dan kota. Tentu saja hasilnya akan dicocokkan dengan hasil rekapitulasi KPU Provinsi Lampung yang memulai rapat pleno pada Rabu, 6 Februari 2024.

Alhasil, hitungan Tim Relawan Kadafi menunjukkan jagoannya memperoleh suara terbanyak, mencapai 127.639 suara. Selanjutnya Putri Zulhas berada di urutan



kedua dengan perolehan 125.900. Sedangkan urutan ketiga adalah Ahmad Muzani yang juga Sekjen Partai Gerindra yang meraih 110.161 suara.

Urutan keempat dan selanjutnya, Rahmawati Herdian (Nasdem) 93.854 suara, Muklis Basri (PDIP) 83.464 suara, Sudin (PDIP) 82.744 suara, Zulkifli Anwar (Demokrat) 80.492 suara, Muzammil Yusuf (PKS) 62.617 suara, Rycko Menoza (Golkar) 53.330 suara, dan Ruby Chairani Syifadiah (Gerindra) 50.200 suara.

Hasil lengkap penghitungan suara dari Tim Relawan Kadafi ini tentu saja harus dicocokkan dengan hasil rekapitulasi KPU Provinsi Lampung. Namun, dengan posisi pertama atau kedua perolehan suara, posisi Putri untuk duduk sebagai anggota DPR dari Lampung I sangat terbuka.

Putri sulung Zulhas ini lahir pada Mei 1998. Lulus dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB), pendidikannya berlanjut dengan meraih gelar magister bidang International Business di Universitas Nasional Australia. Di internal partai, Putri menjabat Wakil Ketua Umum DPP PUAN (Perempuan Amanat Nasional) periode 2017-2021 dan 2021-2025.

Tak langsung terjun ke dunia politik, Putri Zulhas merupakan seorang pengusaha. Ia juga aktif di bidang pendidikan



Tak langsung terjun ke dunia politik, Putri Zulhas merupakan seorang pengusaha. Ia juga aktif di bidang pendidikan anak usia dini. Pernah mengikuti program Diploma di bidang Montessori Education for Early Childhood, pada 2014 Putri mendirikan sekolah Kids Republic School yang menggunakan metode Montessori & Multiple Intelligence.

anak usia dini. Pernah mengikuti program Diploma di bidang Montessori Education for Early Childhood, pada 2014 Putri mendirikan sekolah Kids Republic School yang menggunakan metode Montessori & Multiple Intelligence. Berlanjut dengan penerapan metode Cambridge & Lead-

ers Curriculum sejak 2020, Kids Republic School telah memiliki akreditasi A dan terpilih sebagai Sekolah Penggerak dengan ratusan murid berprestasi.

Dalam menggalang suara di dapilnya, Putri meluncurkan program Peningkatan Usaha Tani Rakyat Indonesia (PUTRI). Dalam sambutan saat peluncuran program itu di Kalianda, Lampung Selatan, Putri mengatakan, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, khususnya di Lampung Selatan. "Mudah-mudahan langkah ini bisa membantu perekonomian para petani khususnya untuk di Rajabasa dan Kalianda" ujar Putri.

Maka dengan rekam jejak memadai di bidang pendidikan dan partai politik, banyak yang menunggu kiprah Putri sebagai muslimah anggota DPR periode 2024-2029 dari Dapil Lampung I.

Dari Dapil Sulawesi Tengah, muncul Ketua DPRD provinsi yang menjadi Caleg DPR pada Pemilu 2024. Dialah Nilam Sari Lawira. Nama Nilam Sari Lawira berada di puncak perolehan suara sementara calon anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah. Perjalanan menuju kursi legislatif sebagai muslimah anggota parlemen sangat terbuka dari Dapil Sulteng yang menyediakan tujuh kursi legislatif dalam Pemilu 2024.

Perolehan suara perempuan kelahiran Palu, Desember 1968 ini bahkan mengungguli sejumlah politisi kawakan Sulawesi Tengah, seperti mantan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, anggota DPR RI, Anwar Hafid maupun Syarifuddin Sudding, politisi senior Partai Golkar, Muhidin Muhammad Said, mantan Bupati Tolitoli dua periode, Mohammad Saleh Bantilan, mantan Bupati Buol dua periode,

gah menetapkan NSL sebagai caleg Partai Nasdem di daerah pemilihan (dapil) Sigi dan Donggala. Bersaing dengan caleg dari partai lainnya, termasuk dengan caleg Nasdem di dapil yang sama.

Lantas mengapa lebih memilih mundur sebagai PNS? Pada sebuah diskusi virtual, NSL mengatakan, sebagai akademisi ya itu tadi, hanya sebatas mentransfer ilmu kepada mahasiswa dan melakukan riset

yang lebih luas,” katanya.

Kini kursi legislatif di DPR RI telah menanti. Semoga NSL sebagai muslimah anggota legislatif memberi manfaat lebih luas lagi dari yang pernah ia berikan sebelumnya.

Menyeberang dari Sulawesi ke Kalimantan, ada muslimah caleg DPR RI dari Partai Gerindra bernama Rahmawati Zainal. Berbagai media mengemukakan, Rahmawati, istri Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, hingga awal Maret 2024 meraih perolehan suara tertinggi di dapilnya yang menyediakan tiga kursi legislatif pada Pemilu 2024.

Hingga Rabu 6 Maret 2024 petang, proses pemasukan data sudah menyentuh 1596 dari 2295 TPS atau hampir 70 persen. Dengan perolehan suara sementara 50.643 suara, Rahmawati Zainal menduduki urutan pertama perolehan suara Caleg DPR RI di Dapil Kalimantan Utara (Kaltara). Menyusul kemudian, Deddy Sitorus dari PDI Perjuangan dengan 33.792 suara. Urutan selanjutnya adalah Hasan Saleh dengan perolehan suara sementara mencapai 17.693.

Provinsi Kaltara adalah Dapil dengan daftar pemilih tetap (DPT) terkecil di luar beberapa provinsi di Papua setelah pemekaran. Tercatat DPT Kaltara pada Pemilu 2024 adalah 504.252, sekitar setengah juta jiwa. Meski



Amiruddin Rauf, dan salah satu cucu pendiri Perguruan Alkhairaat Palu, Sakinah Aljufri.

Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Tengah itu sering menyampaikan pesan mendalam kepada seluruh caleg Partai NasDem Sulteng dan menjadi resep sukses seorang politisi. “Rajin-rajin menyapa masyarakat, tapi jangan hanya saat kampanye,” kata Nilam yang namanya kerap diringkas sebagai NSL.

Lahir dari keluarga berlatar Muhammadiyah, NSL beribukan perempuan yang pernah menjadi kepala sekolah TK Aisyiyah, Jalan Cik Ditiro, Palu. Sedangkan ayahnya, Ahmad Lawira adalah seorang pegawai negeri di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang mendukung karir politiknya adalah sang suami, politisi Partai Nasdem Ahmad Ali.

Menjelang Pemilu 2019, NSL berhadapan dua pilihan: tetap menjadi dosen atau ikut Pemilu Legislatif 2019. Jika memilih Pemilu, maka harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Begitu aturan mainnya. NSL pun sampai pada pilihan yakni mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Sulawesi Tengah.

Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Ten-

untuk memajukan pertanian.

“Tapi kalau di dunia (politik) ini bisa mengakomodir kepentingan banyak orang. Bukan hanya di dapil saya, tapi juga seluruh Sulteng. Misalnya satu kebijakan, satu tanda tangan, satu rekomendasi bisa membantu banyak orang. Itu kemanfaatan saya



begitu, terjadi persaingan antara Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat untuk meloloskan calegnya ke Senayan sebagaimana perhitungan sementara dengan data 70 persen suara masuk. Deddy Sitorus dan Hasan Saleh adalah petahana anggota DPR.

Melihat jumlah suara yang masuk dan perolehan suara sementara masing-masing caleg, peluang Rahmawati menjadi muslimah anggota DPR yang duduk di kursi legislatif DPR terbuka lebar. Meski demikian, kepastiannya tentu menunggu hasil perhitungan resmi KPU.

Namun, pertimbangan mencalonkan Rahmawati tentu memperhitungkan pesaingnya yang sudah memiliki konstituen. Antara lain para mantan kepala daerah di provinsi ini. Tercatat antaranya H Irianto Lambrie, gubernur Kaltara 2016-2021 dan mantan Bupati Nunukan H Abdul Hafid Ahmad caleg dari Partai Nasdem. Kemudian ada H Udin Hianggio (mantan wakil gubernur Kaltara) dari Partai Hanura, H Anang Dachlan Djauhari, mantan bupati Bulungan dari Partai Gelora. Juga ada H Undunsyah, mantan Bupati Tana Tidung dari PKB.

memimpin perolehan suara. Selain itu kursi ketiga diperhitungkan akan diduduki oleh Randi Zulmariadi yang memperoleh 18.627 suara disusul Nyat Kadir 12.309 dengan total suara partai dan caleg mencapai 35.767 suara.

Bagaimana dengan kursi keempat? Perolehan suara caleg dan partai menjadi faktor penentunya. Dalam Pemilu 2024, PDIP, PKB, dan PKS merupakan tiga partai yang bersaing sengit untuk menduduki kursi keempat di DPR RI dari Kepri.

Dari data perolehan suara yang telah dihitung, caleg DPR RI dari PDIP HM So-



Toh sosialisasi Rahmawati maju sebagai caleg dari Partai Gerindra sudah berlangsung sejak pertengahan 2023. Ketua DPD Partai Gerindra Kaltara Ibnu Saud mengatakan, masuknya Hj Rachmawati menjadi bakal calon anggota DPR RI yang diusung Gerindra, adalah hal yang wajar.

Alasannya, Zainal A Paliwang yang juga Gubernur Kaltara, merupakan Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Kaltara. "Yang membuat masyarakat agak sedikit kaget, mungkin karena tiba-tiba ini. Beliau baru masuk di tahapan perbaikan administrasi ini," kata Ibnu Saud lagi.

Lebih jauh Ibnu mengatakan, salah satu pertimbangan diusungnya Hj Rahmawati melihat elektabilitas dan kualitas ketua TP PKK Provinsi Kaltara itu. "Dengan masuknya ibu Rachmawati, kita semakin optimis, Partai Gerindra Kaltara akan bisa mendudukkan wakil kita di DPR RI," sambungnya.

Toh Rahmawati sejauh ini menunjukkan elektabilitas yang tinggi hingga menduduki urutan pertama perolehan sementara caleg DPR RI asal Kaltara. Sambil menunggu hasil perhitungan resmi KPU, sudah bolehlah berharap Rahmawati Zainal akan menjadi salah satu muslimah yang duduk sebagai anggota DPR hasil Pemilu 2024.

Sebagai catatan, tak semua Caleg dengan perolehan suara relatif tinggi di dapilnya dapat melaju ke Senayan. Ini dialami oleh muslimah politisi PKS Suryani caleg DPR RI di Dapil Kepulauan Riau yang menyediakan empat kursi.

Dua kursi pertama DPR RI Dapil Kepulauan Riau dapat dipastikan direbut antara Partai Golkar dengan total perolehan 56.821 suara partai dan caleg, dan Partai Gerindra mengumpulkan 40.433 suara partai dan caleg.

Partai Golkar dengan Caleg Rizki Faisal dan Gerindra Endipat untuk sementara

erya Respationo, dengan 13.300 suara. Namun, posisinya masih harus bersaing dengan caleg PKB, H Isdianto yang meraih 10.242 suara, serta Suryani dari PKS yang meraih 15.204.

Siapa yang akan melaju ke Senayan dari tiga caleg yang bersaing itu? Tergantung urutan perolehan suara total partai masing-masing. Parpol yang berhasil masuk ke urutan empat besar perolehan suara di Kepri setelah Partai Golkar, Gerindra dan Nasdem, akan lebih mungkin mengirimkan calegnya ke Senayan.

Dalam hal ini, perolehan suara perorangan Suryani dari PKS yang melampaui Soerya Respationo dan H Isdianto, keduanya pernah menjadi Wakil Gubernur Kepri, belum tentu menjadi tiket ke Senayan. PKS perlu memastikan perolehan suara totalnya berada di urutan keempat melampaui PDIP dan PKB di Kepri. Hasilnya memang masih harus menunggu rekapitulasi KPU. Wallahu'alam. ♦

DOMINASI PEREMPUAN DPD RI DARI SUMATERA SELATAN

Empat anggota DPD RI dari Sumsel hasil Pemilu 2024 kemungkinan besar perempuan semua. Layak berharap peran dan fungsinya sebagai senator akan lebih optimal.

Sejak awal penghitungan suara, Ratu Tenny Leriva selalu memuncaki hasil penghitungan suara calon senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sumatera Selatan. Sehari setelah pemungutan suara, laman web KPU yang menampilkan hasil perolehan sementara pada Kamis, 15 Februari 2024 menunjukkan Ratu Tenny Leriva meraih 87.491 suara.

Urutan selanjutnya adalah para petahnan anggota DPD RI periode 2019-2024 Jialyka Maharani dengan 53.324 suara, Amaliah 48.341 suara, Eva Susanti 44.225 suara. Urutan perolehan suara itu tak ban-

yak berubah hingga perhitungan suara pada Rabu malam, 6 Maret 2024. Angka perolehan suaranya saja yang semakin besar.

Alhasil, Ratu Tenny Leriva menjadi calon senator dengan perolehan suara terbanyak dari Pemilu DPD RI dari Dapil Sumatera Selatan. Total, sudah ada 666,087 suara yang berhasil dihimpun Ratu Tenny Leriva hingga dimulainya rekapitulasi oleh KPU provinsi. Angka perolehan suara Ratu Tenny setara dengan 20,28 persen dari total suara sah yang sudah masuk.

Selanjutnya, Jialyka Maharani tercatat



memperoleh 404.209 suara setara dengan 12,31 persen suara masuk. Kemudian Amaliah 384.305 suara, dan Eva Susanti 343.509 suara.

Di awal penghitungan suara, petahan anggota DPD Amaliah sempat mengemukakan ingin fungsi dan perannya lebih optimal sebagai senator. "Walaupun pada akhirnya saya serahkan semua pada Yang Maha Kuasa. Sebagai petahana tentu saya merasa sosialisasi DPD RI ini masih sangat kurang," ungkap sarjana kedokteran gigi yang kemudian meraih gelar magister di ITB Bandung ini.

Menurut dia, ternyata masih banyak yang tidak kenal dengan anggota DPD RI, bahkan tidak tahu fungsi dan kerja DPD seperti apa. Tentunya PR ini bisa dikerjakan dengan penguatan lembaga agar punya wewenang yang lebih luas.

"Kalau selama ini hanya fungsi pengawasan, banyak tugas DPD yang tidak

bersentuhan langsung ke masyarakat jadi dianggap tidak kerja, padahal ya memang wewenangnya sangat terbatas," ungkap perempuan yang juga dikenal dengan nama Amaliah Sobli.

Mengenai banyak caleg DPD baru yang hadir dan beberapa juga unggul menurut Amaliah, ia tidak kaget dengan adanya caleg yang baru-baru. "Caleg DPD ini bukan orang baru tapi mungkin hanya baru mencalonkan diri di DPD. Bisa jadi yang bersangkutan lebih dikenal dan punya jaringan yang lebih luas dari calon-calon yang lain, jadi wajar jika suaranya unggul," katanya.

Lebih dari itu, perjuangan para calon senator ini juga harus serius sebagaimana yang ia lakukan. Amaliah sendiri menyerahkan berkas pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD RI 2024 di Aula Kelly Mariana KPU Sumsel pada Kamis, 11 Mei 2023, berbulan-bulan sebelum hari pe-

mungutan suara 14 Februari 2024.

Pengalaman petahana senator DPD Eva Susanti juga demikian. Pada Pemilu 2019 Eva menjadi caleg DPD asal Sumsel dengan suara terbanyak sebesar 344.143. Ia pun menjadi yang pertama mendaftarkan diri ke KPU Sumsel untuk DPD RI pada Pemilu 2024, pada Senin, 26 Desember 2022.

Usai mendaftar dan menyerahkan administrasi persyaratan, Senator bernama lengkap Hj. Eva Susanti, SE mengemukakan bekalnya adalah 6.156 salinan KTP masyarakat sebagai dukungan untuk saya maju pada pemilu mendatang dan dinyatakan cukup syarat selanjutnya akan diverifikasi oleh KPU. Dukungan tersebut berasal dari kabupaten kota se-Sumsel. Yakni Kab. OKI, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Muba, Banyuasin, OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Pali dan Kota. Palembang, Lubuk Linggau, Prabumulih.

Berkas dan syarat pendaftaran itu pun dikatakan Eva Susanti sudah diterima KPU Sumsel. Selanjutnya, dia menunggu jadwal verifikasi faktualnya oleh KPU Sumsel. "Pendaftaran ini atas dukungan sanak keluarga, tim pemenangan, relawan dan masyarakat Sumsel. Saya bersyukur atas dukungan ini dan saya ucapkan terimakasih banyak," kata istri politisi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya ini.

Selanjutnya, apa yang menjadi dorongan untuk mempertahankan kursi DPD? "Bagi saya turun dan dekat dengan rakyat ada kepuasan tersendiri, rakyat butuh solusi. Melanjutkan pencalonan periode ke dua ini, karena saya merasakan masih banyak pengabdian saya kepada masyarakat yang perlu dilanjutkan, untuk semakin banyak membantu rakyat, menyalurkan aspirasi dan persoalan masyarakat di Sumsel," ungkap Eva.

Toh biaya pencalonan pun perlu diperhitungkan. Data KPU Sumsel mengenai Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) menyebutkan, incumbent Jialyka Maharani memiliki laporan penerimaan paling besar yaitu Rp 1.325.800.076,71. Lalu disusul incumbent lainnya Eva Susanti dengan total penerimaan sebesar Rp 1.192.098.766,85. Sementara anak mantan Gubernur Sumsel Herman Deru yaitu Ratu Tenny Leriva laporan LADK awal Rp 25 juta dengan penerimaan Rp 508.711.706 dan pengeluaran Rp 403.136.242.

Tambahan pula, prosesnya yang cukup panjang, lebih dari setahun sebelum pemungutan suara. "Dari Desember 2022 kami serahkan dukungan KTP



awalnya 4000 dan kemudian setelah diverifikasi menjadi 3800, dan juga hari ini penyerahan formulir berupa syarat dukungan lainnya itu juga sudah di upload melalui silon, serta saya datang secara simbolis menyerahkan langsung kepada KPU Sumsel," ungkap Amaliah.

saya tambahkan program lainnya untuk kepentingan masyarakat Sumsel, optimis kembali terpilih dan kita sudah ikhtiar," katanya.

Ia juga menyampaikan, dirinya juga sudah empat tahun berada di Komite 2 DPD RI bidang minerba, pertanian, dan juga

jadikan Kabupaten untuk Pantai Timur karena kemarin itu bukan bidangnya. "Insyaallah jika terpilih kembali mungkin itu saya akan perjuangkan karena kemarin moratorium dan sekarang sudah ada Papua dibuka dan saya optimis periode berikutnya Moratorium akan dibuka dan kita bisa memperjuangkan kabupaten Pantai Timur," ujar putri mantan Sekda Kabupaten Ogan Ilir Ir H Sobli Rozali, MSI dan Hj Marwiyah SH MH ini.

Apa yang dikemukakan oleh Amaliah sekaligus menunjukkan pemahamannya tentang perannya sebagai Senator DPD



Alhasil, Amaliah menjanjikan jika terpilih kembali akan mengulang menyumbangkan gajinya setiap bulannya untuk kepentingan masyarakat dan mungkin dirinya sudah berada (anggota DPD) tahu akan ada program apa saja. "Akan ada program-program apa yang dibawah, mungkin bukan cuman gaji saja bisa

perikanan. "Jadi untuk pertanian saya terus berjuang dengan para petani baik pupuk maupun perluasan lahan dan untuk berikutnya mungkin di tahun berikutnya," tutur Amaliah.

Menurut dia, jika masih diberikan kesempatan ada satu hal yang belum ia perjuangkan kemarin mengenai men-



Dari Desember 2022 kami serahkan dukungan KTP awalnya 4000 dan kemudian setelah diverifikasi menjadi 3800, dan juga hari ini penyerahan formulir berupa syarat dukungan lainnya itu juga sudah di upload melalui silon, serta saya datang secara simbolis menyerahkan langsung kepada KPU Sumsel

sebagaimana termuat di laman dprd.go.id. Merujuk ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi.

Tugas dan Wewenang DPD RI:

1. Pengajuan Usul Rancangan Undang Undang

Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2. Pembahasan Rancangan Undang Undang

Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan oto-



nomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

3. Pertimbangan Atas Rancangan Undang-Undang dan Pemilihan Anggota BPK

Pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama serta memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.

4. Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang

Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

5. Penyusunan Prolegnas

Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

6. Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan Peraturan daerah (Ranperda) dan Peraturan daerah (Perda).

Akan banyak yang berharap para senator DPD RI asal Sumatera Selatan hasil Pemilu 2024 menunjukkan kinerjanya yang lebih baik. Tak terkecuali bagi pendatang baru dengan suara terbanyak, Ratu Tenny Leriva. ♦



ANGKET

GUNAWAN EFFENDI

Hak Angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ini gagasan baru, juga merupakan terobosan dalam alur penyelesaian sengketa mengenai hasil penghitungan suara dalam Pilpres di Indonesia.

Bermula dengan tawaran Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang mengajukan gagasan menggunakan hak angket itu. Ganjar mengemukakan, hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2024.

Jika DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mengajukan alternatif berupa penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024. Hak Angket dan Hak Interpelasi adalah dua dari privilege atau keistimewaan DPR dalam sistem politik di Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Satu privilege lagi adalah Hak Menyatakan Pendapat. Namun, keistimewaan ini dimiliki pula oleh perorangan atau lembaga lain di luar parlemen. Jadi, yang benar-benar keistimewaan bagi DPR adalah Hak Angket dan Hak Interpelasi untuk mengawasi kekuasaan eksekutif. Selain pengawasan, DPR juga memiliki fungsi legislasi (penyusunan Undang-Undang) dan fungsi budget (penyusunan anggaran).

Menurut laman resmi situs DPR, Hak Interpelasi adalah hak DPR meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan Hak Angket adalah hak DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan gagasan Ganjar, dapat muncul pertanyaan bagaimana jika kedua hak itu digunakan bersamaan? Bukankah menyelidiki juga memerlukan pengumpulan informasi melalui pertanyaan?

Toh Ganjar yang menjadi Capres dengan dukungan dari PDI Perjuangan dan PPP mengakui, penggunaan Hak Angket memerlukan dukungan mayoritas anggota DPR. Tak terkecuali dukungan partai pendukung pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin. Menurut Ganjar dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

Capres Ganjar menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR telah disampaikannya dalam rapat koor-

dinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) pada 15 Februari 2024. Pada kesempatan itu, dia juga membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mendorong PDI Perjuangan dan PPP untuk mengajukan hak angket di DPR yang merupakan hak wakil rakyat untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan ini. Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu.

Menurut Ganjar, dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR, terlepas apapun kepentingan politik dan dukungan pada paslon tertentu. Dia juga mendorong anggota dewan di parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara pemilu sebagai fungsi kontrol. "Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan," ungkap Ganjar yang dalam Pilpres 2024 berpasangan dengan Cawapres Mahfud MD.

Nah, sambutan datang dari tiga partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN): Partai NasDem, PKB, dan PKS siap mendukung hak angket di DPR terkait mengusut kecurangan Pemilu 2024 yang digagas Ganjar. Usai pertemuan tiga Sekretaris Jenderal ketiga partai, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengemukakan tercapai kesepakatan mendukung Hak Angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Hermawi menyebut NasDem dan dua partai koalisi AMIN telah siap dan bahkan telah mengantongi data yang akan menjadi bukti dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024. Ia mengemukakan pula keinginan ketiga partai untuk menemukan kebenaran dalam Pemilu dan Pilpres 2024. "Kenapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran. Kami bersekutu dengan siapapun di Republik ini yang memiliki itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia," ujarnya.

Sedangkan partai-partai pengusung pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka cenderung akan menolak Hak Angket itu. "Partai Golkar dan partai koalisinya itu pasti akan menolak," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai acara pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Airlangga menambahkan, koalisi partai pengusung Capres-Cawapres nomor urut 1 termasuk Partai Demokrat sudah memperhitungkan suara dukungan untuk menggunakan Hak Angket semakin sedikit. Sedangkan AHY mengemukakan, menghargai ekspresi berbagai kalangan terkait gagasan Hak Angket. Namun, ia menilai tidak perlu ada prasangka kecurangan.

Nah, ahli hukum tata negara Fahri Bachmid berpendapat,

sengketa pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), pengguliran hak interpelasi dan hak angket oleh DPR dalam mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024, menurut Fahri, tidak masuk akal atau absurd.

Merujuk pada UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), Fahri mengemukakan Hak Angket dimaksudkan untuk mengawasi lembaga eksekutif, yang mencakup Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian. Perkara pemilu, sebaiknya diselesaikan di peradilan konstitusi.

Sedangkan aturan mengenai sengketa Pemilu, katanya, telah ditentukan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan bahwa 'Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum'. Jadi, lanjut Fahri,

Jika tak ada pengajuan sengketa MK? Yusril mengatakan, akan menjadi tanda tanya pula karena prosedur sengketa hasil Pemilu justru harus diselesaikan di MK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Tambahan pula, lanjut Yusril, masa jabatan Presiden habis pada 20 Oktober 2024. "Harus ada Presiden baru. Kalau enggak, negaranya kan bisa kacau," kata Yusril.

Meski begitu, Yusril tetap menghargai usulan dari capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang ingin DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Sedangkan hasilnya, berupa rekomendasi dari DPR. Tapi apapun rekomendasi dari DPR itu tidak menggugurkan putusan MK andai kata persidangan berlangsung.

Apa yang dapat disimpulkan? Penggunaan Hak Angket (juga Hak Interpelasi) perlu menegaskan target utamanya.



jalan itulah yang semestinya digunakan.

Dengan demikian, kata Fachri, jika hak angket digunakan sebagai alat untuk mengurai permasalahan Pemilu, maka pada hakikatnya itu telah masuk pada ranah sengketa Pemilu, yang tentunya merupakan yurisdiksi pengadilan, yang mana penyelesaiannya merupakan kompetensi absolut MK, bukan DPR.

Bagaimana jika ternyata Hak Angket ternyata dapat bergulir? Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengemukakan, bila kelak hak angket menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 bergulir juga, instrumen tersebut juga tak bisa menggagalkan hasil pemilu jika sudah ada putusan MK.

Tambahan pula, target itu harus tercapai sebelum masa jabatan Presiden selesai pada 20 Oktober 2024.

Dengan kata lain, penggunaan Hak Angket (juga Hak Interpelasi) dalam proses Pilpres 2024 adalah terobosan baru yang dapat menjadi ujian bagi kepiawaian berpolitik di tingkat kenegaraan. Apapun hasilnya, jalur politik yang berada dalam koridor konstitusional akan lebih bermartabat dibandingkan dengan pengerahan massa yang berisiko kekerasan fisik.

Martabat seperti itu jelas menjadi bekal bermanfaat bagi pematangan demokrasi di Indonesia. Tentu saja untuk segenap bangsa yang memasuki usia 74 pasca Proklamasi Kemerdekaan pada 1945. ♦



JALAN TERJAL SERTIFIKASI HALAL

Sudah muncul gagasan menunda pemberlakuan kewajiban sertifikat halal yang terjadwal pada Oktober 2024. Proses sertifikasi halal bagaikan mendaki jalan terjal.

Sertifikasi halal gratis (Sehati) pun agaknya belum cukup mendorong pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal bagi produk-produknya. Padahal kuota (jatah) yang tersedia mencapai satu juta bagi pelaku usaha menengah dan kecil (UMK).

"Kemarin, saat Rakernas di Semarang, saat harus 'sorogan' program, saya sudah menyampaikan kepada Gus Men (Menag Yaqut Cholil Qoumas), bahwa BPJPH akan kembali membuka Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati untuk satu juta kuota bagi pelaku UMK," ungkap Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Aqil Ibrahim, awal Februari 2024.

Menurut dia, program Sehati adalah bentuk keberpihakan Pemerintah kepada para pelaku UMK sebagaimana amanat undang-

undang. "Program ini juga masuk dalam Pakta Integritas yang saya tandatangani di hadapan Menag," sambungnya.

Aqil menambahkan, sumber pembiayaan program Sehati, antara lain mencakup 62 persen total anggaran BPJPH pada 2024. Selain itu, pembiayaan sertifikasi halal juga didukung oleh anggaran fasilitasi sertifikasi halal dari berbagai Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait.

"Termasuk dukungan nomenklatur anggaran fasilitasi sertifikasi halal dari Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia melalui terbitnya Permendagri Nomor 15 Tahun 2023, serta dari stakeholder yang lainnya. Diharapkan satu juta kuota sertifikasi halal gratis dapat tercapai kembali," sambung Aqil menjelaskan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-un-

dang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, diatur dengan penahapan di mana masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir 17 Oktober 2024.

"Berdasarkan regulasi JPH, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan," kata Aqil.

Ketiga kelompok produk tersebut, sam-



bungnya, harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. "Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya. Untuk itu kami himbau para pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal melalui BPJPH," lanjut Aqil.

Ia menegaskan, batasan ketiga kelompok produk tersebut sudah jelas, dan tanpa pengecualian. "Jadi misalnya produk makanan, mau itu yang diproduksi oleh usaha besar, menengah, kecil hingga mikro seperti pedagang kaki lima di pinggir jalan, semuanya sama, dikenai ketentuan kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan regulasi," tambahnya.

Lebih lanjut, Aqil menjelaskan bahwa sanksi yang akan diberikan dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Saksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 tahun 2021.

"Oleh sebab itu, sebelum kewajiban sertifikasi halal tersebut diterapkan, kami mengimbau seluruh kepada pelaku usaha khususnya dengan ketiga kategori produk tadi agar segera mengurus sertifikat halal produknya," ungkap Aqil.

Induk regulasi jaminan produk halal adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, UU

ini mengalami perubahan bersamaan dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 juncto Perppu No. 2 Tahun 2022 juncto UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Regulasi teknis yang perlu diperhatikan juga cukup banyak mulai dari PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Agama No. 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, Keputusan Menteri Agama No.1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal, hingga Keputusan Kepala BPJPH No. 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengelolaan.

Mengenai program Sehat, prosedurnya adalah self declare (pernyataan produsen atau penyedia jasa sendiri) sebagai kemudahan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMK di seluruh Indonesia dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. "Ini adalah kemudahan Pemerintah yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku UMK. Silahkan para pelaku UMK bersegera mengajukan sertifikasi halal, mumpung kuotanya masih tersedia," imbaunya.

Adapun pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi Sihahal yang dapat diakses

kapanpun dan dari manapun secara online selama 24 jam, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal. Pelaku usaha juga tidak perlu lagi membawa berkas-berkas dokumen persyaratan ke kantor BPJPH, atau PTSP di setiap Kanwil Kemenag atau Kankemenag kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Selengkapnyanya persyaratan untuk dapat mengikuti program Sehat dapat dilihat di kanal resmi BPJPH, seperti laman halal.go.id atau akun instagram [halal.indonesia](https://www.instagram.com/halalindonesia).

Sepanjang 2022-2024, sudah terpatok target ambisius sertifikat produk halal akan mencapai 10 juta produk. Latar belakangnya, populasi penduduk muslim Indonesia pada 2022 mencapai 241,7 juta orang atau 87 persen dari total penduduk yang mencapai 273,52 juta jiwa. Sedangkan belanja produk dan layanan halal diproyeksikan mencapai US\$ 281,6 miliar pada 2025.

Target sertifikasi halal yang dipatok pasca wabah Covid-19 itu diharapkan menjadi pemicu kebangkitan UMK setelah lebih dua tahun terdampak pandemi. Sedangkan program sertifikasi halal sudah dimulai sejak 17 Oktober 2019.

Terkait dengan itu, BPJPH menerapkan enam upaya percepatan capaian target 10 juta sertifikat halal pada 2024. Pertama, pelatihan bagi pendampingan proses

produk halal (PPH). Bersama Perguruan Tinggi dan Ormas Keagamaan Islam, BPJPH menyiapkan pendamping PPH dengan target 100.000 orang. Keberadaan pendamping PPH penting dalam mendukung proses sertifikasi halal UMK dengan skema self declare.

Setidaknya, hingga akhir 2023 sudah tersedia 156 Lembaga Pendamping PPH yang sudah teregistrasi dan 174 Lembaga Pendamping PPH yang sudah mengikuti pelatihan. BPJPH juga mencatat, saat ini sudah ada 710 trainer pendamping PPH, 2.210 pendamping PPH yang sudah terdaftar. Tak hanya itu, sebanyak 497 auditor halal tersertifikasi juga masih akan terus diting-

Kampanye ini dilakukan di seribu titik pada 34 provinsi. BPJPH akan memastikan kewajiban sertifikasi halal tersosialisasi di 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan langkah keenam, BPJPH akan melakukan pengawasan secara berkesinambungan. Menurut Aqil, pengawasan ini menjadi kunci sehingga keterlibatan seluruh pemangku kebijakan amat diperlukan.

Nah, bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikat halal melalui jalur reguler akan dikenakan biaya. Bagi pelaku usaha mikro kecil sebesar Rp 300.000 per produk, pelaku usaha menengah sebesar Rp 5 juta per produk, dan pelaku usaha besar Rp 12.500.000 per produk.

memiliki sertifikasi halal meliputi makanan dan minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Aqil berharap, pelibatan kalangan industri dalam edukasi terkait pentingnya sertifikasi halal ini dapat tersebar secara masif kepada masyarakat.

Pada 12 Februari 2024, misalnya, BPJPH berkoordinasi dengan lima belas perusahaan yang masuk dalam Top 30 OIC Halal Products Companies 2023. Dalam pertemuan itu, para perwakilan perusahaan juga menyatakan komitmen mereka dalam mendukung upaya pemerintah dalam rangka



katkan agar bisa menjangkau 37 provinsi di seluruh Indonesia.

Langkah kedua program akselerasi adalah pengembangan kantin halal. Targetnya adalah mendorong kantin-kantin di seluruh satuan kerja Kemenag untuk bersertifikat halal.

Ketiga, memperkuat kemitraan dengan kementerian/ lembaga. Keempat, fasilitasi sertifikasi halal reguler bekerja sama dengan para pemangku kepentingan.

Kelima adalah kampanye wajib halal.

Untuk pelaku usaha besar, BPJPH merangkul industri berskala nasional maupun global untuk berkolaborasi dalam menyosialisasikan kewajiban sertifikasi halal yang akan diterapkan mulai 18 Oktober 2024. "Kami mengajak perusahaan-perusahaan besar juga ikut berpartisipasi secara kolaboratif untuk memberikan dukungan sosialisasi, publikasi, edukasi, literasi kewajiban sertifikasi halal yang akan diberlakukan mulai Oktober 2024," ujar Aqil.

Menurut dia, produk-produk yang wajib

melaksanakan pemberlakuan wajib sertifikasi halal mulai Oktober 2024.

Kolaborasi dengan berbagai perusahaan tersebut, menurut Aqil, tidak hanya bermanfaat dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi wajib halal. Namun, hal itu sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama untuk terus memperkuat ekosistem Jaminan Produk Halal di Indonesia. "Sebab, kita bersama mempunyai tujuan yang sama, mewujudkan cita-cita bersama sebagaimana telah dinyatakan oleh Bapak

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal terbesar di dunia," kata Aqil.

Merespons ajakan tersebut, para pimpinan perusahaan menyambut baik dan mengaku siap memberikan dukungan bagi penyelenggaraan sosialisasi dan publikasi kewajiban sertifikasi halal secara bersama-sama.

"Kami sebagai pelaku industri ingin terus comply (taat) terhadap segala regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini sertifikasi halal juga sudah jadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses bisnis kami sedari awal," kata perwakilan PT Heinz ABC Indonesia, Jesen Tjolleng.

Tidak hanya dalam hal sosialisasi dan publikasi, pelaku usaha juga siap memberikan bantuan fasilitasi bagi pelaku usaha khususnya pelaku UMK dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

"Agenda kami tahun ini kebetulan juga sama, yakni melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha kecil di sekitar lokasi outlet kami. Kami harapkan ke depan sosial-

Hanung Harimba Rachman mengatakan, beberapa pihak belum siap dengan kebijakan tersebut, sehingga diharapkan dapat ditunda. "Jadi harusnya penerapannya, kalau saya berharap ditunda. Atau pendekatannya berubah. Yang haram yang wajib pakai sertifikat. Jadi jangan mempersulit UMKM," kata Hanung, Jumat, 23 Februari 2024

Hanung menghitung tidak semua produk UMKM dapat disertifikasi halal hingga Oktober 2024. Itu termasuk program Sehat yang bersifat gratis dengan kuota satu juta sertifikat.

Sejauh ini, kata Hanung, rata-rata produk yang disertifikasi hanya 200 produk, sementara satu UMKM bisa memiliki lima produk. "Enggak akan tercapai itu. Lebih baik dari awal, kalau saya ya ditunda atau memang kalau perlu diubah pendekatannya," ujarnya.

Mengubah pendekatan yang disebut Hanung adalah memulai sertifikasi halal di titik utama di hulu. "Misalnya, produk daging harus dipastikan rumah potongnya bersertifikat halal. Kalau itu sudah halal, kan produk akhirnya pasti halal juga," ujarnya.

Hanung menjelaskan, terkait dengan tenggat waktu penerapan kewajiban sertifikat halal bagi UMKM, Menkop UKM Teten Masduki sudah berkomunikasi dengan Kemenag. Ia berharap ada titik terang dari kebijakan sertifikat halal UMKM.

"Nanti kita lihat lah. Saya rasa itu jadi salah satu perhatian. Memberi makan itu penting. Lapangan kerja kehidupan itu sangat penting, 99 persen lapangan kerja itu diciptakan UMKM," tandas Hanung.

Kita tunggu titik-terangnya. Itu juga penting meskipun harus mendaki jalan terjal. ♦



Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya. Untuk itu kami himbau para pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal melalui BPJPH.

isasi ini dapat dilakukan bersama dengan BPJPH utamanya bagaimana cara mereka mendaftarkan (sertifikasi halal) produknya," kata perwakilan PT Rekso Nasional Food McDonald's, Fauziah.

Toh nada pesimis tetap muncul dari pemangku kepentingan terkait tak terkecuali kementerian dan lembaga. Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Kemenkop UKM) berharap kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki sertifikat halal hingga 17 Oktober 2024 dapat ditunda.

Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM



ALHAMDULILLAH BANDARA GATOT SUBROTO SEGERA BEROPERASI

PERJUANGAN AGUS FATONI BERSAMA PARA BUPATI BERHASIL



Agus Fatoni Penjabat, (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), ingin agar semua sarana milik Pemerintah dimanfaatkan secara optimal dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu ia gundah melihat Bandar Udara (Bandara) Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, beku operasi.

Pj Gubernur Sumsel, yang juga Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI ini pun terus memperjuangkan, Bandara Gatot Subroto Way Kanan bisa segera beroperasi kembali.

Agus Fatoni melihat, beroperasinya Bandara ini akan mempercepat akses masyarakat di daerah-daerah sekitarnya. Juga memajukan wisata Danau Ranau yang indah permai dengan Gunung Semining yang menjulang.

Untuk itu Agus Fatoni, Selasa (5/3/2024), memimpin rombongan bupati beraudiensi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Jakarta.

Bersama Agus Fatoni saat itu adalah dua bupati dari Provinsi Lampung yaitu Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya dan Bupati Lampung Barat Nukman. Para bupati dari Provinsi Sumsel adalah Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Lanosin, Bupati OKU Teddy Meilwansyah, dan Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo.

Agus Fatoni dan rombongan diterima Menhub Budi Karya Sumadi dan membahas reaktivasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan di Kantor Kemenhub. .

"Ya, saya selaku Dirjen Bina Keuangan Daerah sekaligus Pj Gubernur Sumsel beserta Kadis Perhubungan Provinsi Sumsel dan Provinsi Lampung, dan Bupati-Bupati daerah di sekitar Bandara Gatot Subroto Way Kanan beraudiensi dengan Bapak Menhub," ucap Agus Fatoni.

"Kami menyampaikan permohonan untuk percepatan aktivasi Bandara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan," katanya.

MENHUB SETUJU DAN TAWARKAN PESAWAT ATR

Agus Fatoni dalam pertemuan dengan Menhub Budi Karya Sumadi di Kantor Kemenhub RI di Jakarta mengungkapkan, pentingnya Bandara Gatot Subroto Way Kanan untuk direaktivasi. Para bupati baik yang dari Provinsi Lampung maupun Provinsi Sumsel juga mengemukakan berbagai keuntungan yang didapat daerah-



Ya, saya selaku Dirjen Bina Keuangan Daerah sekaligus Pj Gubernur Sumsel beserta Kadis Perhubungan Provinsi Sumsel dan Provinsi Lampung, dan Bupati-Bupati daerah di sekitar Bandara Gatot Subroto Way Kanan beraudiensi dengan Bapak Menhub

daerah tersebut bila bandara ini dioperasikan.

Agus Fatoni menjelaskan bahwa kehadiran Bandara Gatot Subroto Way Kanan sangatlah penting. Karena besarnya kebutuhan masyarakat, dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga sekitar.

Di samping kebutuhan dan potensinya sangat besar, Bandara Gatot Subroto Way Kanan sudah siap. Soal anggaran, seluruh Pemerintah Daerah sekitar juga sudah disiapkan guna mendukung percepatan reaktivasi bandara ini.

"Jadi dari sisi anggaran sudah siap, hubungan perusahaan-perusahaan pendukung sudah siap, bandara sudah siap hanya perlu pembenahan sebentar, sedikit lagi sudah lebih siap lagi," katanya.

Diharapkannya, Menhub Budi Karya Sumadi bisa secepatnya merealisasikan reaktivasi Bandara Subroto Way Kanan.

Karena beroperasinya bandara ini akan berdampak langsung pada daerah-daerah sekitar.

Sementara itu, Menhub menyambut baik rencana reaktivasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan. Bahkan Menhub memberi opsi untuk mengupayakan pesawat ATR guna mendukung percepatan reaktivasi bandara tersebut.

"Opsi pertama itu pesawat ATR, itu kami upayakan untuk disediakan ya, kami akan upayakan semaksimal mungkin,"

ucap Menhub.

"Tapi pada prinsipnya kami akan upayakan percepatan reaktivasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan akan segera beroperasi untuk komersil kembali," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, hadir juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel Aprizal Hasyim, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Helmy Zain, Kasubdit Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah Provinsi Sumsel Muhammad Valiandra. ♦





AGUS FATONI AKAN BANGUN JALAN ANGKUTAN BATUBARA UNTUK OPTIMALKAN PEMANFAATAN POTENSI PERTAMBANGAN DI SUMSEL

Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni bersyukur atas besarnya potensi sumber daya alam (SDA) berupa tambang, utamanya batubara, di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang ia pimpin saat ini.

Ia akan membawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel memanfaatkan secara optimal potensi SDA ini demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Yang pertama akan digarap Pemprov Sumsel adalah potensi SDA di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Agus Fatoni menegaskan komitmennya untuk tidak menyalakan potensi tersebut.

Penegasan itu disampaikan Fatoni dalam Rapat Optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral dan Batubara (Minerba) di wilayah Kabupaten Muratara yang ber-

langsung di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Tak hanya melihat potensi SDA tambang itu. Pj Gubernur juga menemukan kendala untuk optimalisasi SDA bidang tambang ini. Dan, ia pun telah siap untuk memberikan solusinya. Pemprov Sumsel, aku Agus Fatoni, akan memberikan kemudahan akses angkut hasil tambang. Dalam hal ini batubara.

Pemprov Sumsel siap segera akan memperbaiki bahkan membangun jalan-jalan, yang menjadi selama ini merupakan salah satu kendala untuk memajukan sektor pertambangan di Provinsi ini.



"Salah satu kendala adalah jalan akses untuk angkutan hasil tambang di sini. Ini yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana mengoptimalkan potensi yang sangat besar ini, khususnya di Muratara.

"Kemudian bagaimana bisa mendapatkan manfaat, kebaikan dari potensi yang sangat besar itu," kata Fatoni dalam keterangan resminya, Kamis (7/3/2024).

Agus Fatoni menyebut salah satu pintu masuknya, di tahap pertama ini, adalah perbaikan jalan.

"Maka, ini akan kita pikirkan bersama-sama," tegasnya.

SELARASKAN OPTIMALISASI POTENSI TAMBANG DENGAN LINGKUNGAN

Agus Fatoni dalam upaya mengoptimalkan potensi tambang mengatakan, Pemprov Sumsel akan bekerja keras untuk mewujudkan langkah ini. Kendati demikian, Pemprov Sumsel tidak akan membibuta dalam optimalisasi itu, melainkan

akan menyelaraskan kegiatan optimalisasi potensi tambang dengan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah tambang.

Jika dimanfaatkan dengan baik, potensi tambang tersebut akan berdampak positif secara luas mulai dari perusahaan, pemerintah daerah setempat, juga masyarakat di daerah tersebut.

"Pertama dari perusahaan, mereka untung, dan memang prinsip bisnis, harus

capaian prestasi yang tidak lepas dari andil perusahaan-perusahaan baik milik Pemerintah maupun swasta, melalui dana Corporate Social Responsible atau CSR yang berarti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan masing-masing.

Berbagai gerakan serentak guna mengentaskan kemiskinan ekstrem dan penanganan inflasi serta menurunkan angka stunting terus semakin digencarkan. Gerakan



seperti itu," kata Pj Gubernur.

Kedua, menurutnya, Pemerintah Daerah dengan adanya Dana Bagi Hasil (DBH), harus serta sumber-sumber dana lain," tambahnya.

Dia menyampaikan pertemuan antara perusahaan dan pemerintah sangatlah penting, untuk dapat berdiskusi langsung serta menyampaikan pendapatnya masing-masing.

"Saya apresiasi, ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk bersama-sama membahas kondisi daerah dengan terbuka," ujarnya.

Pj Gubernur juga mengatakan, Pemprov Sumsel telah mengoleksi sejumlah

serentak itu, antara lain Gerakan Penanganan Inflasi Serentak Se-Sumsel (GPISS).

Juga, Gerakan Pasar Murah Serentak Se-Sumsel (GPMSS), Gerakan Bedah Rumah Serentak Se-Sumsel (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak Se-Sumsel (GPSSS) dan Gerakan Penanganan Stunting Serentak Se-Sumsel (GPStSS).

"Prinsipnya kami pemerintah ingin investor yang di Sumsel bisa tenang, maju, dan bisa memaksimalkan produksinya sehingga apa yang dibutuhkan perusahaan akan kita penuhi dan tentunya harus berdampak kepada masyarakat," harapNYA.

Oleh karena itu, lanjut Pj Gubernur, pertemuan Optimalisasi DBH Minerba di wilayah Kabupaten Muratara ini sangat baik.

"Kita cari masukan dari posisi masing-masing sehingga produksi dan hasil dapat dirasakan masyarakat daerah," ajaknya.

Pertemuan ini dihadiri Bupati Muratara Devi Suhartoni, Kepala OPD Provinsi Sumsel, Kepala OPD Kabupaten Muratara, Pimpinan Perusahaan bidang Minerba di Kabupaten Muratara.

Selain itu juga hadir pimpinan PT Bara Sentosa Lestari, pimpinan PT Triyariani, pimpinan PT Gorbi Putra Utama, pimpinan PT Banyan Koalindo, dan PT Musi Mitra Jaya. ♦



**Saya apresiasi,
ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk bersama-sama membahas kondisi daerah dengan terbuka.**

PROVINSI SUMATERA SELATAN TELAH 100 PERSEN PEMERINTAHAN DIGITAL

Jadi Provinsi Terdepan di Pulau Sumatera

Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat sukses besar, dan menjadi provinsi terdepan di Pulau Sumatera dalam bidang Pemerintahan Digital. Seluruh Pemerintah Kabupaten-Kota dan Pemerintah Provinsi Sumsel sudah 100% Pemerintahan Digital.

Dengan capaian itu, Sumsel dipilih menjadi titik ke-2 roadshow dari lima wilayah yang terpilih, sekaligus tuan rumah Sosialisasi Kriteria Championship TP2DD Wilayah Sumatera 2024 dan literasi digital untuk percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah-daerah seluruh Indonesia.

Kegiatan bergengsi ini diselenggarakan di The Excelton Hotel Palembang, Jumat (29/2/2024).

Sumatera Selatan pada semester kedua tahun 2023 menjadi satu-satunya wilayah di Pulau Sumatera yang 100% digital pada sistem pemerintahan daerah (Pemda). Hal ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi untuk menjadi pemda yang berada pada tahap maju.

PJ Gubernur Dr Agus Fatoni mengungkapkan bahwa Provinsi Sumsel, berdasarkan Survei Indeks ETPD semester kedua tahun 2023, seluruh Pemda atau sebanyak 18 Pemda masuk ke dalam kategori Pemda Digital. Capaian ini mengalami peningkatan dari semester pertama tahun 2023.

"Dengan pencapaian ini menjadi bukti nyata semangat dan komitmen pemerintah daerah di wilayah Sumsel dalam mensukseskan percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah," kata PJ Gubernur.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sumsel tahun 2023 menginjak angka

5,08%, angka ini menjadi yang terbesar kedua di Sumatera melewati angka nasional. Pencapaian tersebut tidak bisa luput dari dorongan percepatan transformasi digital, usai melewati pemulihan kinerja perekonomian pasca covid-19.

Selain itu A. Fatoni menghimbau agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di Sumsel dapat memaksimalkan pengisian Championship TP2DD tahun 2024 dengan sungguh-sungguh, sehingga akan menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi,

pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah.

"Championship ini tidak hanya sebuah ajang untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam implementasi digitalisasi. Tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan komitmen Pemerintah Daerah dan mempercepat implementasi digitalisasi," tandasnya.

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Digital

Dalam kesempatan itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Sumatera Selatan Ricky Gozali turut mengungkapkan, pergeseran perilaku masyarakat yang serba digital mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumsel.

Salah satu aspek yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi digital yaitu melalui sistem pemba-



garan yang sudah beralih ke digital.

Sementara itu Ferry Irawan selaku Ketua Satgas TP2DD mengatakan bahwa TP2DD menargetkan, 85% Pemda berada di level digital untuk meningkatkan ekosistem dan percepatan ekonomi.

"Dan, Provinsi Sumatera Selatan menjadi satu di antara 3 wilayah yang memegang peran penting untuk peningkatan ekonomi," katanya.

TP2DD menargetkan pertumbuhan ekonomi 2024 lebih akseleratif, inklusif, dan berkelanjutan. Pada tahun 2024 mencapai 85% pemda berada di level digital, yang akan dicapai melalui penguatan regulasi dan koordinasi.

Menurut Ferry, Sumsel memegang peranan penting, karena untuk mencapai ekonomi yang baik tahun 2024 berhubungan dengan kesediaan beras.

Dengan dua poin yaitu kombinasi dan pemanfaatan lahan rawa yang case-nya ada di Sumsel, akan meningkatkan ekosistem dan percepatan ekonomi.

Turut hadir Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil Kemenko Perekonomian Puji Gunawan, SST. AK., M.B; Direktur Pendapatan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sekaligus Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Hendriwan, M.Si;

Ada pula Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Lydia Kurniawati Christyana, MM; Pj. Walikota Prabumulih Elman; Pj. Bupati Lahat Muhammad Farid; Pj. Sekda Empat Lawang Hepy Safriani; dan para Kepala OPD Provinsi Sumsel.

Kepala Desa Unsur Terdepan Penyelenggaraan Pemerintahan

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menghadiri sekaligus Membuka Bimbingan Teknis Infrastruktur Desa Kabupaten Musi Banyuasin di Ballroom Hotel Beston Palembang, Senin (26/02/2024).

Bimtek berlangsung 5 hari, tanggal 26 Februari-5 Maret 2024, dibagi 2 gelombang, diikuti 458 Perangkat Desa, dan dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr Agus Fatoni.

Pj Gubernur mengatakan, kegiatan ini penting dilaksanakan guna meningkatkan kapasitas Kepala Desa dan jajarannya. Tanpa bekal yang cukup, tanpa ilmu yang cukup, tidak ada orang termasuk perangkat desa yang dapat menjalankan tugas dengan baik.

"Infrastruktur desa penting, keuangan juga penting, maka saya pesan kepada semua Kepala Desa jangan berhenti belajar. Pelajari semua aturan, semua regulasi, kare-

na aturan itulah yang akan menyelamatkan kita semua. Jadi terus tingkatkan kapasitas," katanya.

Kepala Desa adalah unsur terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

ing dapat makanan bergizi setiap hari selama 6 bulan.

Di desa ada rumah-rumah yang tidak layak huni, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mencanangkan program bedah



Seperti dalam program pemerintah tentang penanggulangan Stunting, pemberian bantuan keluarga yang stunting harus dikontrol, tugas Kepala Desa memastikan bayi stunt-

rumah dan perbaikan sanitasi. Dan akan membedah 8391 rumah di seluruh Sumsel. Perangkat Desalah yang mendata rumah-rumah tersebut. ♦

PRESIDEN JOKOWI TIBA DI PALEMBANG DISAMBUT PJ GUBERNUR DAN FORKOPIMDA SUMSEL

Dari IKN ke Palembang, Hadiri Pembukaan Muktamar XX IMM

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat 1 Maret 2024 pukul 16.05 WIB mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II di Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).



Tampak menyambut kedatangan Presiden di bandara tersebut yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Pj. Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen Yanuar Adil, dan Kapolda Sumatera Selatan Irjen A. Rachmad Wibowo.

Presiden tiba di Palembang pada sore hari langsung dari Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). Presiden datang ke Palembang untuk menghadiri Pembukaan Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) XX Tahun 2024 di Jakabaring Sport City (JSC).

Tiba di lokasi Pembukaan Muktamar XX IMM, Presiden disambut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Abdul Musawir Yahya, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir.

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengemukakan betapa penting arti IMM bagi Bangsa Indonesia. Karena itu dia di tengah kesibukannya menyempatkan hadir di Pembukaan Muktamar IMM tersebut pada Jumat malam.

Diakui Presiden Jokowi, dirinya sengaja hadir dalam Muktamar XX karena IMM merupakan organisasi yang sangat penting.

"Hari ini saya ada tujuh kegiatan di IKN, Kalimantan Timur, dan baru sampe di Palembang sore ini. Mengapa saya capek-capek datang ke sini? Karena IMM adalah organisasi yang sangat penting," tandas Presiden.

Di bagian lain pidatonya, Presiden men-



dorong anak-anak muda terjun ke politik. Anak-anak muda Indonesia tidak boleh apatis terhadap politik. Justru generasi muda harus punya kemauan besar untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Berat, Tapi Indonesia Segera Jadi Negara Maju

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) selalu membuat hangat suasana di manapun dia berada. Usai memberikan sambutan pada Pembukaan Muktamar XX IMM, Presiden memanggil salah satu kader IMM yang dimintanya membacakan Pancasila.

Hadirin tertawa riuh begitu kader IMM usai membacakan sila-sila Pancasila, karena Presiden langsung memberikan hadiah padanya satu unit sepeda.

Sebelum itu, dalam sambutannya Presiden meminta generasi muda Indonesia tidak apatis dengan politik. Generasi muda didorong peduli bahkan terjun ke dunia politik agar memberi kontribusi bagi kemajuan Indonesia.

Ditegaskan Presiden, Indonesia dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan. Berbagai lembaga internasional mengkalkulasikan itu. Namun tidak berarti semuanya dapat dicapai dengan mudah.

Beberapa tahun terakhir landscape politik dan ekonomi global itu berubah karena disrupsi teknologi dan juga adanya perubahan akibat interaksi lewat media sosial.

Kondisi geopolitik saat ini sangat sulit dihitung bahkan ekonomi global penuh ketidakpastiannya, sulit dikalkulasikan.

"Tetapi, dengan kondisi ketidakpastian dan adanya tekanan-tekanan di posisi itu justru Indonesia memiliki peluang dan kesempatan melompat untuk menjadi negara maju," kata Presiden.

Tantangan terberat bagi kemajuan Indonesia, menurutnya, adalah soal hilirisasi.

Presiden melanjutkan, "Saya kasih contoh seperti tambang Freeport yang sudah 55 tahun itu hanya mengekspor tembaga, akan tetapi kita tidak tahu apakah mereka mengekspor hanya tembaga atau ada emasnya."

Tidak mudah membangun smelter karena selama ini Indonesia terlalu nyaman mengirim bahan mentah ke Jepang, Spanyol, dan negara-negara lainnya. Pembelian saham 51 persen PT Freeport oleh BUMN, memudahkan program hilirisasi melalui pembangunan smelter.

Diungkap Presiden, "Kita kehilangan nilai tambah dan kesempatan lapangan pekerjaan bagi anak bangsa. Maka dari itu, sembilan tahun yang lalu saya paksa mereka membangun yang namanya industri smelter dan Insya Allah pada Juni 2024 smelter PT Freeport akan beroperasi dan akan merekrut sekitar 15 hingga 20 ribu anak bangsa untuk bekerja." ♦



DIINISIASI PENJABAT GUBERNUR DR H AGUS FATONI SUMSEL TERDEPAN DALAM PENANGANAN TERPADU KEMISKINAN EKSTREM DAN STUNTING

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi yang pertama melakukan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting dengan program terpadu dan serentak di seluruh kabupaten-kota.

Pemprov Sumsel meluncurkan Gerakan Bedah Rumah Serentak Se-Sumsel (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak Se-Sumsel (GPSSS), dan Gerakan Penanganan Stunting Serentak Se-Sumsel.

Program Pemprov Sumsel ini telah diluncurkan Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni, yang pada Rabu (21/2/2024) juga melakukan Launching Bersama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pemberian Sanitasi Serentak di Sumatera Selatan bertempat di Gang Kaleng, Plaju, Palembang.

Pj Gubernur mengatakan, gerakan ini merupakan Program Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumsel, di mana Perbaikan RTLH merupakan bagian dari GBRSS. Gerakan serentak seperti ini terus dilaku-

kan agar pembangunan di Sumsel bisa lebih efektif, efisien, tepat sasaran, bisa diukur keberhasilannya dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Fatoni mengapresiasi dan berterima kasih kepada pihak Bank Sumsel Babel (BSB) dan Jamkrida yang telah membantu sejumlah rumah untuk dibebed. Anggaran bedah rumah didapatkan dari APBN, APBD Provinsi dan Kab/Kota, Baznas, CSR perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta.

"Bedah rumah hari ini berjumlah total 8.391 rumah, kita patut berbangga dan bersyukur. Minimal sejumlah ini dan jumlah ini akan terus bertambah. Karena masih banyak yang mau berkontribusi," ungkapnya.

Dari sejumlah dana yang masuk CSR



baru 75 unit rumah. Dari APBD ada 3.666 unit rumah, APBN 1.345 unit rumah, dan Baznas 234 unit rumah. Saat ini terkumpul data pemberian sanitasi berjumlah 6.984.

"Jumlah ini masih bisa bertambah. Menjadi jumlah pembangunan sanitasi terbesar di Indonesia dan akan kita masukkan MURI," katanya.

Ia menambahkan, "Bisa dibayangkan gerakan ini akan sangat masif dan bisa mengentaskan kemiskinan dari bedah rumah dan pembagian kloset sebagai simbolis gerakan pemberian sanitasi serentak se-Sumsel. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc. mengatakan, gerakan ini diinisiasi oleh Penjabat Gubernur Sumsel.

Setelah diluncurkan, rumah yang telah dibedah akan diresmikan nanti sebelum tanggal 15 Mei yaitu Hari Jadi Provinsi Sumsel.

"Alhamdulillah kita akan melakukan launching 8 ribu lebih rumah secara serentak. Khususnya yang dipersembahkan untuk hari jadi Provinsi Sumsel sesuai umurnya yaitu 78 unit di kota Palembang. Dan ada 1700 unit di Provinsi Sumsel," jelasnya.

umah yang dibedah di kawasan Plaju dimasukan kategori perbaikan rumah yang rusak berat. Dalam launching ini total 7 rumah akan dibedah yaitu 5 rumah melalui Bantuan BSB dan 2 rumah bantuan jamkrida. Mulai dari plaju ini kemudian akan disisir kabupaten-kota hingga nanti mampu membedah sebanyak 1700 rumah.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Sumsel juga melakukan penyerahan bantuan sanitasi secara simbolis kepada masyarakat.

GBRSS dan GPSSS serta Penanganan Stunting Dilakukan Serentak

SEBANYAK 8.391 rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi sasaran Gerakan Bedah Rumah Serentak Se-Sumsel (GBRSS). Ke-8.391 RTLH tersebut resmi dilakukan perbaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.

Diinisiasi Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni, GBRSS dan GPSSS diluncurkan hari ini bersama Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian di Kelurahan Karang Anyar, Palembang, Rabu (21/02/2024)

Selain GBRSS, diluncurkan juga Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak Se-Sumsel (GPSSS), dan Gerakan Penanganan Stunting Se-Sumsel.

"Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian. Atas arahan beliau, yang ingin membangun sanitasi bersih di Indonesia, lahirlah Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak Se-Sumsel ini," kata Pj Gubernur.

"Begitu juga dengan keinginan beliau dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem, sehingga melahirkan gerakan bedah rumah ini, begitu juga dengan stunting", tambah Fatoni.

Sebanyak 6.984 unit pembangunan sanitasi layak berupa closet dan septic tank se-Sumatera Selatan siap untuk sega-

Sementara itu Ketua Umum TP-PKK Tri Tito Karnavian berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten-Kota, stakeholder, BUMN dan BUMD di Sumatera Selatan yang memberi dukungan hingga dicanangkannya program-program ini.

Ia juga mengungkapkan program-program serentak yang diinisiasi oleh Agus Fatoni merupakan inisiatif yang baik dan pertama di Indonesia, dan baik untuk dicontoh oleh daerah-daerah lain di seluruh negeri dari Sabang sampai Merauke.

"Ini merupakan kegiatan serentak yang



ra dibangun dan diselesaikan.

"Dalam menurunkan angka stunting di Sumsel, diantaranya program Bunda Ayah Asuh Stunting atau BAAS. Yang saat ini sudah ada 2.705 balita telah dibantu tersebar di 17 Kabupaten-Kota Se Sumsel. Semoga terus meningkat, mengingat saat ini ada 5.672 balita di Sumsel yang belum dibantu," ungkap Pj Gubernur.

pertama yang saya hadiri di Indonesia dan akan kami sampaikan kepada Mendagri agar kegiatan ini dapat menjadi pilot proyek bagi daerah lainnya", tuturnya.

Turut hadir Pj. Ketua TP PKK Prov. Sumsel, Tyas Fatoni, Pj. Wali Kota Palembang, H. Drs. Ratu Dewa, Para Kepala OPD Prov. Sumsel dan Para Bupati/Walikota Se Sumsel yang hadir secara virtual. ♦

10 NEGARA DENGAN DESTINASI WISATA HALAL TERBAIK DI DUNIA

Sebelum menentukan untuk berwisata, baik ke dalam maupun ke luar negeri, seorang Muslim pasti akan mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya tempat wisata yang akan dikunjungi memiliki tempat ibadah nyaman dan aman, kemudian bagaimana dengan lingkungannya, lalu juga kuliner halal.

Selain itu, yang juga perlu dipertimbangkan adalah destinasi tujuan dari berwisata itu sendiri. Akhir-akhir ini, semakin banyak wisatawan muslim yang melakukan perjalanan wisata dengan menentukan wisata halal sebagai prioritasnya, hal itu dipilih guna untuk mendapatkan fasilitas dan makanan halal yang mudah didapatkan.

Untuk para wisatawan Muslim yang

mungkin belum mendapatkan gambaran, dimana untuk mengunjungi destinasi-destinasi wisata halal yang cocok untuk bagi para traveller muslim, khususnya berwisata halal di luar negeri, berikut beberapa destinasi wisata yang halal-friendly di dunia, yang dapat dipertimbangkan untuk liburan nanti.

Berikut Daftar 10 Negara dengan Destinasi Wisata Halal Terbaik di Dunia:

1. YORDANIA

Negara dengan penduduk mayoritas Muslim ini, menjadi salah satu tempat wisata yang paling cocok bagi para traveller Muslim.

Yordania memiliki beberapa obyek wisata terkenal yang layak dikunjungi. Mulai dari Ajlun, Irbid, Jerash, Aqaba, hingga Amman. Selain itu, para wisatawan Muslim juga bisa mengunjungi ke



Yordania

laut mati dan juga Padang Pasir Wadi Rum.

2. MAROKO

Seperti halnya Yordania, Maroko pun merupakan negara yang hampir 99 persen penduduknya beragama Islam, Sehingga dipastikan destinasi wisata di Maroko dijamin halal dan ramah Muslim.

Maroko terkenal dengan budayanya yang sangat unik, dimana budaya tradisional menyatu dengan budaya modern.

Maroko memiliki beberapa destinasi wisata halal yang wajib dikunjungi. Mulai dari Masjid Hassan II yang sangat terkenal, lalu juga Istana Bahia, Jemaa al Fna, Medina of Marrakech, Kasbah Ait Ben Haddou, Mausoleum Muhammad V, Masjid Koutoubia, Benteng Essaouira hingga El Badi Palace.

3. BRUNEI DARUSSALAM

Brunei Darussalam juga terkenal dengan wisata halalnya yang menarik. Di antara tujuan wisata halal yang menjadi favorit Muslim adalah Ibu kota Brunei, Bandar Seri Begawan.

Di Ibu Kota Brunei ini dikenal sebagai kota yang memiliki sejarah Islam yang

suci ini sangat memberikan kesan wisata spiritual yang tidak akan terlupakan seumur hidup.

Selain menjadi tujuan ibadah haji dan umrah, ada beberapa spot wisata lain di negeri Raja Salman ini, seperti Jabal Nur, Jabal Rahmah, Jabal Uhud, Masjid Quba, Bukit Uhud, Museum Al Quran dan aneka museum yang semakin memberikan wawasan mengenai Sejarah Islam.

5. SPANYOL

Spanyol juga menjadi salah satu tempat wisata Muslim terbaik di dunia.

Penduduknya 50 persen kurang lebih beragama Islam. Spanyol merupakan negara di Eropa yang ramah Muslim selain Turki.

Hal itu dipengaruhi karena Spanyol pernah ditaklukan oleh negara-negara Arab. Hingga berbagai peninggalan Sejarah Islam pun bisa ditemukan di sini, seperti seni dan budaya di Spanyol yang masih menyimpan banyak unsur-unsur Islami.

Seperti Masjid Central Madrid atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Abu Bakr.



Brunei Darussalam



Maroko

kaya, salah satunya adalah Masjid Omar Ali Saifuddin, salah satu masjid terindah di kawasan Asia-Pasifik.

Untuk yang ingin berwisata kuliner, makanan Brunei juga tidak mengecewakan. Karena hampir semua kuliner di Brunei adalah makanan halal. Begitu pula dengan akomodasi, Brunei menyajikan banyak sekali hotel halal dengan fasilitas ibadah yang lengkap.

4. ARAB SAUDI

Tak diragukan lagi, Arab Saudi merupakan negara paling pertama yang dipastikan memiliki tempat-tempat atau destinasi wisata halal terbaik.

Sebagai negara Muslim yang menjadi kiblat umat Muslim se dunia, Arab Saudi memiliki tempat khusus bagi setiap Muslim, yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota



Arab Saudi



Spanyol

6. MESIR

94,5 persen penduduk Mesir beragama Islam. Maka sangat cocok memasukkan Mesir dalam daftar liburan wisata halal terbaik di dunia. Negara yang terletak di benua Afrika bagian utara ini, juga memiliki banyak warisan budaya dan juga warisan sejarah yang terkenal.

Salah satu objek wisata Muslim yang wajib dikunjungi adalah Piramida dan sphinx yang berada di Kairo. Selain itu, juga bisa menikmati pemandangan dan keindahan dengan melakukan wisata kapal pesiar di Sungai Nil, dan juga menikmati makan malam yang halal di atas kapal pesiar tersebut.

7. TURKI

Salah satu negara paling banyak direkomendasikan dan sangat populer sebagai tujuan wisata halal terbaik di dunia adalah Turki.

Turki menjadi tujuan wisata halal populer bagi wisatawan Muslim dunia. Negara ini telah membuka beberapa resor halal baru, sejak pengunjung wisata halal ke Turki meningkat 450 persen selama 5 tahun terakhir.

Beberapa hotel di Turki menawarkan area kolam renang khusus Perempuan. Dimana ada kebijakan larangan berfoto, sehingga perempuan dapat berjemur tanpa khawatir pria melihatnya dalam pakaian renang.

Selain itu, menikmati suasana kota Istanbul yang indah selalu menjadi salah satu pilihan favorit. Lalu juga ada Masjid Sultan Ahmed dan Museum Seni Islam, serta juga Anatolia dan Cappadocia.

Istanbul juga memiliki kuliner yang berkembang pesat, dengan banyaknya restoran halal tersebar di seluruh kota. Begitu pula dengan hotel, seperti Sura Hagia Sophia atau Hotel Grand Cevahir, menawarkan kamar bebas alkohol, dan spa serta klub kesehatan yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.

8. MALAYSIA

Malaysia juga menjadi salah satu negara rujukan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia. Negara ini cukup diminati wisatawan Indonesia dan Asia tenggara, selain memiliki rumpun budaya yang masih sama, bahasa melayu juga cukup mudah dimengerti untuk turis Indonesia.

Malaysia juga menjadi negara destinasi wisata halal favorit bagi perempuan Muslim. Berbagai lokasi di Malaysia menyediakan fasilitas shalat untuk perempuan dan kolam renang, spa, dan salon.

Di ibukota Kuala Lumpur, ada Masjid yang populer, yakni Masjid Putra dan Masjid





Mesir



Uni Emirat Arab



Bahrain

Nasional Malaysia. Llau juga Museum Seni Islam, yang menjadi rumah bagi lebih dari 7.000 artefak Islam.

Langkawi adalah salah satu tujuan bulan madu halal paling populer di negara ini. Pemandangan hutan hujan dan juga air jernih sangat cocok untuk wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam.

Anantara Desaru Coast Resort and Villas yang baru dibuka merupakan tempat yang bagus untuk menginap. Selain pemandangannya yang menghadap ke Laut Cina Selatan, resor ini memastikan privasi, dan santapan halal, tanpa menu babi atau lemak babi. Selain juga memiliki fasilitas shalat, tanda kiblat dan sajadah di setiap kamar.

9. UNI EMIRAT ARAB (UEA)

Negara Muslim yang satu ini memiliki tingkat ekonomi yang paling kuat dan kaya di Timur Tengah, tentu saja negara ini menjadi salah satu tempat wisata halal dunia yang wajib dikunjungi.

Negara ini juga banyak memiliki fasilitas pariwisata yang hampir semua fasilitas terlengkapi dari hotel, mall, hingga aneka objek wisata lainnya.

Namun tempat yang sangat populer di negara ini adalah tempat wisata di Abu Dhabi atau Dubai, yang terkenal hingga seluruh dunia.

Di UEA, makanan halal ditemukan di mana-mana dan para wisatawan sangat mudah menemukan Masjid. Di Abu Dhabi, ada Masjid Agung Sheikh Zayed yang merupakan salah satu destinasi wisata halal yang paling banyak dikunjungi.

Di Ras Al Khaimah, Marjan Island Resort & Spa di kepulauan buatan pertama emirat ini adalah tempat peristirahatan tepi pantai yang populer bagi wisatawan Muslim, dengan kebijakan larangan alkoholnya.

Beberapa hotel di negara ini juga menawarkan lantai khusus perempuan. Di Sofitel Dubai Downtown mengubah lantai 15 menjadi zona khusus perempuan. Pintu kaca dan kunci akses pribadi memastikan privasi. Taksi khusus perempuan juga tersedia untuk berkeliling dan ada gerbong khusus perempuan dan anak-anak di metro Dubai.

10. BAHRAIN

Yang tak kalah indahnya berwisata halal di wilayah Timur Tengah, adalah melakukan wisata di Bahrain. Bahrain merupakan sebuah negara pulau yang berada di dekat pesisir barat Teluk Persia Timur Tengah.

Meskipun wilayah negara ini kecil, tetap saja ada beberapa wisata halal yang tidak boleh dilewati di sini, seperti Bahrain Fort, Masjid Raya Al-Fateh, dan Bahrain National Museum. ♦

KEMENAG GELAR PEMANTAUAN HILAL AWAL RAMADAN 1445 H

Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1445 Hijriah, Kementerian Agama (Kemenag) menggelar pemantauan hilal (rukyatulhilal) awal Ramadhan pada 10 Maret 2024 yang bertepatan dengan 29 Sya'ban 1445 H.

Pemantauan hilal awal bulan Ramadhan 1445 H ini diselenggarakan di 134 titik di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami memutuskan akan menggelar rukyatulhilal di 134 lokasi di seluruh wilayah Indonesia," kata Direktur Urusan Agama

Sidang Isbat penentuan awal bulan suci Ramadhan 1445 H, dilakukan dengan mempertimbangkan informasi awal, berdasarkan hasil perhitungan secara astronomis atau hisab, serta hasil konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan hilal.

Secara hisab, menurut Adib, semua sis-

Berikut Daftar 134 Titik Lokasi Rukyatul Hilal Awal Bulan Suci Ramadhan 1445 H/2024 M:

ACEH

1. Obs. Tgk Chik Kuta Karang
2. Tugu 0 Km Kota Sabang



Islam dan Pembinaan Syariah (Urais dan Binsyar) Kemenag, Adib, pada Rapat Persiapan Penetapan Awal Ramadhan di Jakarta, Senin (19/2/2024).

Adib menambahkan, rukyatulhilal dilaksanakan Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten/Kota, yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama, Ormas Islam, serta instansi lain di daerah setempat.

tem sepakat bahwa ijtimaik menjelang Ramadhan jatuh pada Minggu, 10 Maret 2024 M, yang bertepatan 29 Sya'ban 1445 H.

"Pada hari rukyat, 29 Sya'ban 1445 H, tinggi hilal pada saat Matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia berkisar antara -0°20' 1,2" sampai 0°52' 5,4" dengan sudut elongasi antara 2°14' 46,8" sampai 2°41' 50,4"," tambah Adib menjelaskan.

3. Bukit Blang Tiron Lhokseumawe
4. Pantai Lhok Geulumpang
5. POB Suak Geudeubang
6. Pantai Nancala Teupah Barat Simeulue

SUMATERA UTARA

7. Anjungan Lantai IX Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro No. 30 Medan.

8. Observatorium Ilmu Falak (OIF) Gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Jalan Panglima Denai Medan

SUMATERA BARAT

9. Gedung Kebudayaan Sumatera Barat
10. Puncak Langkisau Carocok Painan Kabupaten Pesisir Selatan
11. Dusun Kayu Gadang Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto
12. Bukit Langkuik Kecamatan Bonjol
13. Puncak Gunung Medan
14. Lantai 3 Gedung DPRD Kab. Pasaman Barat di Padang Tujuh
15. Puncak Dama Kel.Kampung Jawa Kota Solok
16. Taeh Bukik
17. Bukik Ampangan
18. Kubu Jawi
19. BPTU Padang Mengatas Nagari Mungo
20. Pantai Gandoriah Kota Pariaman
21. Kantor Kemenag Kab Solok Selatan
22. Jorong Sikaladi Nagari Pariangan
23. Kampus UIN Mahmud Yunus Batu-sangkar di Cubadak
24. Bukit Sipora Jaya
25. Balkon, Rocy Hotel Bukittinggi
26. Puncak Lawang Kec. Matur Kab. Agam
27. Sitinjau Laut, Jalan Raya Solok - Padang
28. Pantai Tiram Kec. Ulakan Tapakis
29. Puncak Nganang Kecamatan Luhak

RIAU

30. Pantai Rupat Utara, Kab. Bengkalis

KEPULAUAN RIAU

31. Pantai Tanjung Setumu

JAMBI

32. Rooftop Mts. N 2 Model Kota Jambi, Jambi

SUMATERA SELATAN

33. Hotel The Aryaduta Palembang

BANGKA BELITUNG

34. Pantai Tanjung Raya Penagan Bangka
35. Pantai Tanjung Kalian Muntok Bangka Barat
36. Pantai Tanjung Pendam Belitung

BENGKULU

37. Mess Pemda lantai 3 (tiga) Provinsi Bengkulu. Jalan Pasar Pantai Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu

LAMPUNG

38. POB Bukit Gelumpai Pantai Canti Kalianda Lampung Selatan
39. Kampus ITERA, Jati Agung, Lampung Selatan

40. Pantai Labuhan Jukung, Krui, Pesisir Barat

DKI JAKARTA

41. Gedung Kanwil Agama DKI Jakarta
42. Masjid Hasim Asyari Jakarta Barat
43. Ponpes Hidayatullah Basmol Jakarta Barat
44. Pulau Pramuka Kepulauan Seribu

JAWA BARAT

45. Pantai Pasirlasih, Kab. Pangandaran
46. Pantai Cipatujah, Kab. Tasikmalaya
47. Pantai Pondok Bali, Kab. Subang
48. Imah Noong, Kab. Bandung Barat
49. Albiruni (UNISBA)
50. Pantai Baro Gebang, Kab. Cirebon
51. POB Cibeas, Kab. Sukabumi
52. Bosscha Lembang, Kab. Bandung Barat
53. Tower Observatory Hilal Manalusu Cikelet, Kab. Garut
54. POB Gunung Putri Sukamanah, Kota Banjar
55. SMA Astha Hannas, Kab. Subang

BANTEN



56. Pantai Anyer
57. UIN SMHB Serang
58. Komplek Mercusuar Cikoneng, Anyer

JAWA TENGAH

59. Planetarium dan Observatorium UIN Walisongo Semarang
60. BOP Watu Layar Binangun, Kec. Lasem
61. Pantai Jetis, Kec. Grabag
62. Pantai Ujungnegoro, Kandeman
63. Pantai Padelan, Kec. Ayah
64. Rooftop Hotel Aston Cilacap
65. pantai Kartini, Kec. Jepara
66. Menara Masjid Agung Nurul Kalam
67. Pantai Alam Indah
68. Ma'had Aly TBS Kudus
69. Pelabuhan Tanjung Kendal
70. Bukit Sukobubuk, Kec. Margorejo

71. Menara Pandang, Purwokerto Barat
72. Pantai Wisata Dewi Mangrove Sari
73. POB PPMI Assalaam Pabelan, Kec. Kartasura
74. UIN KH. Abdurrahman Wahid

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

75. POB Syekh Bela Belu Parangtritis Yogyakarta
76. Markaz JAC Depok Sleman
77. Bukit Brambang Patuk Gunungkidul
78. Lantai 3 Bandara YIA

JAWA TIMUR

79. Masjid Al Hikmah Puger
80. Pantai Srau Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan
81. POB Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang
82. Pantai Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang
83. Pantai Gebang Bangkalan
84. Pelabuhan Taddan Sampang
85. Pantai Pancor
86. Pantai Plengkung
87. Gumuk Klasi Pondok Pesantren Bayt

Al-Hikmah Pasuruan, Alamat: Krampyangan

88. Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67127
89. Lantai 3 Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso
90. MAN. 3 Kediri Kandangan Kediri
91. Bukit Gandrung Tanggulasi Medowo Kandangan
92. Bukit Banjarsari Wonotirto Kab. Blitar
93. Observatorium Jokotole IAIN Madura (Pamekasan)
94. Gunung Sekekep Pulung
95. Ibnu Syatir PP Al-Islam Joresan
96. Watoe Dhakon Observatory Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
97. Observatorium Darul Huda Mayak Ponorogo

98. Lereng Gunung Pandan Ds. Tulung Kec. Saradan Kab. Madiun
99. Ds. Dagangan Kec. Dagangan Kab. Madiun
100. Pantai Tanjung Kodok Lamongan
101. Bukit Wonocolo Kecamatan Kedewan Kab. Bojonegoro
102. Bukit Condro Dipo Kebomas Gresik
103. Pelataran Command Center Lt 9 Kominfo Gedung Pemkab Malang.
104. Pantai Taneros Kec. Ambunten Kab. Sumenep
105. Menara Rukyatul Hilal Desa Banyurip Kec. Senori Kab. Tuban

KALIMANTAN BARAT

106. Pantai Indah Kakap Kabupaten Kubu Raya

KALIMANTAN TENGAH

107. Menara Masjid Raya Darussalam



- Palangkaraya
108. Lantai atas Aquarius Boutique Hotel
 109. Pantai Teluk Bogam Kabupaten Kotawaringin Barat
 110. Pelabuhan Segintung Kab. Seruyan

KALIMANTAN TIMUR

111. Puncak/Lantai Atas Hotel Plaza Mulia

KALIMANTAN SELATAN

112. Zury Expres Hotel, Banjarmasin

KALIMANTAN UTARA

113. Taman Berlabuh Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara

BALI

114. Pantai Patra Jasa Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung

NTB

115. Pantai Loang Baloq Ampenan Mataram

NTT

116. Rooftop Gedung Pelayanan Bmkg NTT

SULAWESI SELATAN

117. Rooftop Mall GTC Makassar
118. Appabatu Desa Parak, Kec. Bontomanai

SULAWESI BARAT

119. Tanjung Mercusuar Sumare, Simboro Kabupaten Mamuju

SULAWESI TENGGARA

120. Pantai Bahari Kecamatan Tanggetada

SULAWESI UTARA

121. Area Parkir Apartemen MTC Mega Mas

Manado

GORONTALO

122. Pantai Desa Botu Barani, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, Gorontalo

SULAWESI TENGAH

123. Desa Marana Kec. Sindue, Kab. Donggala
124. Desa Lamo, Kec. Pagimana

MALUKU

125. Karang Panjang, Kota Ambon
126. Desa Latulahat, Kota Ambon
127. Desa Wakasihu, Maluku Tengah
128. Hotel Tirta Kencana Jl. Raya Amahusu No.1, Kota Ambon

MALUKU UTARA

129. Pantai Ropu Tengah Balu, Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat
130. Pantai Afe Taduma, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate

PAPUA

131. Pantai Lampu Satu Merauke

PAPUA BARAT

132. Kab. Manokwari, Pantai Masni SP 7
133. Kota Sorong, Hotel Waigo, Jl.Yos Sudarso
134. Kabupaten Fakfak, Kampus STAI Al Mahdi Jalan Sam Ratulangi.*

• Sidang Isbat Digelar 10 Maret 2024

Sidang Isbat penentuan awal bulan suci Ramadhan 1445 H digelar di Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama (Kemnag), Jalan. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kamaruddin Amin mengatakan, bahwa kegiatan ini digelar secara hybrid, daring dan luring.

"Sidang Isbat ini merupakan salah satu layanan keagamaan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah," kata Dirjen pada Rapat Persiapan Penetapan Awal Bulan Suci Ramadhan di Jakarta, Senin (19/2/2024).

Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Kemenag, Adib menambahkan, bahwa Sidang Isbat ini melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam.

Sidang Isbat ini juga melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan undangan lainnya.

"Kami juga mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi VIII DPR RI untuk hadir dalam sidang," tambah Adib.

Adib menjelaskan, Sidang Isbat dibagi menjadi tiga tahap. Yang Pertama, pemaparan posisi hilal awal Ramadhan 1445 H berdasarkan hasil hisab (perhitungan astronomi). Pemaparan dilakukan oleh Tim Hisab dan Rukyat Kemenag yang dimulai pukul 17.00 WIB.

"Sesi ini terbuka untuk umum dan akan disiarkan secara live di Channel Youtube Bimas Islam," jelas Adib.

Yang Kedua, Sidang Isbat Penetapan Awal bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah yang digelar secara tertutup dilaksanakan setelah Sholat Magrib. Selain data hisab (informasi), sidang isbat juga merujuk pada hasil rukyatulhilal (konfirmasi) yang dilaku-

kan oleh Tim Kemenag pada 134 lokasi di seluruh Indonesia.

Sementara untuk tahap yang ketiga, konferensi pers hasil sidang isbat, yang disiarkan melalui media sosial Kemenag.

INI DAFTAR 170 LEMBAGA AMIL ZAKAT RESMI YANG MILIKI IZIN KEMENAG

Kementerian Agama (Kemenag) merilis daftar Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mengantongi izin operasional. Daftar nama LAZ tersebut telah dirilis untuk menjadi perhatian Masyarakat, sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat di tingkat Nasional, Provinsi, serta kabupaten/kota.

Sampai dengan Februari 2024, terdapat 170 LAZ yang telah berizin, yang terbagi dalam tiga kategori. Pertama, berjumlah 45 LAZ yang berizin sebagai LAZ skala Nasional, yang memiliki cakupan dan pengaruh yang luas di seluruh wilayah Indonesia.

Kedua, berjumlah 39 LAZ yang berizin skala Provinsi, yang berfokus pada pelayanan di tingkat Provinsi untuk memastikan zakat tersalurkan dengan tepat dan efisien. Dan ketiga, berjumlah 86 LAZ yang berizin sebagai LAZ skala Kabupaten/Kota, yang memberikan layanan zakat yang lebih terfokus dan dekat dengan masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghafur, meminta lembaga pengelola zakat yang belum berizin, untuk segera melakukan proses perizinan yang sesuai prosedur.

"Kami harapkan dari data per Februari 2024, masih banyak lembaga Amil Zakat yang masih dalam tahap proses perizinan. Data akan kami update terus," kata Waryono Abdul Ghafur di Jakarta, Senin (19/2/2024).

"Lembaga pengelola zakat yang tidak berizin sesuai Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011, wajib menghentikan segala aktivitas pengelolaan zakat. Pasal 38 menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang," tambah Waryono.

Waryono mengimbau kepada masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah kepada Lembaga pengelola zakat yang telah dibentuk pemerintah dan masyarakat, serta mendapat izin operasional sesuai ketentuan regulasi.

Berikut Daftar 170 Lembaga Amil Zakat yang Telah Memiliki Izin Kementerian Agama:

A. 45 Lembaga Amil Zakat Skala Nasional:

1. LAZ Rumah Zakat Indonesia
2. LAZ Daarut Tauhid Peduli
3. LAZ Perkumpulan Persatuan Islam (PER-SIS)
4. LAZ Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia
5. LAZ Panti Yatim Indonesia Al Fajr
6. LAZ Yayasan Rumah Amal
7. LAZ Yayasan Abul Yatama Indonesia
8. LAZ Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama
9. LAZ Muhammadiyah
10. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
11. LAZ BSI Maslahat
12. LAZ Wakaf Infaq dan Shodaqoh Pesantren
13. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia
14. LAZ Baitulmaal Muamalat
15. LAZ Yayasan Telaga Bijak Elzawa
16. LAZ BAITUL Maal Hidayatullah
17. LAZ Dompot Dhuafa Republika
18. LAZ Pesantren Islam Al Azhar
19. LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani

38. LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah
39. LAZ Dana Sosial Al Falah
40. LAZ Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia
41. LAZ Wahdah Islamiyah
42. LAZ Yayasan Hadji Kalla
43. LAZ Djalaludin Pane Foundation
44. LAZ Yayasan Sidogiri
45. LAZ Dewan Masjid Indonesia
- B. 39 Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi
1. LAZ Yayasan Al Bunyan Bogor, Jawa Barat
2. LAZ Fi Care, Jawa Barat
3. LAZ Yayasan Zakat Sukses, Jawa Barat
4. LAZ Yayasan Darul Hikam, Jawa Barat
5. LAZ Yayasan Al Hilal Rancapanggung, Jawa Barat
6. LAZ Rumah Harapan Pinus Indonesia, Jawa Barat
7. LAZ Gema Indonesia Sejahtera, Jawa Barat



20. LAZ Yayasan Mizan Amanah
21. LAZ Al Irsyad Al Islamiyah
22. LAZ Yayasan Mandiri Amal Insani
23. LAZ Yayasan Assalam Fil Alamin
24. LAZ Yayasan CT Arsa
25. LAZ LAZISKU KBPII
26. LAZ Yayasan Bakrie Amanah
27. LAZ AQL Pusat Peradaban Islam
28. LAZ Yayasan Salam Setara Amanah Nusantara
29. LAZ PPPA Darul Quran
30. LAZ Ruang Amal Indonesia
31. LAZ Majelis Pengkajian Al-Quran
32. LAZ Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa
33. LAZ Sahabat Yatim Indonesia
34. LAZ Yayasan Membangun Keluarga Utama
35. LAZ Nurul Hayat
36. LAZ Yatim Mandiri
37. LAZ LAGZIS Peduli

8. LAZ Semai Sinergi Umat (Sinergi Foundation), Jawa Barat
9. LAZ Yayasan Ukhuwah Care Indonesia, Jawa Barat
10. LAZ Yayasan Percikan Iman Sedekahku, Jawa Barat
11. LAZ Harapan Dhuafa, Banten
12. LAZ Yayasan Kreasi Bangun Semesta, Banten
13. LAZ Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa, Jakarta
14. LAZ Yayasan OPSEZI, Jambi
15. LAZ Yayasan Insan Madani, Jambi
16. LAZ Yayasan Nurul Falah, Jawa Timur
17. LAZ Yayasan Persyada Al Haromain, Jawa Timur
18. LAZ Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera, Jawa Timur
19. LAZ Mukmin Mandiri, Jawa Timur
20. LAZ Perkumpulan Persada, Jawa Timur

21. LAZ Yayasan Dompot Al Quran Indonesia, Jawa Timur
22. LAZ Yayasan Taman Zakat Indonesia, Jawa Timur
23. LAZ Yayasan Al Maunah Sunniyah Salafiyah Pasuruan Jawa Timur
24. LAZ Dompot Amanah Umat Sedati Sidoarjo, Jawa Timur
25. LAZ Ummul Quro Jombang, Jawa Timur
26. LAZ Solo Peduli Ummat, Jawa Tengah
27. LAZ Yayasan Al Ihsan, Jawa Tengah
28. LAZ Ziswaf Masjid Pelajar, Jawa Tengah
29. LAZ Yayasan Cendekia Maluku
30. LAZ Dompot Sosial Madani, Bali
31. LAZ Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas. Nusa Tenggara Barat
32. LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur
33. LAZ Yayasan Wakaf As'adiyah Wonomulyo, Sulawesi Barat
34. LAZ As Salaam, Papua
35. LAZ Yayasan Nurul Fikri, Kalimantan

- arga Sakinah Bojonegoro, Jawa Timur
7. LAZ Yayasan Amal Sosial As-Shohwah Malang, Jawa Timur
8. LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo, Jawa Timur
9. LAZ Yayasan Lembaga Pengembangan Infaq Mojokerto, Jawa Timur
10. LAZ Yayasan Majelis Amal Sholeh, Jawa Timur
11. LAZ As-Salam Timika, Papua
12. LAZ Yayasan Ulil Albab, Sumatera Utara
13. LAZ Perkumpulan Ar Risalah Charity, Sumatera Barat
14. LAZ Yayasan As-Salam, Maluku
15. LAZ DSNI Amanah, Kepulauan Riau
16. LAZ Batam, Kepulauan Riau
17. LAZ Yayasan Balqis Karya Indonesia, DI Yogyakarta
18. LAZ Yayasan Lazis Qu Lazis Quran, DI Yogyakarta
19. LAZ Yayasan Amal Syuhada, DI Yogyakarta

32. LAZ Yayasan Rydha, Banten
33. LAZ Ak Aqsha De Latinos, Banten
34. LAZ Uswah Hasanah Perwira, Banten
35. LAZ Warga Muslim Graha Raya, Banten
36. LAZ Yayasan Al Amanah Nusantara, Banten
37. LAZ Yayasan Dompot Yatim dan Masjid, Banten
38. LAZ Yayasan Mazjid Raya Bintaro Jaya, Banten
39. LAZ Yayasan Ar Raudhah Ihsan Foundation, DKI Jakarta
40. LAZ Yayasan Rumah Sosial Kutub, DKI Jakarta
41. LAZ Yayasan Muhajir Peduli, DKI Jakarta
42. LAZ Yayasan Inovasi Zakat Indonesia (Inovazi), DKI Jakarta
43. LAZ Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI), DKI Jakarta
44. LAZ Bakti Achmad Zaky Foundation, Jawa Barat
45. LAZ Yayasan Muslim Al-Kahfi Bekasi, Jawa Barat
46. LAZ Belajar Islam Bandung (Muslim Peduli), Jawa Barat
47. LAZ Yayasan Al Kasyaf Bakti Mulya, Jawa Barat
48. LAZ Yayasan Baitulmaalku, Jawa Barat
49. LAZ Yayasan Cahaya Qur'an Rabbani, Jawa Barat
50. LAZ Yayasan Nashirussunnah Permata (Yashiruna) Peduli, Jawa Barat
51. LAZ Yayasan Sahabat Kebaikan Umat, Jawa Barat
52. LAZ Yayasan Sakinah Berkah Mandiri, Jawa Barat
53. LAZ Yayasan Tasdiqul Qur'an Dompot Amal Pecinta Al Quran, Jawa Barat
54. LAZ Yayasan Ummul Quro Bogor, Jawa Barat
55. LAZ Gelora Insan Mandiri, Jawa Barat
56. LAZ Yayasan Yuk Peduli, Jawa Barat
57. LAZ Citra Ciraka, Jawa Barat
58. LAZ Yayasan Baitulmal Tazkia, Jawa Barat
59. LAZ Graha Duafa Indonesia, Jawa Barat
60. LAZ LIDZIKRI, Jawa Barat
61. LAZ Yayasan Assyfa Peduli Indonesia (Assyifa Peduli), Jawa Barat
62. LAZ Yayasan Musa'adatul Ummah, Jawa Barat
63. LAZ Zakatku Bakti Persada, Jawa Barat
64. LAZ Rumah Peduli Umat Bandung, Jawa Barat
65. LAZ Yayasan Nahwa Nur, Jawa Barat
66. LAZ Amal Madani Indonesia, Jawa Barat
67. LAZ Indonesia Berbagi, Jawa Barat
68. LAZ Yayasan LAZ Cilacap, Jawa Tengah
69. LAZ Yayasan Dompot Sejuta Harapan, Jawa Tengah
70. LAZ Yayasan Albi Menebar Manfaat (Al Abidin), Jawa Tengah



- Tengah
36. LAZ Yayasan Ikhlas Peduli Umat, Sulawesi Selatan
 37. LAZ Yayasan Peduli Dakwah, Sulawesi Selatan
 38. LAZ Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, Sulawesi Tenggara
 39. LAZIS UNISIA, DI Yogyakarta
 - C. 85 Lembaga Amil Zakat Skala Kabupaten/Kota
 1. LAZ Yayasan Rumah Itqon Zakat dan Infak, Jawa Timur
 2. LAZ Yayasan Rahmatul Anwar Surabaya, Jawa Timur
 3. LAZ Al Madina Surabaya, Jawa Timur
 4. LAZ Yayasan Khoiru Ummah Sawojajar, Jawa Timur
 5. LAZ Perkumpulan Lembaga Amil Zakat Saku Yatim Indonesia, Jawa Timur
 6. LAZ Yayasan Lembaga Amil Zakat Kelu-

20. LAZ Agen Sedekah Kulonprogo, DI Yogyakarta
21. LAZ Baitul Maal Timoho Sejahtera, DI Yogyakarta
22. LAZ Yayasan Pendidikan Dakwah Sosial Al Khairaat, DI Yogyakarta
23. LAZ Yayasan Al Muthi'in, DI Yogyakarta
24. LAZ Yayasan Lumbung Zakat. DI Yogyakarta
25. LAZ Yayasan Pundi Surga, DI Yogyakarta
26. LAZ Yayasan Sinergi Membangun Ummat, Kalimantan Timur
27. LAZ Yayasan Baitul Maal Barakatul Ummah, Kalimantan Timur
28. LAZ Yayasan Zakat Kita Bersama, Kalimantan Timur
29. LAZ Yayasan Ibadurahman, Riau
30. LAZ Bina Insan Madani Dumai, Riau
31. LAZ Yayasan Swadaya Ummah, Riau

71. LAZ Tazakka, Jawa Tengah
72. LAZ Semyum Dhuafa, Jawa Tengah
73. LAZ Yayasan Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang, Jawa Tengah
74. LAZ Yayasan Gerak Sedekah Cilacap, Jawa Tengah
75. LAZ Yayasan Mansyaul Fadili, Jawa Tengah
76. LAZ Jabalnur Pati, Jawa Tengah
77. LAZ Yayasan Layanan Amal Zakat Insan Indonesia Baiturrahman, Jawa Tengah
78. LAZ Majelis Surakarta (Majelis Pengajian Islam), Jawa Tengah
79. LAZ Al Huda Kebumen, Jawa Tengah
80. LAZ Sultan Agung, Jawa Tengah

Bicara (Jubir) Kementerian Agama (Kemenag), Anna Hasbie, terkait progress pelunasan biaya ibadah haji tahun ini yang telah mencapai 94,03 %.

"Pelunasan Bipih jamaah haji reguler tahap I ditutup sore ini. Total sudah ada 200.601 jamaah yang melunasi biaya haji," kata Jubir Kemenag, Anna Hasbie di Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Kuota haji Indonesia tahun ini sebanyak 221.000 jamaah. Tapi Indonesia kemudian mendapat tambahan kuota sebesar 20.000, sehingga jumlahnya menjadi 241.000 jamaah. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus.

5. Sumatera Utara (Sumut) sebanyak 6.352 jamaah.

Berikut 5 Provinsi dengan Jamaah Terbanyak yang Belum Lunasi Biaya Haji:

1. Jawa Barat (Jabar) sebanyak 5.636 jamaah,
2. Jawa Timur (Jatim) sebanyak 5.613 jamaah,
3. Jawa Tengah (Jateng) sebanyak 3.468 jamaah,
4. DKI Jakarta sebanyak 1.780 jamaah dan
5. Sumatera Utara (Sumut) sebanyak 1.463 jamaah.

"Masih terdapat sisa kuota, sehingga dibuka pelunasan tahap II pada 13 - 26 Maret



81. LAZ Yayasan Sosial Al Irsyad, Jawa Tengah
82. LAZ Yayasan Kesejahteraan Umat Persada Indonesia, Jawa Tengah
83. LAZ Yayasan Sahabat Asnaf Indonesia, Jawa Tengah
84. LAZ DAI Lampung
85. LAZ Yayasan Bangun Negeri Kita, Lampung
86. LAZ Yayasan Sembada Mulia Sejahtera, Yogyakarta.

200.601 JAMAAH HAJI TELAH LUNASI BIAYA HAJI 1445 H/2024 M

Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) jamaah haji reguler tahun 1445 H/2024 M tahap I telah ditutup pada 23 Februari 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Jubir

Jumlah jamaah haji reguler yang sudah melunasi, terdiri dari: 161.567 orang yang memang berhak lunas biaya haji tahun ini, 4.500 jamaah yang masuk kuota lanjut usia prioritas, 238 petugas haji daerah (PHD), dan 1 pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah.

"Selain itu, ada 34.295 jamaah yang sudah melunasi dengan status cadangan," tambah Anna Hasbie.

Inilah 5 Provinsi dengan Jamaah Terbanyak yang Telah Lunas Biaya Haji:

1. Jawa Barat (Jabar) sebanyak 30.689 jamaah
2. Jawa Timur (Jatim) sebanyak 27.418 jamaah,
3. Jawa Tengah (Jateng) sebanyak 25.042 jamaah,
4. Banten sebanyak 7.591 jamaah, dan

2024," ungkap Anna Hasbie.

Menurut Anna Hasbie, pelunasan tahap II ini akan diperuntukkan bagi 4 kategori, yaitu: 1) Jamaah yang belum melakukan pelunasan biaya haji pada tahap I karena mengalami gagal sistem;

2) Pendamping jamaah haji lanjut usia; 3) Jamaah haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua yang terpisah; 4) pendamping jamaah haji penyandang disabilitas.

"Input data usulan jamaah yang akan melunasi pada tahap II oleh Petugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota masih terus berlangsung. Batas akhir input data pengajuan pendampingan lansia, penggabungan mahram, dan pendamping penyandang disabilitas akan berakhir pada 7 Maret 2024," pungkas Anna. ♦

Tingkatkan Ekspor Produk UMKM PEMERINTAH GRATISKAN ONGKOS KIRIM KE AUSTRALIA

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Atase Perdagangan RI di Canberra, Australia, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta meluncurkan program Gratis Ongkos Kirim (ongkir) ke seluruh dunia di Yogyakarta.

Peluncuran yang dilaksanakan secara hibrida ini, dilaksanakan pasca-Rapat Kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Semarang, Jawa Tengah sehari sebelumnya.

Atase Perdagangan RI di Canberra, Agung Haris Setiawan menyampaikan, program ini merupakan kerja sama lanjutan antara Kementerian Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY, yang sebelumnya dilakukan pada 2023.

Kerja sama tersebut berhasil dioptimalkan oleh para pelajar Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia dan PPI Selandia Baru, untuk mulai melakukan ekspor.

"Program ini diharapkan menjadi sarana peningkatan ekspor produk UKM ke luar negeri yang dimulai dari Australia. Kami sangat mengapresiasi Dinas Koperasi dan UKM DIY atas diresmikannya program gratis ongkir pada hari ini. Kami yakin, ini akan menjadi salah satu tonggak percepatan

ekspor bagi para pelaku UKM potensial di Indonesia. Kami bersama jajaran Kementerian Perdagangan berkomitmen mendukung pemerintah daerah lain untuk dapat melakukan hal serupa," kata Agung Haris Setiawan, di Semarang, Jawa Tengah, seperti dilansir dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kamis (22/2/2024).

Peresmian program ini, merupakan salah satu bentuk keberpihakan Kementerian Perdagangan terhadap ekspor produk UKM melalui perwakilan perdagangan di luar negeri. Untuk memperluas manfaat dari program ini, akan dilakukan sinergi bersama PPI Dunia dan para diaspora Indonesia di seluruh dunia.

"Target pasar sampel produk yang dikirim dalam program ini adalah diaspora Indonesia yang berada di Australia, toko-toko Asia yang memiliki target pasar dengan karakter yang sama dengan pasar Indonesia, hingga masyarakat umum yang ingin mengetahui produk Indonesia di luar neg-



eri,” tambah Agung Haris.

Haris juga menambahkan, promosi produk UKM melalui program ini, akan langsung dilakukan pada 26 Februari 2024 melalui Batik Show di KBRI Canberra, yang mengundang perwakilan kedutaan asing lain dan masyarakat Australia. Selain itu, ke depan juga akan ada beberapa kegiatan lain yang bekerja sama dengan diaspora Indonesia dan loka pasar di Australia.

Hadir pula dalam peluncuran tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi. Srie menyampaikan, bahwa potensi UKM di wilayah DIY yang berjumlah lebih dari 460 ribu dapat menjadi pionir pertumbuhan kontribusi ekspor UKM Nasional yang perlu ditingkatkan.

Menurut Srie, program ini merupakan dukungan Dana Keistimewaan DIY dengan tujuan mendorong produk Yogyakarta untuk berkompetisi, tidak hanya di tingkat lokal dan Nasional, namun juga di pasar dunia.

Srie juga menyampaikan, produk yang dapat dikirimkan dalam program ini merupakan produk atau perusahaan asal DIY yang tergabung dalam platform Sibakul, yang nilai produknya harus lebih tinggi dari biaya kirim. Hal tersebut bertujuan, agar ekspor yang dilakukan adalah ekspor produk UKM dengan nilai tambah yang tinggi.

“Selanjutnya, tahun ini juga akan ada tambahan perwakilan perdagangan dari Mesir dan Arab Saudi yang bergabung untuk mempromosikan produk UKM ekspor dari DIY,” pungkask Srie Nurkyatsiwi.

Kemendag Lepas Ekspor Perdana Kosmetik Asal Sidoarjo ke Malaysia

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Didi Sumedi, melepas ekspor perdana produk kosmetik produksi PT Wahana Kosmetika Indonesia (PTWKI) asal Sidoarjo dengan merk Azarine ke Malaysia dengan nilai sebesar 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau setara Rp 23,25 Miliar. Pelepasan ekspor kosmetik Azarine berlangsung di Pergudangan Gedangan Permai Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (8/1/2024).

Pelepasan ekspor Kosmetik Azarine ini juga dihadiri pemilik PT WKI, Yuniati Sastera Kusuma; lalu juga para pemangku kepentingan (stakeholder), baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, serta asosiasi bisnis.

Didi menjelaskan, bahwa kegiatan ekspor kosmetik ini dapat mendukung perekonomian Nasional dan meningkatkan ekspor Indonesia ke negara mitra dagang.

“Pelepasan ekspor produk kosmetik ini merupakan salah satu bentuk peran nyata

pelaku usaha dalam mendukung perekonomian Nasional melalui peningkatan ekspor Indonesia ke negara mitra dagang,” kata Didi Sumedi, di Sidoarjo, Jawa Timur, seperti dilansir dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Pelepasan ekspor kosmetik Azarine ini, menunjukkan, bahwa produk kosmetik Indonesia semakin mendapat tempat di pasar global. Azarine sudah cukup dikenal di tingkat Nasional dan sudah saatnya diuji coba ke pasar Internasional. Azarine juga telah menerapkan kaidah pembuatan kosmetik yang baik, serta sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ISO 9001:2015, dan sertifikasi halal.

Hal inilah yang mendorong keberhasilan produk kosmetik Azarine dalam menembus pasar ekspor dan memperoleh apresiasi dari

iar dan diproyeksikan meningkat sebesar 5,53 persen per tahun,” tambah Didi.

Didi juga menambahkan, bahwa peluang pasar kosmetik dunia masih sangat besar. Pendapatan (revenue) sektor kosmetik diproyeksikan mencapai USD 108,4 Miliar tahun 2024, serta diprediksi tumbuh sebesar rata-rata 4,43 persen per tahun pada periode 2024 - 2028.

Oleh karena itu, pelaku usaha kosmetik Indonesia, perlu memanfaatkan peluang pasar kosmetik dunia yang cukup prospektif untuk digarap. Kemendag melalui perwakilan dagang Indonesia di luar negeri, akan terus memberikan dukungan dan fasilitas bagi pelaku usaha kosmetik Indonesia untuk memasuki pasar ekspor di negara mitra.

Pada kesempatan yang sama, Didi



banyak pihak.

Didi juga menyampaikan, bahwa Kemendag terus mendorong pembukaan akses pasar ke negara mitra melalui fasilitasi pameran dagang internasional, misi dagang, peninjauan kesepakatan bisnis (business matching), maupun pemanfaatan perjanjian dagang melalui Free Trade Agreement (FTA), Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), dan Preferential Trade Agreement (PTA) sebagai jalan tol bagi ekspor Indonesia ke negara mitra dagang.

Dalam peningkatan daya saing produk ekspor, Kemendag juga memfasilitasi pelaku usaha kosmetik Indonesia melalui sertifikasi Good Manufacturing Practice (GMP) dan Halal. Didi mengungkapkan, industri kosmetik Indonesia sedang tumbuh.

“Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah pelaku usaha kosmetik Indonesia sebesar 11,4 persen tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, pendapatan sektor kosmetik Indonesia tahun 2024 diperkirakan mencapai USD 1,94 Mil-

menyampaikan arahan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, bahwa ekspor Indonesia diharapkan akan terus meningkat dikarenakan Kemendag akan semakin gencar mendukung upaya ekspor Nasional.

Sementara itu, pemilik PT WKI, Yuniati mengungkapkan, pelepasan ekspor perdana Azarine ke Malaysia, memberi bukti, bahwa karya anak negeri mampu bersaing dan diterima di pasar luar negeri. Pelepasan ekspor azarine ke Malaysia, juga menjadi titik permulaan bagi PT WKI untuk menjajaki pasar ekspor lainnya, seperti Filipina dan Vietnam, serta kawasan Timur Tengah, bahkan ke pasar yang lebih luas lagi.

“Saya berharap ekspor ke Malaysia ini, menjadi titik awal ekspor berikutnya, sehingga produk kami bisa dikenal di luar negeri dan menjadi produk kebanggaan Indonesia. Proyek ekspor kami pada Januari 2024 ini, tidak hanya ke Malaysia saja, namun akan dikembangkan untuk ekspor ke wilayah Asia Tenggara lain, seperti Brunei Darussalam, Vietnam; serta Timur Tengah,” pungkask Yuniati. ♦

ASN YANG PINDAH KE IKN MEMANG ORANG-ORANG ISTIMEWA

2500 pada Agustus, 12000 ASN hingga Akhir 2024

Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN sudah dipersiapkan matang menjadi tempat diselenggarakan Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Event ini menandai resminya Ibu Kota Negara Republik Indonesia (RI) pindah dari Jakarta ke IKN, Kalimantan Timur (Kaltim).

Karena itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemen-PANRB) sudah bersiap untuk memindahkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemen-PANRB telah menyusun skenario pemindahan ASN, yang terus didetailkan baik dari aspek kelembagaan, tata kelola, dan sumber daya manusia (SDM) aparaturnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, skenario pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian bagi ASN.

Sebagaimana arahan Presiden, bahwa strategi perpindahan menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata. Perpindahan ini juga merupakan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional menuju smart government.

Dalam penerapan smart government itu, yang diutamakan adalah sistem kerja fleksibili-

tas, kolaborasi, dan agile di IKN melalui dukungan digitalisasi sistem pemerintahan.

"Hari ini saya menghadap Pak Seskab untuk membicarakan bagaimana skenario baik jangka pendek, menengah dan panjang terkait pemindahan ASN di IKN," kata Men-PANRB, Jumat lalu usai bertemu Sekretaris Kabinet di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta.

Target awal yang dapat dicapai adalah pemindahan 2.500 ASN untuk persiapan pelaksanaan upacara memperingati kemerdekaan RI di IKN pada Agustus mendatang. Kemudian disusul dengan periode perpindahan pada November dan Desember 2024 yang totalnya mencapai 12.000 ASN.

SDM dengan Kompetensi Ciamik yang Terpilih

Menteri Abdullah Azwar Anas secara implisit mengemukakan bahwa tidak semua ASN yang berminat pindah ke IKN, ibu kota negara tercanggih di dunia, bisa dipindahkan.





Sebab ada sejumlah kriteria yang mesti dipenuhi oleh si ASN, baik secara individu maupun kelembagaan.

Dikatakan Menteri Azwar Anas, untuk pemindahan K/L ke IKN maka pemerintah telah melakukan pendefinisian peran strategis K/L. Langkah ini untuk mengidentifikasi seberapa penting peran K/L terhadap negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi.

Selain itu dilakukan identifikasi peran dan fungsi K/L sebagai sistem dukungan pengambilan keputusan (decision support system) dan sebagai strategic enabler dan/atau sistem pertahanan dan keamanan.

ASN yang pindah ditetapkan kriteria kompetensi di antaranya harus:

- * menguasai literasi (digital literacy)
- * multitasking
- * menguasai substansi mengenai prinsip IKN
- * mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Mengapa ditetapkan kriteria tersebut? Sebab IKN akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile.

"Karenanya perlu talenta-talenta yang adaptif, kolaboratif yang menguasai digitalisasi sehingga siap untuk mendorong akselerasi roda layanan pemerintahan di IKN,"

tandas Menteri.

Keren, Kloter Pertama Diberi Tunjangan Pioner

Menteri Azwar Anas menekankan, tidak hanya dituntut memenuhi sejumlah kriteria tertentu, ASN yang dipindah ke IKN juga diberi reward. Terutama ASN yang termasuk kloter awal, pemindahan Juli-Agustus 2024, yang telah diusulkan mendapat insentif berupa tunjangan pioner.

"Hal ini sebagai bentuk apresiasi bagi pegawai ASN, mengingat pada tahap awal pemindahan IKN belum tersedia dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok selengkap di Jakarta," katanya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, menyampaikan bahwa pihaknya akan membahas persiapan pemindahan ASN ke IKN pada pekan depan.

Persiapan pemindahan menurutnya perlu disiapkan secara matang, mengingat perpindahan tidak sekedar memindahkan secara fisik semata, melainkan juga perubahan pola kerja menuju smart government.

"Kita akan jadwalkan minggu depan, karena persiapan pemindahan IKN memang harus dipersiapkan secara baik. Mudah-mudahan pemindahan ASN, terutama yang dari Jakarta ke IKN, berjalan dengan baik dan lancar," harapnya. ♦





Pemerintah Rekrut 2.302.543 ASN, 22 Persennya Formasi Guru di Daerah DICARI GURU-GURU HEBAT LEWAT REKRUTMEN CPNS BERKUALITAS

Kabar gembira bagi para lulusan pendidikan guru yang pintar-pintar. Pemerintah akan melakukan peningkatan kualitas tenaga pendidik, baik dari jalur calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Untuk itulah Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) membuka kebijakan formasi khusus bagi pengadaan tenaga pendidikan dan kesehatan pada rekrutmen tahun 2024.

Dikemukakan Menteri PANRB Abdulah Azwar Anas, dari total kebutuhan ASN tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi ditetapkan sebanyak 22 persen yang dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.

"Dari total kebutuhan ASN nasional, untuk kebutuhan ASN di Pemda telah disiapkan 419.146 atau 22,45 persen untuk pemenuhan ASN guru di instansi daerah," ujar Menteri Anas pada pembukaan Rakor Pengadaan ASN Guru pada Instansi Daerah Tahun 2024 secara virtual, Senin lalu.

Kebutuhan instansi pusat terdiri dari

207.247 CPNS yang akan dibuka untuk lowongan dosen, guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Sedangkan 221.936 kebutuhan PPPK akan dibuka lowongan guru, tenaga Kesehatan, serta tenaga teknis.

Sementara untuk kebutuhan instansi daerah sebesar 483.575 CPNS untuk lowongan teknis, serta 1.383.758 kebutuhan PPPK untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Usulan formasi sedianya sudah ditutup pada akhir Januari lalu. Per saat ini, telah masuk usulan dari 478 instansi daerah untuk formasi guru. Sebanyak 169 instansi daerah mengusulkan 22.142 formasi guru CPNS. Sedangkan 155.151 usulan PPPK diajukan oleh 467 instansi daerah. Namun, pemerintah membuat kebijakan khusus untuk usulan formasi guru.

"Kami mengimbuah daerah-daerah, agar mengoptimalkan usulan formasi yang su-

dah disediakan oleh pemerintah,” tegas Men-PANRB.

Komitmen Pemenuhan Kebutuhan Guru

Kementerian PANRB telah berkomitmen dalam pemenuhan guru. Sejak tahun 2021, Kementerian PANRB menetapkan formasi guru lebih dari 50 persen dari formasi nasional.

Sebagai upaya pemenuhan satu juta guru yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian PANRB berhasil meningkatkan tingkat keterisian formasi Guru menjadi di atas 78 persen dari sebelumnya sekitar 58 persen.

Dari sisi lain, Menteri Anas juga berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang targetnya rampung pada akhir tahun ini.

“Penyelesaian tenaga non-ASN ini



Dengan afirmasi ini, harapannya Kemendikbudristek bisa mengoptimalkan usulan guru, bahkan kalau bisa hingga memenuhi target satu juta guru

kami dasarkan pada database yang ada di BKN,” tegas Menteri Anas.

Senada diungkapkan Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja. Ia menjelaskan, Kementerian PANRB membuka ruang lebih untuk usulan guru. Khusus instansi daerah di regional 2 masih bisa mengusulkan kebutuhan guru melalui e-formasi hingga 2 Maret 2024.

“Dengan afirmasi ini, harapannya Kemendikbudristek bisa mengoptimalkan usulan guru, bahkan kalau bisa hingga memenuhi target satu juta guru,” ujarnya.

Transformasi Manajemen Tenaga Pendidik di Indonesia

MEN-PANRB Abdullah Azwar Anas bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat lalu, melakukan konsolidasi. Mereka membahas isu-isu

strategis terkait manajemen SDM aparatur, khususnya tenaga guru dan dosen.

“Hari ini dengan Pak Nadiem membicarakan bagaimana pemenuhan ASN guru dan dosen. Kita juga bahas terkait karir guru dan dosen agar ke depannya jauh lebih menjanjikan, jelas, dan tidak rumit,” kata Menteri Azwar Anas.

Arah kebijakan untuk pemenuhan ASN tahun 2024 diprioritaskan salah satunya pada pemenuhan kebutuhan tenaga guru. Kementerian PANRB pun sudah menerima usulan formasi guru dari instansi daerah untuk pengadaan tahun ini.

Sebagai upaya pemenuhan 1 juta guru yang diusulkan oleh Kemendikbudristek selaku Instansi Pembina Guru, Kementerian PANRB telah menyusun beberapa

breakthrough kebijakan seleksi guru nasional.

“Breakthrough ini telah berhasil meningkatkan tingkat keterisian formasi guru menjadi di atas 78 persen dari yang sebelumnya ada di kisaran 58 persen,” katanya.

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menuturkan, pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan tata kelola guru dan dosen melalui peningkatan kompetensi, distribusi, kesejahteraan, hingga pengembangan karier guru.

“Seperti yang dikatakan Pak Menpan tadi kita ulik berbagai masukan-masukan untuk mengelola ASN kita terutama guru dan dosen di Indonesia, termasuk bagaimana agar karier dan kesejahteraan mereka terjamin,” kata Menteri Nadiem. ♦





Pemda Wajib Kelola Seluruh Barang Milik Daerah Secara Berkualitas

KEMENDAGRI GANDENG KPK DAN BPKP

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia masih jauh untuk dapat dikatakan baik atau berkualitas.

Karenanya mayoritas Pemda kesulitan memperoleh opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP).

Sudah terpantau pula oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, pengelolaan BMD bisa menjadi modul korupsi di Pemda. Karena itu Kemendagri mewajibkan Pemda mewujudkan tata kelola BMD yang berkualitas.

Untuk itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Direktorat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan BMD menggelar Rapat Asistensi Penatausahaan BMD, yang dibuka Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Yudia Ramli, Kamis (22/2/2024), di The Jayakarta SP Jakarta Hotel, Jakarta.

Yudia Ramli mengatakan, BMD merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dibutuhkan kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi secara menyeluruh dari unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan BMD.

"Lemahnya penatausahaan barang milik

daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah daerah sulit untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," tegas Yudia.

Guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menurutnya, Kemendagri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah.

Langkah ini dilakukan melalui kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP) pada 8 area intervensi yang salah satunya menyangkut pengelolaan BMD.

Pemda Sering Terjerat Masalah dengan BPK Negara BMD

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi pemerintah daerah (Pemda) dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI);

Pertama, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang tidak dibuat

oleh Pemda.

Kedua, pencatatan BMD tidak sesuai dengan kodifikasi BMD. Kemudian ada pula BMD yang tidak diketahui keberadaannya atau dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.

Ketiga, inventarisasi yang dilakukan Pemda belum sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD.

Keempat, Kartu Inventaris ruangan tidak diperbarui, barang rusak berat masih tercatat di Pemda dan tidak dilakukan penghapusan, serta tanah milik Pemda belum bersertifikat atas nama Pemda.

Kelima, Pemda belum menyampaikan laporan BMD semesteran dan tahunan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemda, dan Pemda perlu mengambil langkah strategis sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah tersebut,"



Lemahnya penatausahaan barang milik daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah daerah sulit untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

ujar Yudia.

Kemendagri melalui Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuda telah menyiapkan sistem aplikasi e-BMD yang nantinya terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.

Sistem ini sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, sehingga Pemda lebih mudah dan cepat dalam penatausahaan BMD.

Diserahkan, User Id dan Password

USAI memberikan sambutan sekaligus pengarahan, Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Yudia Ramli menyerahkan secara simbolis user id dan password sistem aplikasi e-BMD kepada 5 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain itu, para peserta yang hadir juga dibekali pemahaman terkait sistem aplikasi e-BMD oleh narasumber dari Lembaga Pe-



nelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP) Universitas Indonesia (UI).

Rapat Asistensi ini diikuti oleh Kepala Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD), serta Bidang Aset Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. ♦



MENTERI AGAMA RENCANAKAN KUA LAYANI SEMUA AGAMA BUKAN HANYA ISLAM

Kantor Urusan Agama (KUA) selain menjadi tempat pencatatan pernikahan bagi umat Muslim, juga direncanakan akan dijadikan tempat pencatatan pernikahan bagi umat non-Muslim.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, dalam Rapat Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam yang bertajuk "Transformasi Layanan dan Bimbingan Keagamaan Islam sebagai Fondasi Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan."

"Kita sudah sepakat sejak awal, bahwa KUA ini akan kita jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama," kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Jumat (23/2/2024).

"Sekarang ini, jika kita melihat saudara-saudari kita yang non-Muslim, mereka ini mencatat pernikahannya di pencatatan sipil. Padahal, itu harusnya menjadi urusan Kementerian Agama," tambah Menag

Yaqut.

Menag berharap, dengan mengembangkan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan agama selain Islam, data-data pernikahan dan perceraian bisa lebih terintegrasi dengan baik.

Selain itu, Menag juga berharap aula-aula yang ada di KUA, juga dapat digunakan sebagai tempat ibadah sementara bagi umat non-Muslim yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri karena faktor ekonomi, sosial, dan lain-lain.

"Saya juga berharap, aula-aula di KUA yang ada dapat dipersilahkan bagi saudara-saudari kita umat non-Muslim yang masih kesulitan untuk memiliki rumah ibadah sendiri, baik karena tidak adanya dana untuk mendirikan rumah ibadah atau karena sebab lain," tambah Menag.

"Bantu saudara-saudari kita yang non-Muslim untuk bisa melaksanakan ibadah

yang sebaik-baiknya. Tugas Muslim sebagai mayoritas yaitu memberikan perlindungan terhadap saudara-saudari yang minoritas, bukan sebaliknya,” pesan Menag.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Islam, Kamaruddin Amin, mengatakan bahwa pada 2024, pihaknya akan segera meluncurkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan lintas agama.

“Tahun ini pula, segera kami launching KUA sebagai pusat layanan keagamaan lintas fungsi dan lintas agama,” kata Kamaruddin.

Ia menambahkan, keluarga besar Ditjen Bimas Islam menjadikan KUA selaku UPT di bawah binaan Kemenag untuk menjadi tempat layanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun hanya terbentuk di 5.917 Kecamatan, namun akan melayani masyarakat yang tersebar di 7.277 Kecamatan.

Didukung Banyak Pihak

Menteri Agama (Menag) Yaquut Cholil Qoumas sangat optimistis, bahwa usulan akan menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pernikahan semua agama akan mendapat dukungan banyak pihak.

“Saya optimistis lah kalau untuk kebaikan seluruh warga bangsa, kebaikan seluruh umat beragama, mau merevisi undang-undang atau apa pun, orang pasti memberikan dukungan. Usulan ini kan untuk memberikan kemudahan bagi seluruh umat beragama,” kata Menag Yaquut, Senin (26/2/2024).

“Kementerian Agama itu kan kementerian semua agama, jadi KUA (diharapkan) juga dapat memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam,” tambah Menag.

Untuk menindaklanjuti ide tersebut, Menag Yaquut meminta jajarannya untuk menelaah cara merealisasikan usulannya tersebut.

“Ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di-follow up. Kemarin seluruh Dirjen, mulai Dirjen Bimas Islam dan seluruh Dirjen Bimas non-Islam semua sudah ketemu. Mereka sudah mulai bicara

bagaimana mekanismenya, regulasinya, semua dibicarakan,” jelas Menag.

Menag Yaquut juga memastikan akan melibatkan seluruh stakeholder dalam pengkajian usulannya tersebut, termasuk para tokoh agama.

“Pasti (melibatkan tokoh agama). Pasti kita melibatkan seluruh stakeholder,” tandasnya.

- Umat Hindu Sambut Baik

Rencana Menag Yaquut Cholil Qoumas untuk menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pernikahan semua agama disambut baik oleh umat Hindu.

“Umat Hindu seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Gus Men (Menag Yaquut - red). Umat mengapresiasi rencana ini, karena bisa dapat memberikan kemudahan,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu), I Nengah Duija, di Jakarta, Senin (26/2/2024).

Menurut I Nengah Duija, kemudahan akan dapat dirasakan oleh umat Hindu, khususnya terkait dengan pencatatan nikah.

“Kami (nantinya) menjadi sangat mudah dalam proses pencatatan perkawinan. Setelah upacara keagamaan, catatan pernikahan dilakukan di KUA, yang nanti terkoneksi dengan Dukcapil sehingga amat memudahkan,” tambah I Nengah Duija.

Atas hal tersebut, saat ini, pihaknya bersama Dirjen-dirjen Bimbingan Masyarakat lainnya juga sedang meng-

kaji berbagai peraturan terkait.

“Mudah-mudahan program ini cepat bisa direalisasikan dan dinikmati umat Hindu di Indonesia,” ungkaphnya.

Ketua MPR RI Apresiasi Kemenag

Dukungan senada juga datang dari Ketua MPR RI, Bambang Susatyo. Dalam keterangan tertulisnya, Bambang Susatyo, meminta Kemenag untuk mengoptimalkan rencana pengembangan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan semua agama tersebut, terutama dalam hal integrasi data-data pernikahan dan perceraian agar bisa dilakukan dengan lebih baik.

Ia juga mengapresiasi Kemenag yang mengupayakan kemudahan akses bagi seluruh umat beragama di Indonesia melalui keberadaan KUA.

“Semoga KUA dapat sepenuhnya sebagai pusat layanan keagamaan lintas agama,” ungkap Bambang.

Bambang juga minta Kemenag, untuk berkoordinasi dengan seluruh pemuka agama di Indonesia terkait rencana tersebut.

“Agar ke depannya bisa dilakukan penyesuaian fungsi KUA tanpa harus mengganggu ketentuan yang berlaku di masing-masing agama,” imbuh Bambang.

Dirjen Bimas Katolik: Tidak Kurangi Peran Gereja

Dirjen Bimas Katolik, Suparman, juga menyambut baik gagasan Menag Yaquut menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat memberikan layanan bagi semua agama.

“Tepat sekali Bapak Menteri Agama, menjadikan KUA tidak lagi untuk melayani umat Islam saja, tetapi menjadi pusat pelayanan semua agama. Jadi Ditjen Bimas Katolik dan umat Katolik hendaknya melihat momen ini sebagai kesempatan emas,” kata Suparman saat membuka Rapat Kerja Nasional Ditjen Bimas Katolik di Jakarta, Senin (26/2/2024).

Menurut Suparman, kehadiran KUA bagi umat Katolik, tak mengurangi peran gereja Katolik. KUA justru membantu umat Katolik untuk bisa melaksanakan kewajibannya dalam hal urusan pernikahan sesuai yang diamatkan oleh UU dan mekanisme yang berlaku.

“Jadi, sekali lagi saya sampaikan KUA tidak membatasi atau mengurangi peran gereja Katolik. KUA justru membantu umat Katolik,” tegas Suparman. ♦



AGAR KONFLIK PERTANAHAN SELESAI

Kemendagri Minta Pemda dan Seluruh Instansi Terkait Menyamakan Persepsi

Pemerintah Pusat terus berkomitmen menyelesaikan seluruh konflik pertanahan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu cara penyelesaian itu melalui kebijakan Reforma Agraria, yang merupakan langkah antisipasi dan mencegah konflik pertanahan.

Pemerintah Pusat terus berkomitmen menyelesaikan seluruh konflik pertanahan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu cara penyelesaian itu melalui kebijakan Reforma Agraria, yang merupakan langkah antisipasi dan mencegah konflik pertanahan.

Hal itu diungkapkan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Amran. Bahwa Pemerintah telah melakukan berbagai langkah dan tindakan untuk percepatan penyelesaian konflik-konflik tersebut.

Pemerintah, menurutnya, memiliki komitmen penuh dalam percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria melalui sinergitas serta sinkronisasi K/L dan pemerintah daerah, baik kebi-

jakan maupun implementasinya.

Penegasan itu disampaikan Amran saat membuka Rapat Diseminasi dan Asistensi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Daerah yang di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu lalu.

Kemendagri sendiri pada Oktober 2023 dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyepa-

kati Nota Kesepahaman (MoU) Nomor 5001.2.1/5646/SJ, Nomor 36/SKB-HK.03.01/X/2023 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

Bentuk tindak lanjut Nota Kesepa-



haman tersebut, Kemendagri telah melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mengoptimalkan pembinaan kepada pemerintah daerah (Pemda) khususnya bidang pertanahan. Hal ini berupa inisiasi dukungan data dan informasi kasus pertanahan dan penanganannya di daerah pada Oktober 2023.

"Dukungan basis data dan informasi kasus serta penanganannya oleh pemerintah daerah menjadi literasi untuk kegiatan penyusunan konsep perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut," ujarnya.

Dengan adanya dukungan data kasus pertanahan dan penanganan sengketa serta konflik pertanahan diharapkan dapat diperoleh beberapa informasi yang bermanfaat. Informasi itu seperti kasus, sengketa, dan konflik pertanahan di daerah secara holistik. Kemudian informasi persebaran sengketa dan konflik pertanahan dan penanganan di daerah, termasuk tingkat keberhasilan, dan evaluasinya.

Informasi yang diharapkan lainnya, yakni dapat mengetahui pola-pola terjadinya sengketa konflik serta pola penanganannya. Informasi ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan konsep Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Tak hanya itu. Berbagai data yang terhimpun tersebut diharapkan dapat menjadi benchmarking penanganan masalah pertanahan pada pola yang serupa di daerah lain.

Ditegaskan Amran, diseminasi dan asistensi kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah pertanahan tersebut harus dapat memudahkan Kemendagri, Pemda, dan semua pihak terkait dalam menyelesaikan berbagai macam masalah pertanahan.

SELURUH TANAH PEMDA HARUS SEGERA DISERTIFIKATKAN

Kemendagri Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Diseminasi dan Asistensi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik-konflik Pertanahan di Daerah, Rabu lalu.

Plh Dirjen Bina Adwil Kemendagri Amran mengatakan, rapat tersebut ditujukan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah dan konflik pertanahan yang terjadi di daerah dan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat.

Ditegaskan Amran, masalah atau konflik pertanahan ini tidak dapat dipisahkan

dengan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan penyebab terjadinya sengketa dan konflik pertanahan secara umum antara lain;

- * Pertama, persoalan administrasi pertanahan yang tidak terkelola dengan baik.
- * Kedua, ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah.

* Ketiga, legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat) tanpa memperhatikan produktivitas tanah.

* Keempat tidak optimalnya kebijakan satu peta khususnya sinkronisasi peta batas tanah dengan batas wilayah pemerintahan (desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan adat).

"Apabila ada barang milik daerah berupa tanah segera disertifikatkan jangan dibiarkan banyak yang hal serupa, mun-

mudah digugat oleh masyarakat

Selain memperkuat database, untuk menyelesaikan masalah pertanahan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, salah satunya dengan cara memperkuat koordinasi penyelesaian masalah tanah antara Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat kepada seluruh jajaran baik tingkat Bupati, Camat, dan Lurah.

Jika hal tersebut dilakukan, maka masyarakat tidak perlu lagi melaporkan masalah tanah ke Pemerintah Pusat.

"Ada laporan ke kami (Kemendagri) masyarakat tetangga membangun tembok di depan rumahnya itu cukup diselesaikan di tingkat Kelurahan, seperti inilah permasalahannya kalau di level kabupaten/kota koordinasinya diperkuat," kata Amran.

Dipaparkannya, Kemendagri menerima berbagai pengaduan kasus pertanahan dengan jumlah yang cukup besar setiap



cul masalah karena tadi mungkin kelalaian dalam hal administrasi," katanya.

SENGKETA TANAH TERBANYAK PTPN-HGU

Oleh Plh Dirjen Bina Adwil Kemendagri Amran dijelaskan bahwa semua konflik pertanahan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda) harus memperkuat dan menyempurnakan data serta informasi database sebagai modal dasar penanganan permasalahan tanah di daerah masing-masing.

Persoalan pertanahan perlu mendapatkan prioritas penanganan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemda. Hampir semua pengaduan masalah pertanahan sampai ke Kemendagri, karena data tidak lengkap kepemilikan tidak jelas dan

tahun.

Pada tahun 2021 sampai dengan 2023, kasus pertanahan yang dilaporkan Kemendagri mencapai 1494 kasus, dengan kasus terbanyak terjadi pada sengketa tanah garapan sebanyak 34 persen dan masalah subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah sebanyak 31 persen.

Data dari Kantor Staf Presiden (KSP), tahun 2015 sampai dengan Agustus 2022 menerima pengaduan sebanyak 1504 kasus yang didominasi kasus Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN) Hak Guna Usaha (HGU) sebanyak 271 kasus.

"Tingginya kasus pertanahan yang dilaporkan kepada K/L menuntut penanganan yang kolaboratif dan berkesinambungan melalui sinergitas pusat dan daerah," tandasnya. ♦

MENKES: UBAH PARADIGMA JADI PEMELIHARAAN KESEHATAN SECARA UMUM

Tidak Lagi Hanya Fokus pada Pengobatan Penyakit

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengajak seluruh masyarakat Indonesia menanamkan pentingnya pemahaman tentang program promosi kesehatan yang digalakkan Pemerintah saat ini.

Pemerintah melakukan upaya yang bertujuan mengubah paradigma masyarakat dari (fokus) mengobati penyakit menjadi pemeliharaan kesehatan secara umum. Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam menjaga kesehatan mereka sendiri, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara keseluruhan.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pentingnya pemahaman terhadap program promosi kesehatan di Indonesia ini dimulai dari para tenaga kesehatan, yang selanjutnya menyebar hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

Paradigma para tenaga kesehatan saat ini adalah fokus hanya pada pengobatan penyakit. Karena itu harus diubah, paradigmanya fokus tidak hanya pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada pemeliharaan kesehatan secara umum.

"Tugas orang kesehatan itu bukan hanya mengobati orang sakit, tetapi menjaga orang tetap sehat. Jadi, cara pandangnya harus membangun orang-orang

untuk tetap sehat dengan cara melakukan upaya promotif dan preventif kesehatan," tandas Menkes.

Pada Townhall Center for Indonesian Medical Students' Activities (CIMSA) Bersama Kementerian Kesehatan di Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Jumat lalu, Menkes menyebut Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

GERMAS yang dicanangkan dan digalakkan oleh Kemenkes RI ini bertujuan menanamkan budaya hidup sehat di masyarakat. Penerapan GERMAS dapat mengikuti kegiatan seperti acara Car Free Day yang sangat digemari oleh masyarakat.

Sebab, implementasi GERMAS bersifat gerakan dan bukan sekadar kemajuan sehingga sebaiknya menggunakan pendekatan yang inklusif dan bukan eksklusif. Untuk itu, promosi kesehatan diharapkan dapat dilakukan dengan memberdayakan semua individu yang memiliki keinginan untuk menjalani gaya hidup sehat.

"Artinya tidak ada programnya, gak ada



uangnya dan orang melakukannya karena keinginan sendiri, atau menyukainya agar hidupnya sehat,” tambahnya.

Dalam mendorong upaya promotif dan preventif, Kementerian Kesehatan telah mereformasi sektor kesehatan besar-besaran melalui perubahan UU Kesehatan dan Transformasi Kesehatan.

Selain itu, Kementerian Kesehatan membagi porsi anggaran secara seimbang antara upaya promotif-preventif dan kuratif, yaitu 50:50. Upaya ini juga tidak hanya berfokus pada rumah sakit, melainkan juga puskesmas dan posyandu yang salah satunya melakukan revitalisasi untuk perbaikan.

SEMUA KADER POSYANDU DITINGKATKAN KOMPETENSINYA

Mendorong upaya promotif preventif untuk menyehatkan masyarakat, Ke-

sasaran siklus hidup,” jelasnya.

Mulai tahun ini, 4 kader posyandu dari setiap dusun atau total 1,2 juta kader posyandu akan mendapatkan pendidikan ulang untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan khusus, seperti menimbang bayi dan balita dengan benar, melakukan edukasi ASI eksklusif dan MPASI, pemberian vaksinasi, hingga menerapkan komunikasi antarpribadi atau konseling.

“1,2 Juta kader akan dididik ulang dan akan masuk kepada sistem yang diawali dengan mengikuti tes lebih dulu, lalu setelah selesai akan mendapatkan sertifikat”, katanya.

Posyandu juga diharapkan dapat melakukan tindakan promotif dan preventif mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Skrining kesehatan pun dapat dilakukan di posyandu, seperti pengecekan tekanan darah

berbulu ini belum jelas.

Atas kabar yang sempat beredar di pekan ketiga Februari itu, Kemenkes RI menegaskan bahwa berita di media sosial tersebut HOAX atau Berita Bohong. Kemenkes pun memberikan penjelasan rinci sebagai berikut:

Ulat yang dimaksud dalam kabar HOAX tersebut merupakan Puss Caterpillar atau Ulat Kucing atau Ulat Asp yang banyak ditemukan di wilayah selatan Amerika Serikat. Ulat ini dapat tumbuh dengan panjang sekitar 1 inci dan ditutupi oleh bulu berwarna abu-abu dan oranye.

Ulat ini memiliki kelenjar racun yang terletak di dasar tubuh dan tersembunyi di antara bulunya yang lebat. Sengatan ulat ini dapat menimbulkan reaksi yang berbeda pada setiap orang. Sengatan ulat ini hanya berbahaya bagi orang yang menderita reaksi ekstrem terhadap gigitan



1,2 Juta kader akan dididik ulang dan akan masuk kepada sistem yang diawali dengan mengikuti tes lebih dulu, lalu setelah selesai akan mendapatkan sertifikat

menterian Kesehatan (Kemenkes) telah menyusun program yang jangkauannya jauh hingga ke dusun-dusun di berbagai pelosok Indonesia.

Menkes Budi mengungkapkan bahwa dari total 512 kabupaten/kota, terdapat sekitar 10.000 kecamatan, 85.000 kelurahan-desa, dan 300.000 dusun. Untuk itu, upaya mendekatkan akses layanan kesehatan akan diintensifkan hingga mencapai tingkat dusun.

Salah satu strategi yang diterapkan adalah meningkatkan kompetensi kader posyandu, sehingga mereka dapat memainkan peran kunci dalam penyediaan layanan kesehatan di tingkat masyarakat setempat.

“Semua kader posyandu akan diberikan kompetensi seperti halnya dokter agar posyandu tidak hanya mengurus atau memberi pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak saja, tetapi untuk seluruh



dan kadar gula darah untuk deteksi dini penyakit.

Kemenkes Tegaskan, Kabar Ulat Amerika Pembunuh Manusia HOAX

Sempat beredar kabar di media sosial bahwa telah terjadi serangan Ulat Amerika, yang sangat mematikan. Narasi dalam unggahan yang dishare sedemikian cepat oleh para pengguna media sosial di Indonesia itu tersebar luas.

Disebutkan bahwa ulat berbulu dapat menyebabkan kematian bagi korban yang terkena suntikan racunnya hanya dalam waktu 4 jam. Disebutkan, sudah 16 korban tewas karena sengatan ulat tersebut. Namun, asal usul ancaman dari ulat

serangga

“Faktanya memang beracun, tapi tidak ada fakta yang menyebutkan kalau ulat ini bisa membunuh manusia. HOAX itu,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. M Syahril di laman Sehat Negeriku.

Jika Anda terkena sengatan ulat berbulu ini, hal pertama kali harus dilakukan adalah mencuci area tubuh yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengurangi rasa sakit. Anda juga disarankan menggunakan krim anti-gatal jika sengatan mulai terasa gatal.

“Segera ke dokter sekiranya ada alergi terhadap gigitan serangga atau jika dirasa gejala terasa lebih parah,” tandas dr. Syahril. ♦

PASANGAN IDAH-ELNINO BERPELUANG DI PILGUB GORONTALO 2024

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Gorontalo pada 2024 ini memang masih beberapa bulan lagi, namun aroma-aroma politik telah berhembus kuat di kalangan para elit politisi, terlebih khususnya politisi dari Partai Golkar.

Dalam menghadapi pesta demokrasi terbesar di Provinsi Gorontalo tersebut, mesin politik di setiap partai telah mulai dipanaskan sejak dini, segelintir nama untuk dicalonkan sebagai Gubernur pun sudah mulai mencuat ke permukaan. Salah satunya adalah sosok Syarif Mbuinga.

Nama yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Kabupaten Pohuwato. Syarif Mbuinga tak lain adalah mantan Bupati Pohuwato dua periode yang terbilang cukup baik pada masa kepemimpinannya saat itu.

Syarif Mbuinga digadang-gadang bakal melanjutkan karier politiknya ke tingkat Provinsi, namun tampaknya mengalami hambatan yang cukup besar. Pasalnya, muncul isu yang tengah beredar saat ini, bahwa nama Syarif Mbuinga akan diper-

siapkan oleh sang ketua umum Partai Golkar Gorontalo, Rusli Habibie untuk menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Berbicara mengenai langkah politik, Partai Golkar sampai saat ini memang merupakan partai pemenang. Bahkan berpotensi menang pada kontestasi politik pada 2024.

Karena hampir semua perhelatan politik diisi oleh kader-kader terbaik Partai Politik Berlabangkan Pohon Beringin itu. Mulai dari Pileg DPR RI, DPRD Kabupaten, Kota dan Provinsi dan DPD RI, bahkan Pilkada Wali Kota, Bupati dan Pilgub.

Keseriusan dan optimisme Partai Golkar untuk mempertahankan dan meningkatkan perolehan kemenangan pada Pemilu 2024, juga terlihat dari penyampaian Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Rusli Habibie beberapa



waktu lalu.

"Rakerda DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, serta konsolidasi seluruh kader Partai Golkar, khususnya Caleg, bertujuan untuk mempermantap kesiapan kita memenangkan Pileg tahun 2024," kata Rusli Habibie, seperti dilansir dari Habari.id.

Dan jika berbicara soal Pilkada 2024, Partai Golkar sendiri juga telah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk bertarung pada Pilkada 2024 mendatang.

"Di Pilgub ada Ibu Idah Syahidah, Pak Roem Kono, Tony Uloli, Marten Taha, dan

ada lawan (tak terkalahkan)," ungkap Rusli Habibie di Gorontalo.

Elnino Husein Mohi, yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Gorontalo mengatakan, peluang tersebut (koalisi Gerindra-Golkar maupun sebaliknya) sangat bisa terjadi. Bahkan menurutnya, itu adalah salah satu bentuk reaksi politik.

"Jika Gerindra menang di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tentu saya Gubernur Gorontalo," kata Elnino Husein Mohi, seperti dilansir dari Antaraneews.

Gubernur Gorontalo periode 2011 - 2012 lalu, masih banyak yang harus dibenahi di Provinsi Gorontalo, terutama tentang pembangunan, tenaga kerja dan pemberantasan kemiskinan yang tentunya masih menjadi momok bagi provinsi Gorontalo.

"Saya juga sudah punya konsep dan gambaran apa yang akan dilakukan untuk provinsi Gorontalo," imbuh Tony Uloli.

Sementara itu, dua tokoh politik yang namanya kembali disebut-sebut sebagai pilihan alternatif di Pilgub Gorontalo 2024, yaitu Nelson Pamalingo dan Erwin Ismail



Pak Syarif Mbuinga," tambah Rusli Habibie.

"ada intinya, Partai Golkar tidak ingin hanya menjadi penonton. Kami siap berjuang untuk kepentingan daerah dan masyarakat," imbuhnya.

Selain nama Syarif Mbuinga, nama Idah Syahidah pun kini makin moncer. Bahkan dari hasil survey, nama istri Rusli Habibie itu berhasil menduduki posisi paling atas dengan angka 23.36, dibandingkan Rahmat Gobel yang meraih angka 21.56, untuk kategori Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Gorontalo. Hal itu dikarenakan aktivitas Idah Syahidah yang lebih banyak di daerah, dan bersama masyarakat.

Rusli Habibie menyebut bahwa pasangan Idah Syahidah (Golkar) dan Elnino Husein Mohi (Gerindra) berpeluang untuk dipasangkan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Gorontalo tahun 2024.

"Keduanya sama-sama anggota DPR RI dari daerah pemilihan Gorontalo, yang sangat rajin datang dan tinggal di Gorontalo. Jika dipasangkan sudah pasti tidak

Masih dari Partai yang sama, nama Tony Uloli juga muncul sebagai salah satu kandidat yang bakal maju sebagai calon Gubernur Gorontalo. Utamanya, setelah dirinya mengantongi surat tugas dari DPP Partai Golkar, untuk melakukan sosialisasi maju sebagai calon Gubernur Gorontalo dari Partai Golkar.

Tony Uloli pun telah siap lahir batin untuk mengabdikan diri maju di Pemilihan Gubernur Gorontalo tahun 2024 ini.

"Insya Allah saya sudah siap lahir batin untuk maju di Pilgub," kata Tony Uloli, seperti dilansir dari go-pena, Senin (15/1/2023).

Tony Uloli menyampaikan bahwa niatnya untuk maju di Pilgub Gorontalo semata-mata sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat Gorontalo dan diniatkan untuk ibadah.

"Menjadi Gubernur Gorontalo saya niatkan sebagai ibadah," tambah Tony Uloli.

Saat bercengkrama dengan para awak media di Gorontalo, Tony menceritakan bahwa, pengalamannya sebagai Wakil

juga tak bisa dipandang sebelah mata.

Bagaimana tidak, pasalnya keduanya merupakan pimpinan partai besar, yaitu sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo dan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo.

Di kalangan anak muda, keduanya sangat akrab dengan dunia otomotif.

Prof. Nelson yang begitu mensupport kegiatan-kegiatan balap motor dengan hadirnya sirkuit Sang Profesor menunjukkan bahwa tokoh ini, sangat mengerti dengan hoby anak muda.

Di sisi lain, Erwin Ismail yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo ini, juga sama, karena saat ini ia memimpin organisasi terbesar otomotif, Ikatan Motor Indonesia atau IMI yang getol dengan kegiatan otomotif, motor mobil, touring dan balap.

Selain itu, Partai yang mereka pimpin, juga pernah mengukir sejarah politik di Kabupaten Gorontalo. PPP dan Demokrat merupakan kolaborasi koalisi politik yang pernah bersama. ♦

INILAH PARA TOKOH YANG SIAP BERLAGA DI PILGUB MALUKU UTARA 2024

Tahun politik telah tiba. Usai Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, kini saatnya menyongsong gelaran Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang akan digelar pada November mendatang. Lantas, siapa saja tokoh yang berpeluang menjadi Calon Gubernur Maluku Utara 2024?

Untuk Pilkada di Maluku Utara (Pemilihan Gubernur Maluku Utara/Pilgub Malut) para Kandidat Calon Gubernur sudah mulai terekspos di media sosial. Banyak masyarakat yang telah mulai menyampaikan aspirasi mereka.

Bahkan sejumlah tokoh sudah mulai digadang-gadang, kendati secara pribadi belum menyatakan secara resmi akan maju sebagai peserta Calon Gubernur Maluku Utara di 2024, namun pelbagai pihak dan pengamat telah memprediksinya.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar, telah menyiapkan 5 nama yang berpotensi bertarung pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku Utara pada 2024 mendatang.

Lima nama tersebut, di antaranya adalah Alien Mus, Sultan Tidore Husain Sjah, Aliong Mus, Benny Laos, dan Ahmad Hidayat Mus (AHM).

Salah satu dari kelima nama tersebut, yakni Ahmad Hidayat Mus, menyatakan telah siap kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku Utara

(Malut) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak

2024 mendatang.

Pria disapa akrab AHM ini, telah habis-habisan memenangkan partai Golkar di pemilihan Legislatif (Pileg) maupun pilpres wilayah Maluku Utara pada pemilu 2024 lalu.

"Untuk itu, saya kerja keras, partai saya adalah partai Golkar. Kalau Golkar menang di Maluku Utara otomatis saya punya tiket untuk bertarung di provinsi Maluku Utara," kata AHM kepada awak media seusai gelar kampanye perdana Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakauming Raka, seperti dilansir dari publikamalut.com beberapa waktu lalu.

Senada dengan AHM, Ketua DPD II Partai Golkar Kepulauan Sula, Ahkam Gajali, juga siap berjuang menangkan pileg di pemilu 2024.

"Partai Golkar harus menang, menang di Kabupaten, menang Provinsi dan menang di DPR RI," kata Ahkam.

Ahkan menambahkan, perjuangan AHM menjadi Gubernur Maluku Utara, bukan kali pertama. Ia menegaskan, bahwa kali ini partai Golkar akan bertarung habis-habisan untuk AHM

mencalonkan diri Gubernur Malut di pilkada pemilu





2024.

Selain AHM, Politisi Gerindra, Muhammad Thariq Kasuba (MTK) juga siap melanjutkan posisi ayahnya, KH Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai Gubernur Maluku Utara periode berikutnya dengan menyatakan kesiapannya ikut bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Maluku Utara 2024.

Kandidat Doktor kelahiran Ternate, 28 April 1990 ini, menargetkan kursi Maluku Utara 01 akan mewakili suara anak muda di provinsi Maluku Utara.

Dengan motto "Poros Muda Berkhidmat", MTK berupaya merangkul mahasiswa, dimulai dari Jakarta sebagai ibu kota negara, yang nanti akan disisir ke setiap wilayah di Maluku Utara.

Menurutnya, awalnya dirinya tidak berniat maju, namun karena diperintah langsung oleh orang tua untuk meneruskan kerja-kerja yang belum tuntas ini, maka sebagai anak dari "bi'ruwalidain atau bakti kepada kedua orang tua" adalah melangkah maju bersama anak-anak Muda.

"Kenapa harus mahasiswa, karena di tangan generasi penerus inilah ke depan Maluku Utara akan mandiri mengelola Sumber Daya Alamnya," tegas MTK.

Muhammad Thariq Kasuba menilai, selama ini daerah Malut dikelola oleh orang lain, karena sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Malut di bidang pertambangan masih minim.

Oleh karena itu, dirinya berjanji, ke depan, akan memprioritaskan anak negeri sendiri, termasuk memberikan beasiswa kepada mereka yang mau mengambil jurusan pertambangan.

"Ke depan nanti, saya akan mempriori-

taskan anak negeri sendiri termasuk memberikan beasiswa full kepada mereka yang mau mengambil jurusan pertambangan, misalnya," lanjut MTK.

Ia pun menegaskan, dirinya siap maju Pilkada Maluku Utara 2024 ini, bukan untuk memimpin, namun untuk melayani dan bukan menjadi bos atau penguasa, namun menjadi pelayan bagi masyarakat Maluku Utara sesuai tagline Berkhidmat.

"Kami punya niat untuk maju Pilgub



Untuk itu, saya kerja keras, partai saya adalah partai Golkar. Kalau Golkar menang di Maluku Utara otomatis saya punya tiket untuk bertarung di provinsi Maluku Utara

Maluku Utara mewakili anak-anak muda, Insya Allah niat kami ini," pungkas pria yang menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Madinah jurusan Da'wah wa Ushuluddin, S2 di Universitas Islam Madinah jurusan Sejarah Islam dan Kandidat Doktor (S3) di Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ) Jakarta jurusan Pendidikan Islam.

Sementara itu, Sultan Tidore, Husain Alting Syah, juga merespon soal wacana

dirinya akan bertarung dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku Utara 2024 mendatang.

Menurutnya, sikap itu bisa disampaikannya setelah proses tahapan Pemilu selesai.

"Setelahnya (pemilu presiden), baru kita fokus ke Pilgub. Semisal proses tahapan itu ada ruang demokrasi atau kesempatan diberikan ke saya, tentu berupaya beri pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Utara," kata Husain Alting kepada awak media, beberapa waktu lalu.

Husain Alting juga mengaku, dirinya berhubungan baik dengan seluruh partai politik untuk membicarakan kemajuan bangsa dan negara. Ia menyebut pengabdian sejatinya berkomunikasi untuk kebaikan banyak orang.

"Masyarakat harus mendapatkan pemimpin yang baik, sehingga tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai. Kita harus berdiri dan berkomunikasi untuk memberikan kebaikan kepada banyak orang, terutama untuk masyarakat Maluku Utara," tambahnya.

Husain menegaskan, wacana dirinya maju di Pilgub Maluku Utara merupakan bagian dari sistem demokrasi, sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya. Namun ia tak menafikan jika amanah yang diberikan akan diemban dengan baik.

"Pada prinsipnya kita menghormati itu, tapi saat ini tahapan Pemilu sedang berlangsung jadi kita fokus ke Pileg dan Pilpres dulu. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama menjadi orang baik," tegasnya, seperti dilansir dari mimbartimur.com. ♦



PILGUB KEPULAUAN RIAU **PETAHANA SUDAH DAPAT SAINGAN**

Usai Pemilu 2024, dinamika politik di berbagai daerah akan berlanjut dengan pemilihan Gubernur dan Bupati serta Wali Kota. Bagaimana dengan Kepulauan Riau?

Meski wilayah dan jumlah penduduknya relatif kecil, Kepulauan Riau kerap menjadi etalase demokrasi di Indonesia. Harap maklum karena wilayah provinsi ini berhadapan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Filipina. Terlebih lagi, Kepri memiliki kawasan industri juga destinasi wisata yang dekat dengan negara-negara tetangga.

Begitulah maka Pilkada Kepri memiliki daya tarik tersendiri. Nah, untuk Pemilihan Gubernur, beberapa nama sudah muncul. Bahkan ada yang sudah membentuk tim relawan. Muhammad Rudi, Wali Kota Batam sekaligus Ketua Badan Pengusahaan Batam adalah salah satunya.

"Saya sudah siap dari dulu sampai hari ini maju ke Gubernur. Kan tidak ada pilihan," ujar Rudi, Senin 4 Maret 2024.

Tidak ada pilihan dapat bermakna ban-

yak. Namun yang pasti Rudi sudah dua periode menjabat Wali Kota Batam sejak Maret 2016.

Tak mengherankan jika ia menegaskan niatnya maju di pemilihan Gubernur Kepri. "Inshaallah akan maju, sebagai manusia yang beriman, kita serahkan segalanya kepada Allah SWT," ucapnya.

soal sosok yang akan mendampingi menjadi calon wakil gubernur, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kepri ini mengaku belum ada. "Untuk wakil gubernurnya masih belum," ucapnya.

Beriringan dengan itu muncul sudah relawan untuk mendukung Rudi. Antara lain Ultras HMR (HM Rudi). "Prestasi Muhammad Rudi dalam membangun Batam tidak main-main. Kami siap mendukung dan memenangkan beliau, dengan harapan pemerataan pembangunan di Provinsi Kepri bisa terwujud apabila Pak Rudi menjadi Guber-

nur," kata Ketua Ultras HMR Tanjungpinang, Mahmudi Bep yang menyebut Rudi sebagai Bapak Pembangunan Batam karena prestasinya.

Menyoroti kiprah Muhammad Rudi, relawan menunjukkan bahwa sebagai "Visioner Leader of Indonesia 2023 'ASIA Leaders Awards 2023,'" Rudi berhasil membawa Batam bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Batam mencatatkan peningkatan yang memuaskan, dengan persentase 4,75 persen pada tahun 2021, 6,84 persen di tahun 2022, dan kembali meningkat pada tahun 2023 dengan capaian 7,04 persen.

Meskipun dihadapkan pada cobaan pandemi yang berat, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa kepemimpinan Muhammad Rudi mampu menjadikan Batam sebagai sentral ekonomi Kepri. Relawan berharap prestasi ini dapat diterjemahkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk memajukan



Provinsi Kepri.

"Kami bergerak untuk mensosialisasikan prestasi Muhammad Rudi di Kota Tanjungpinang dan berharap tumbuhnya relawan-relawan lain yang mendukung perjuangan beliau pada Pilgub Kepri. Provinsi Kepri harus berkembang pesat, dan kami melihat semangat baru dari Pak H. Muhammad Rudi dapat membawa perubahan positif untuk Kepri tercinta," kata Mahmudi Bep.

Pada sisi lain, petahana Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, memastikan akan maju dan mendaftar diri sebagai calon Gubernur Kepri pada Pilkada yang akan dihelat November 2024 mendatang.

Terhadap pasangan yang akan mendampingi, Ansar mengatakan hingga saat ini belum menentukan. "Insyaallah (akan mendaftarkan), pasangannya nanti lah," jawab Ansar saat ditanya wartawan di Bandara RHF Tanjungpinang Jumat, 9 Februari 2024.

Soal gagasan memasang Aunur Rofiq sebagai Wakil Gubernur-nya, Ansar menjawab, "Nanti lah," ujarnya.

Toh Ansar mengakui, Aunur Rofiq yang menjadi Bupati Karimun, Kepri, sangat ideal sebagai wakil-nya pada Pilgub Kepri di 2024 itu. "Iya, Pak Rofiq sangat ideal lah, kan kita mesti komunikasi dengan pimpinan kita di pusat dulu," ujarnya.

Ansar juga menyebut, proses Pilkada Kepri serta siapa yang akan mendampingi sebagai Wakil Gubernur hingga saat ini belum disepakati secara politik. Maksudnya

tentu saja dukungan resmi dari partai politik di tingkat nasional.

Sedangkan di mata pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja Ali Haji Kepulauan Riau (Kepri) Zamzami A Karim, Pilgub Kepri 2024 merupakan arena persaingan kubu keluarga. Persaingan yang dimaksud adalah antara keluarga Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam Muhammad Rudi.

Menurut Zamzami, Ansar beristrikan Dewi Kumalasari yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kepri, dan anak keduanya, Roby Kurniawan merupakan Plt Bupati Bintan. Sedangkan Rudi, beristrikan Marlin Agustina yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepri. "Jadi saya menyebutnya persaingan sengit antara kubu keluarga Ansar

dan Rudi," kata Zamzami.

Zamzami menambahkan, Marlin Agustina kemungkinan tidak akan maju sebagai calon Gubernur Kepri 2024 mendatang. Terlebih Rudi sudah menyatakan siap mempergunakan kursi Kepri 1.

"Kehadiran Marlin (maju di Pilgub) justru menjadi batu sandungan Rudi. Meskipun hubungan Ansar-Marlin saat ini tidak harmonis," kata Zamzami.

Sejauh ini memang baru Rudi dari Partai Nasdem yang menyatakan maju bersaing melawan petahana Ansar Ahmad yang berasal dari Partai Golkar. Apakah akan ada persaingan dari partai lain?

Kita tunggu prosesnya. Toh Pilkada masih jauh. Pendaftaran pasangan calon menurut Komisi Pemilihan Umum terjadwal pada akhir Agustus 2024. ♦



PILGUB LAMPUNG TAK JERA BERSAING LAGI

Dinamika politik lokal menjelang pemilihan Gubernur Lampung 2024 akan kian diwarnai persaingan. Yang pernah kalah, siap maju Pilgub lagi.

Dialah Herman HN, Wali Kota Bandar Lampung dua periode 2010-2020. Pada 2018 ia maju sebagai Calon Gubernur Lampung berpasangan dengan Sutono, namun yang terpilih adalah pasangan Arinal Junaidi dan Chusnunia (Nunik) Chalim.

Toh Herman HN tampaknya tak jera berkompetisi di Pilgub Lampung. Ia mengaku siap maju menjadi calon Gubernur Lampung pada pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.

Meski begitu, Herman mengaku masih sangat perlu berkoalisi dan mendapatkan support dari pihak lain, terlebih perolehan

berlayar (mengusung calon sendiri)," ujar Ketua DPW NasDem Lampung itu, Rabu, 6 Maret 2023.

Herman bilang, tidak ada masalah untuk mendapatkan calon wakil Gubernur dari partai apapun. "Pokoknya siap," tukasnya.

Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan Umar Ahmad mengatakan dirinya sedang melihat aspek kebermanfaatan apabila dia maju sebagai calon Gubernur Lampung 2024. "Kita lagi menghitung kemana-mana, dan mengkaji cara menangnya,"



kursi pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024 partainya di DPRD Lampung diprediksi 10 kursi atau 11,76 persen. Sedangkan syarat untuk mengusung calon sendiri tanpa koalisi adalah harus mendapatkan 17 kursi atau 20 persen dari total 85 kursi DPRD provinsi Lampung.

"Maju nanti kita kalau ada yang bantu dana. Kalau wakil lihat nantilah. Karena kita ini dapat 10 kursi, kalau 17 kita baru bisa

ungkap Umar, Sabtu, 2 Maret 2024.

"Tinggal kita hitung berapa jumlah yang menilai seperti itu (dianggap mampu). Karena membangun Lampung harus bersama," tambahnya.

Umar mengaku, dirinya kerap berkomunikasi dengan Nunik namun belum ada pembahasan tentang Pilgub Lampung 2024. "Komunikasi dengan beliau sering dilakukan, belum ada obrolan spesifik,"

ujarnya.

Pada sisi lain Nunik yang menjadi petahan Wakil Gubernur kemungkinan besar meraih tiket ke Senayan sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan Lampung II dari PKB. Jika Nunik maju di Pilgub Lampung, kursi Senayan harus ditinggalkan alias mengundurkan diri.

Sekitar setahun sebelumnya, pengamat politik Universitas Lampung (Unila) Bendi Juantara sudah ada beberapa nama tokoh potensial untuk maju dalam Pilgub Lampung 2024.

"Tentu saja yang potensial adalah incumbent atau petahana Gubernur Arinal yang punya investasi politik yang lebih unggul dibandingkan kandidat lainnya," ujar Bendi, pada akhir Maret 2023.

Menurut Dosen Ilmu Pemerintahan Unila ini, Arinal diuntungkan dari program dan kebijakannya saat menjabat yang dapat menyisir akar rumput. Belum lagi, prestasi Arinal bisa jadi pertimbangan rakyat untuk memilih kembali Ketua Golkar Lampung itu.

"Wakil Gubernur Chusnunia Chalim (Nunik) juga punya peluang yang sama. Selain karena alasan yang sama, dia juga tokoh penting di PKB dan organisasi keagamaan di Lampung (NU)," sambungnya.

Selain keduanya, Bendi melihat ada dua pemimpin perempuan di Lampung yang populer dan berkontribusi banyak untuk daerah yang dipimpinnya. Keduanya adalah Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dan Bupati Tanggamus Dewi Handayani. Sebagai catatan, Eva Dwiana adalah istri Herman HN.

Selain itu, lanjut Bendi, sosok mantan Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Umar Ahmad yang juga jadi perhatian. "Umar Ahmad mampu mengemas aspek yang minimal menjadi aspek yang positif bagi daerah.

Pembangunan dan inovasi di Tubaba tak lepas dari kepemimpinannya," kata dia.

Toh lanjut Bendi, peta politik masih buram dan belum dapat dilihat secara utuh. Gambaran ini dapat dilihat lebih jelas pasca hasil Pemilu 2024 diketahui.



Begitulah, pasca hasil Pemilu 2024 peta politik menjelang Pilgub Lampung lebih jelas dengan niat Herman HN maju kembali. Namun, dinamika masih akan berlanjut hingga pendaftaran pasangan calon pada akhir Agustus 2024.

Sebagai catatan, Provinsi Lampung pada Pemilu 2024 mencatat jumlah penduduk mencapai 6.650.152 jiwa. Dari jumlah itu, pemilih dalam Pemilu 2024 tercatat 4.686.372 mata pilih. Sedangkan tingkat partisipasi mencapai angka 78 persen. Sejauh ini dinamika politik di tengah-tengah masyarakat Provinsi Lampung pada pra dan pasca pemungutan suara masih dinilai berada dalam kategori wajar.

Sedangkan pada sisi kesiapan penyelenggaraan, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilgub yang dilaksanakan secara serentak pada November 2024.

"Pemprov Lampung telah menyiapkan anggaran dan pembayarannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan sebanyak tiga tahapan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, Minggu, 3 Februari 2024.

Sebelumnya Pemprov Lampung bersama KPU dan Bawaslu telah melakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah

(NPHD) untuk Pilkada pada 2024 mendatang. Penandatanganan ini sesuai dengan surat edaran Mendagri nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang pendanaan Pilkada 2024. Juga surat dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Nomor 900.1.9./16888/Keuda tanggal 2 November 2023 tentang percepatan penandatanganan NPHD Pilkada 2024.

Pemprov Lampung menyepakati anggaran yang dikeluarkan untuk KPU Lampung sebesar Rp295.956.908.000 dan Bawaslu sebesar Rp68.064.646.000. Pencairan dana baik ke KPU dan Bawaslu juga dilakukan secara bertahap. Seperti untuk KPU pada tahap pertama sebesar Rp118.382.763.200. Kedua sebesar Rp177.574.144.800. Kemudian Bawaslu tahap pertama Rp27.225.858.400 kemudian tahap kedua Rp40.838.787.600.

Fahrizal menegaskan bahwa anggaran Pilgub juga sudah dibahas bersama KPU Lampung. Skema pembayarannya akan ditransfer melalui tiga tahap, yakni 20 persen, 20 persen, dan terakhir 60 persen.

"Pada Maret 2024 Pemprov Lampung akan kembali mentransfer kepada KPU sebesar 20 persen. Untuk tahap pertama yang 20 persen itu sudah di transfer, nanti kalau sudah tinggal sisanya yaitu 60 persen," sambung Fahrizal.

Ia berharap transfer dana itu memperlancar tahapan pemilihan gubernur pada 2024 dapat berjalan dengan baik. Menurut Fahrizal, anggaran Pilgub Lampung 2024 sudah tidak ada persoalan. "Sudah kita bahas semuanya dengan KPU, dan semua anggarannya sudah ada di 2024 ini," tandasnya.

Bagaimana jika proses Pilkada 2024 melampaui tahun anggaran 2024? Ternyata Kementerian Dalam Negeri ternyata sudah mengantisipasi.

Plh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengemukakan sudah mengimbau agar daerah menyiapkan biaya pilkada pada dua tahun anggaran. Rinciannya, 40 persen dari anggaran tahun 2023 dan 60 persen dari anggaran tahun 2024.

"Untuk itu kita juga sudah terbitkan dulu di pedoman penyusunan APBD di tahun-tahun sebelumnya. Tolong daerah membuat peraturan daerah (terkait) dana cadangan, artinya mencicil di dalam mengalokasikan Pilkada serentak ini," jelas Maurits.

Nah, anggaran penyelenggaraan sudah tak ada masalah. Masalah mendasaknya adalah dinamika penentuan pasangan calon dalam Pilgub. ♦





AMBANG BATAS PARLEMEN MENJELANG SENJA

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang menginginkan perubahan ambang batas parlemen 4 persen. Sebenarnya bisa naik, bisa juga turun dari 4 persen.

Bermula dengan gugatan lembaga pegiat politik Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) memantapkan ragam pendapat. Namun parlemen, khususnya Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (membidangi pemerintahan dalam negeri, Sekretariat Negara, dan Pemilu) bersiap membahasnya.

Dalam putusannya yang dibacakan pada Kamis, 29 Februari 2024, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Perludem yang menyoal penerapan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional sebagai dasar untuk menentukan perolehan kursi di DPR. "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitu-

sional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam Sidang Pengucapan Putusan MKRI yang digelar, pada Kamis (29/2/2024).

Sebelumnya, gugatan uji materiil itu disampaikan pemohon dengan nomor perkara 116/PUU-XXI/2023 dan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 11 September 2023. Posisi Perludem dalam perkara ini mengajukan permohonan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Pertama, mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa "paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah se-

cara nasional" bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara yang ditetapkan berdasarkan perhitungan rasional matematis dan dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional".

Ketiga, memerintahkan kepada Presiden dan DPR sebagai Pembentuk Undang-Undang untuk segera melakukan perbaikan terhadap ketentuan ambang batas parlemen di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan merumuskan besaran angka ambang batas parlemen di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berdasarkan perhitungan rasional matematis dan dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional. Keempat, memerintahkan amar (perintah) putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk

dimuat dalam Berita Negara.

Alhasil, MK mengabulkan sebagian permohonan Perludem. Putusan MK menyatakan, ketentuan Pasal 414 Ayat (1) UU No 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, MK sependapat dengan sejumlah dalil yang diajukan oleh Perludem. Dalam pertimbangannya, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengungkapkan, ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh sejumlah hal, seperti didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas, juga harus diputuskan dengan tetap menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional.

Tambahan pula MK sepakat dengan dalil Perludem bahwa tata cara penentuan ambang batas parlemen dan persentase ambang batas tidak berdasarkan pada metode serta argumen yang memadai. Namun, MK tidak dapat mengabulkan cara penghitungan ambang batas parlemen yang diajukan oleh Perludem. MK berpandangan bahwa penentuan cara penghitungan ambang batas itu merupakan kebijakan pembentuk undang-undang untuk merumuskannya, termasuk di dalamnya menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Mahkamah, ujarnya, tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu. Bahkan, merujuk keterangan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR terhadap permohonan a quo,

Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas.

Saldi mengungkapkan pula, ambang batas parlemen jelas memiliki dampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR, yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu. "Bilamana diletakkan dalam basis argumentasi sistem pemilihan proporsional yang dianut, jumlah suara yang diperoleh partai politik peserta pemilu selaras dengan kursi yang diraih di parlemen agar hasil pemilu menjadi proporsional. Untuk itu, dalam sistem pemilu proporsional semestinya meminimalisir suara yang terbuang agar hasil pemilu tidak terkategori menjadi tidak proporsional atau disproportional," jelasnya.

Saldi mengatakan bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah memaparkan dalam konteks keterpenuhan prinsip proporsionalitas dimaksud, misalnya, pada pemilu 2004 suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi adalah sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional. "Begitu pula dalam pemilu 2019, terdapat

13.595.842 suara tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau sekitar 9,7 persen dari jumlah suara sah secara nasional," ujarnya.

Menurut dia, meski pada pemilu 2014 hanya terdapat 2.964.975 suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR, atau sekitar 2,4 persen dari suara sah secara nasional, namun tetapi secara faktual jumlah partai politik di DPR lebih banyak dibandingkan hasil pemilu 2009 dan pemilu 2019, yaitu 10 partai politik. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa bentangan empirik tersebut menegaskan telah terjadi disproportional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR.

Ia mengatakan bahwa fakta tersebut membuktikan, hak konstitusional pemilih yang telah digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif.

"Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, namun kebijakan am-



bang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen," ujarnya.

Menurut Saldi, penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada dasar metode dan argumen yang memadai, secara nyata telah menimbulkan disproportionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional.

Sesuai dengan pertimbangan hukum

Revisi sebaiknya dirampungkan sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029. "Dan, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR," ungkap Saldi.

Nah, ternyata memang putusan MK terhadap uji materiil dari Perudem itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Malah bukan mustahil revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bisa segera tercapai sebelum akhir

Menurut Doli, DPR dan pemerintah harus segera merevisi serta menyempurnakan UU Pemilu sesuai dengan putusan MK. Artinya, perubahan harus selesai sebelum gelaran Pemilu 2029 dan sudah memasukkan pertimbangan penyederhanaan partai politik (parpol).

Sedangkan Anggota Komisi II DPR asal Fraksi PKS, Mardani Ali Sera berpendapat putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga DPR selaku pembentuk undang-undang perlu segera meresponsnya. Dengan demikian, putusan MK bisa berbuah posisi hukum yang jelas. "Threshold itu niatnya kan untuk menyederhanakan sistem multipartai. Dengan itu, memang



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, masih kata Saldi, kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan ambang batas parlemen termasuk besaran atau persentase dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. "Namun secara faktual prinsip-prinsip tersebut telah tercederai karena berakibat banyak suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR, sehingga menciptakan disproportionalitas sistem pemilu proporsional yang dianut," jelas Saldi.

Saldi Isra mengemukakan pula, perubahan ketentuan ambang batas juga harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik.

masa persidangan 2024.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, perubahan ambang batas minimal parlemen yang diminta oleh MK sejalan dengan pandangan komisinya. Pada awal 2019, sebetulnya Komisi II sudah mengajukan inisiatif revisi UU Pemilu untuk menyempurnakan sistem yang ada, salah satunya berkaitan dengan ambang batas minimal.

"Dari berita yang saya baca, MK memerintahkan adanya perubahan tentang parliamentary threshold. Buat saya, apa yang diputus MK sama dengan semangat yang ada di Komisi II DPR. Kami juga di awal periode 2019 kemarin sebenarnya sudah mengajukan inisiatif revisi UU," ujar Doli, Jumat, 1 Maret 2024.

ada suara yang terbangun, tapi itu juga membuat jumlah partai kian sedikit," tambahnya.

Dengan jumlah partai yang sedikit, lanjut Mardani, ideologi parpol dan kedekatannya dengan publik kian mengakar kuat. Namun, kegagalan menjalankan ambang batas membuat pemilih bimbang atau suara yang tidak terpakai terus tinggi.

"Threshold itu niatnya kan untuk menyederhanakan sistem multipartai. Dengan itu, memang ada suara yang terbangun, tapi itu juga membuat jumlah partai kian sedikit," ujarnya.

Perubahan UU No 7/2017, ungkapnya, merupakan pilihan yang harus diambil. Mardani berharap pada akhir masa persidangan parlemen ini, DPR bisa meru-

muskan revisi UU Pemilu dengan norma hukum baru.

Nah, Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus pun mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas DPR atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen diubah sebelum pelaksanaan Pemilu 2029. Guspardi menilai angka 2-3 persen proporsional untuk ambang batas parlemen.

"Sekarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa keputusan MK itu bersifat inkrah dan mengikat, artinya tentu kita pasti akan menindaklanjuti terhadap keputusan yang ditetapkan oleh MK tersebut. Kalau saya tangkap dari berita, MK hanya membatalkan parliamentary threshold yang 4 persen, bukan lah berarti menafikan parliamentary threshold, cuma persennya itu," kata Guspardi Jumat, 1 Maret 2024.



Threshold itu niatnya kan untuk menyederhanakan sistem multipartai. Dengan itu, memang ada suara yang terbuang, tapi itu juga membuat jumlah partai kian sedikit

Dia menyebut putusan itu akan berlaku pada Pemilu 2029. Karena itu lah, dia menyebut DPR RI harus melakukan musyawarah terkait persentase parliamentary threshold. "Artinya MK mengembalikan kepada pembuat UU untuk selaraskan kepada UUD. Jadi keputusannya itu diberlakukan untuk Pemilu 2029. Komisi II DPR akan memutuskan sesuai dengan perintah MK agar keputusan itu sudah bisa diberlakukan di tahun 2029, tapi yang jadi masalah tentu akan kita musyawarahkan lintas fraksi apakah memang 4 persen ini harus direvisi," ucapnya.

Guspardi pun menilai angka 2 persen hingga 3 persen mungkin bisa jadi pertimbangan. Dia kembali menekankan dampak jika ambang batas dihilangkan. "Apakah 3 persen atau 2 persen, tetapi

tidak menafikan PT adalah sesuatu keniscayaan karena kalau tidak pakai penyaringan nanti upaya upaya untuk menyaring jumlah parpol menjadi tidak akan berjalan. Jadi artinya tetap ada prinsip-prinsip PT cuma yang akan ditetapkan apakah 2 persen hingga 3 persen, dan saya yakin kawan-kawan tidak akan memutuskan 0 persen, loss. Gitu," ujar dia.

Sedangkan Anggota Komisi II DPR RI Komarudin menggarisbawahi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan kewenangan institusi pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah. Ia pun mempertanyakan gugatan serupa ke MK berulang lagi.

"Gugatan soal ambang batas parlemen itu sebenarnya sudah pernah diajukan dulu, tapi ditolak. Alasannya karena itu

empat persen," kata Hendrawan, Kamis, 29 Februari 2024.

Menurut dia, putusan MK itu berada dalam kerangka penyederhanaan jumlah parpol. "Untuk konsolidasi dan penyederhanaan parpol, angka lima sampai tujuh persen dianggap lebih masuk akal," ujarnya lagi.

Hendrawan mengemukakan pula, tak hanya PDI-P yang mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen dari empat persen. Menurut dia, partai politik besar rata-rata menginginkan ambang batas parlemen dinaikan. Tetapi, Hendrawan tak mengungkapkan partai politik mana saja di parlemen yang ingin menaikkan ambang batas tersebut.

"Namun sebaliknya, parpol-parpol baru mengusulkan angka tersebut (empat



wewenang pembuat UU. Tugas MK kan menguji UU dengan UUD 1945, memastikan tidak ada pelanggaran terhadap konstitusi," kata Komarudin, Kamis, 29 Februari 2024.

Menurut dia, MK sudah berulang kali memutus gugatan serupa dan menyatakan penentuan angka ambang batas parlemen merupakan wewenang pembuat undang-undang. "Tapi sekarang memang lagi banyak anomali berpikir. Ini sebenarnya tergantung pada kepentingan tertentu, sama seperti batas usia calon presiden dan calon wakil presiden," ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Masih dari PDIP, anggota DPR Hendrawan Supratikno menyebutkan, partai politik besar seperti PDI-P pada dasarnya ingin menaikkan ambang batas parlemen tersebut. "Putusan yang bijaksana. Kita memang tidak boleh berhenti di angka

persen) diturunkan," kata anggota Komisi XI DPR ini. Jadi, sambungnya, memang harus dicari angka kompromi yang rasional.

Menurut dia angka empat persen yang sudah ditetapkan saat ini sebagai ambang batas, sejatinya sudah memenuhi kompromi untuk seluruh partai politik. "Saat UU (undang-undang) tersebut dibentuk, dilakukan studi banding ke beberapa negara. Rata-rata pada angka empat sampai tujuh persen. Pada waktunya angka yang tepat akan diperdebatkan lagi," kata Hendrawan.

Simpulannya, setidaknya ada dua persoalan yang terkait dengan ambang batas ini. Kapan revisi UU Pemilu mengenai ambang batas ini tuntas, dan berapa ambang batas yang disepakati? Tapi, apakah pemberlakuannya dapat mencakup hasil Pemilu 2024? Wallahu'alam. ♦

MEMBERI PELAYANAN MAKSIMAL DI BULAN RAMADHAN

Berbagai kegiatan dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyambut Ramadhan.

Semua program yang dibuat tersebut sebagai bentuk pelayanan maksimal yang diberikan Penjabat Bupati Musi Banyuasin, H Apriyadi Mahmud kepada masyarakat Muba.

Sehingga tidak heran para pelaku UMKM di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sangat bahagia di bulan puasa kali ini. Dimana Pj Bupati Apriyadi Mahmud melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) memfasilitasi UMKM secara cuma-cuma lewat Pasar Bedug.

Hal ini selain mendorong perekonomian UMKM juga memberikan support yang sangat baik perekonomian pedesaan, karena pasar bedug tersebut difasilitasi Pj Bupati Apriyadi Mahmud hingga pedesaan atau kawasan pelosok.

"Kita siapkan puluhan meja untuk tenant UMKM, jadi warga bisa membeli sayur masak dan lauk pauk lainnya yang mudah dijangkau dengan keberadaan pasar bedug," ungkap Pj Bupati Apriyadi Mahmud di sela Pembukaan Pasar Ramadhan / Bedug 1445 H / 2024 M di Halaman Masjid Darussalam Kecamatan Sungai Lilin.

Pasar Bedug atau Pasar Ramadhan selama ini selalu dipusatkan di Kota Sekayu saja namun tahun 2024 ini dirinya memfokuskan keberadaan pasar bedug di kawasan pedesaan di Muba.

"Selama ini hanya terpusatkan di Kota Sekayu. Alhamdulillah di Sungai Lilin ada dua titik pasar bedug yakni di halaman Masjid Darussalam dan Desa Srigunung," tuturnya.

la mengingatkan, agar Disdagperin dan jajaran terkait untuk rutin mengecek kualitas makanan dan minuman yang dijual di Pasar Bedug.

"Jangan sampai nanti ada pedagang nakal yang mencampurkan makanan yang dijual yang mengandung zat berbahaya, saya minta agar kualitas jajanan harus dijaga," tegasnya.

Kadisdagperin Muba Azizah mengatakan pihaknya menyiapkan 60 meja untuk memfasilitasi ratusan pedagang UMKM di Sungai Lilin.

"Kami akan rutin mengecek dan memantau kualitas jajanan, jangan sampai ada jajanan yang mengandung zat berbahaya, ini yang akan kita antisipasi terus," imbuhnya.

Sementara itu, Misnawati salah satu pedagang UMKM di halaman Masjid Darussalam mengaku, sangat senang bisa difasilitasi

berdagang saat bulan puasa.

"Kami sangat berterima kasih dengan pak Bupati Apriyadi karena telah memberi ruang kepada kami untuk berdagang selama bulan puasa," tuturnya.

Atur Jam Kerja

Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud mengeluarkan Surat Edaran terkait jam kerja pegawai di lingkungan Pemkab Muba selama pelaksanaan Ramadhan 1445 H yakni mengacu pada Surat Edaran Nomor: B-800/432/BKPSDM/BKPSDM/2024.

Ini juga merujuk dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

"Jadi sejak bulan puasa ini, pegawai di lingkungan Pemkab Muba mulai masuk kerja pukul 08.00 WIB dan pulang kerja pukul 15.00 WIB, untuk hari Senin-Kamis," ungkap Kepala BKPSDM Muba, Drs Aidil Fitri MSI.

Sementara untuk jam istirahat Senin-Kamis, lanjut Aidil, yakni pukul 12.00-12.30 WIB.

"Khusus hari Jumat masuk kerja pukul 08.00 WIB



dan pulang kerja pukul 15.30 WIB, dan jam istirahat pukul 11.30 WIB-12.30 WIB," jelasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Apriyadi Mahmud mengingatkan, kepada pegawai di lingkungan Pemkab Muba untuk tetap menjalankan pelayanan publik seperti biasa meski sedang menjalankan ibadah puasa.

"Pelayanan tetap berjalan maksimal, pastikan pelayanan publik beroperasi seperti biasa dan membuat nyaman masyarakat," ucapnya.

Ia menambahkan, agar pegawai yang menjalankan ibadah puasa tetap semangat menjalankan aktifitas. "Selain itu, selama puasa konsumsi makanan dan minuman sehat serta jaga kesehatan tubuh agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik," pungkasnya.

Fasilitasi Mudik Lebaran Gratis

Pemkab Muba juga memberi kabar gembira bagi masyarakat perantau dan mahasiswa asal Muba Banyuasin yang berada di Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung.

Tak tanggung-tanggung Pj Bupati Apri-



Kita siapkan puluhan meja untuk tenant UMKM, jadi warga bisa membeli sayur masak dan lauk pauk lainnya yang mudah dijangkau dengan keberadaan pasar bedug.

Muba, Herryandi Sinulingga AP.

Lingga menjelaskan, inisiasi program ini bekerjasama dengan Dishub Kabupaten Muba dan untuk bisa mengikuti program tersebut bisa mengisi pendaftaran secara online.

"Pendaftaran terakhir pada 26 Maret 2024, dan keberangkatan akan dimulai pada 30 Maret. Bagi yang berminat silah-

kan mengisi link pendaftaran di <https://forms.gle/JonM7yFktbHjVmTv9>," jelas Lingga.

Ia menambahkan, titik berkumpul mudik gratis ke Muba tersebut di Asrama Putri Randik Yogyakarta.

"Semoga program ini bisa membuat senang warga Muba perantauan untuk berkumpul dengan keluarga saat lebaran Idul Fitri nanti," ucapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Apriyadi Mahmud mengajak warga perantauan dan mahasiswa asal Muba memanfaatkan program tersebut.

"Ini kita fasilitasi gratis, semoga bisa sedikit meringankan beban warga Muba perantauan," ujarnya.

Kandidat Doktor Unsri itu menambahkan, semua fasilitas mudik gratis sudah dipersiapkan dengan nyaman untuk masyarakat Muba.

"Semoga nanti dalam perjalanan perjalanan lancar dan bisa berkumpul berlebaran dengan keluarga," terangnya. ♦



yadi Mahmud memfasilitasi mudik lebaran gratis dari ke Muba untuk 240 orang.

"Jadi untuk mudik lebaran Idul Fitri tahun ini pak Bupati Apriyadi memfasilitasi mudik gratis untuk warga Muba perantauan di Yogyakarta, Bandung, Jakarta dan sekitarnya," ungkap Kadin Kominfo



HIKMAH MERAIH KEUTAMAAN BULAN SYA'BAN

Bulan Rajab merupakan bulan pembersihan badan, bulan Sya'ban merupakan bulan pembersihan hati, dan bulan Ramadhan merupakan bulan pembersihan ruh. Rasulullah SAW bersabda, "Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadhan adalah bulan umatku."

Menurut Abu Bakar Al-Balkhi bahwa: "Bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, sedangkan bulan Ramadhan adalah bulan memanen hasil tanaman."

Para ahli hikmah mengatakan: "Bulan Rajab adalah bulan untuk memperbaiki istighfar (memohon ampun) dari dosa-dosa, bulan Sya'ban untuk memperbaiki hati dari cela/keburukan, bulan Ramadhan untuk menerangi hati dan Lailatul Qadar sebagai media mendekat kepada Allah."

Dalam kitab Duratun Nashihin, Syekh Yahya bin Mu'adz memaknai bulan Sya'ban terperinci dari masing-masing huruf penyusun kata Sya'ban, yang terdiri dari lima huruf, yakni: (syin) berarti asy-syafa'ah wasy syarafah (pertolongan dan kemuliaan), ('ain) berarti al-'izzah wal karamah (kemuliaan dan kehormatan), (ba') berarti al-birr (kebajikan), lalu (alif) berarti al-ulfah (kecondongan atau kasih sayang) dan (nun) berarti annur (cahaya atau menerangi).

Jadi bulan Sya'ban dapat diartikan sebagai jalan di gunung yaitu jalan yang baik. Sementara itu, bulan Sya'ban dalam bahasa Arab berasal dari kata syi'ab yang artinya jalan di atas gunung. Islam kemudian memanfaatkan bulan Sya'ban sebagai waktu untuk menemukan banyak jalan, demi mencapai kebaikan.

Bulan Sya'ban berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadhan. Karena diapit oleh dua bulan mulia ini, maka Sya'ban seringkali dilupakan. Padahal semestinya tidaklah demikian.

Bulan Sya'ban merupakan bulan, yang dimana kita sebagai umat Islam mempersiapkan diri dan pemanasan sebelum menghadapi datangnya bulan suci Ramadhan.

Sebagai bulannya Nabi Muhammad SAW, menghadiahkan shalawat di bulan Sya'ban kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah sebuah keharusan. Dengan meninggikan nama Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti perintah Allah SWT yang telah meninggikan nama Muhammad SAW.

Dengan memperbanyak membaca

shalawat di bulan Sya'ban, sebagai umat Islam, kita selalu berharap Nabi Muhammad SAW akan menyukai dan senang dengan yang kita lakukan. Dan insyaAllah di hari kiamat kelak, kita akan mendapatkan syafaatnya.

Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki menegaskan, bahwa membaca shalawat merupakan salah satu anjuran yang baik, karena turunnya ayat tentang anjuran bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW, terdapat dalam Al Quran surat Al Ahzab ayat 56: "Sungguh Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, shalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya."

Ibnu Hajar al Asqalani dan Ibnu Abi Shai Al Yamani mengatakan, bahwa ayat tersebut di atas turun pada bulan Sya'ban



tahun kedua hijriyah dan menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan shalawat, dikarenakan pada bulan Sya'ban inilah ayat tentang perintah anjuran shalawat diturunkan.

Pendapat tersebut dikuatkan oleh pendapat Imam Syihabuddin Al Qasthalani dalam Kitabnya Al Mawahib.

Bulan Sya'ban memiliki banyak keutamaan. Di antaranya yang paling utama adalah terjadinya dua peristiwa penting, yang menjadi perhatian para ulama.

Peristiwa penting yang pertama adalah peralihan kiblat dari Masjidil Aqsha ke Masjidil Haram, yang terjadi pada bulan Sya'ban.

Imam Al-Qurthubi ketika menafsirkan surat Al Baqarah ayat 144 dalam kitab Al Jami' li Ahkamil Qur'an dengan mengutip pendapat Abu Hatim al-Basti mengatakan, bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengubah kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban, yang bertepatan dengan malam Nisfu Sya'ban (tanggal 15 bulan Sya'ban).

Kemudian peristiwa penting yang kedua adalah penyerahan catatan amal manusia, dimana pada bulan Sya'ban semua amal manusia diserahkan kepada Allah

SWT. Peristiwa ini dikenal dengan nama Nisfu Sya'ban dan disebut juga sebagai salah satu Hari Raya Malaikat.

Sementara itu, Imam Al Ghazali menerangkan, bahwa semua dosa selama setahun dihapus di malam tersebut. Nisfu Sya'ban disebut juga sebagai 'Laylah al Syafa'ah (malam syafaat)", sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW memohon syafaat untuk umatnya kepada Allah SWT pada malam ke 13, malam ke 14, dan malam ke 15 di bulan Sya'ban.

Rasulullah SAW bersabda: "Allah mengampuni dosa hamba-hambanya pada malam Nisfu Sya'ban kecuali dosa orang musyrik dan orang yang bermusuhan".

Bulan Sya'ban juga disebut juga sebagai 'Laylah al ithq (malam pembebasan), sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Ishaq dari Anas ibn Malik, dari Aisyah ra, ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW berdoa meminta kepada Allah kebersihan hati dari perbuatan syirik, kufur.

Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki mengutip sebuah hadits riwayat An Nasa'i, yang meriwayatkan dialog antara Usamah bin Zaid dan Nabi Muhammad

SAW: "Wahai Nabi, aku tidak melihatmu berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban? Kemudian Rasulullah SAW menjawab: Banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban. Pada bulan itu semua amal diserahkan kepada Allah SWT. Dan aku suka ketika amalku diserahkan kepada Allah, aku dalam keadaan puasa."

Bulan Sya'ban adalah bulan yang biasa dilupakan orang, karena letaknya antara bulan Rajab dengan bulan Ramadhan. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal. Karenanya, aku menginginkan pada saat diangkatnya amalku, aku dalam keadaan sedang berpuasa (HR Abu Dawud dan Nasa'i).

Dua peristiwa penting itulah, di antaranya yang menjadikan bulan Sya'ban disebut juga dengan bulan puasa sunnah.

Dalam bulan Sya'nam ini, berdasarkan riwayat Aisyah ra (radhiallahu anha), Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah. Bahkan beliau hampir berpuasa satu bulan penuh, kecuali satu atau dua hari di akhir bulan saja, agar tidak mendahului Ramadhan dengan satu atau dua hari puasa sunnah. ♦



HUKUM TRANSFUSI DARAH DARI NON-MUSLIM

Mengonsumsi darah diharamkan dalam Islam. Lantas, bagaimana dengan transfusi darah, sebab darah bukan lagi dikonsumsi, melainkan langsung masuk ke dalam jaringan tubuh manusia?

Kemudian, bagaimana pula dengan transfusi darah dari orang yang non muslim, yang segala produk yang dikonsumsi, mungkin juga termasuk produk atau bahan pangan yang jelas diharamkan dalam Islam, seperti Babi, Miras, dan sebagainya.

Sedangkan dalam sebuah riwayat hadits bahwa setiap anggota tubuh yang tumbuh dari yang haram, atau produk yang haram, maka neraka akan menjadi tempat yang layak baginya. Lantas, bagaimana sebenarnya hukum transfusi darah dari non muslim?

Dikutip dari laman HalalMUI, Allah SWT berfirman dalam Al Quran, yang secara tegas mengharamkan darah. Di antaranya dalam Surat Al Maidah 5:3, yang artinya:

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah..." (Q.S. Al-Maidah, 5:3).

Dari ayat tersebut, bahwa konteks keharaman darah yang ditegaskan dalam ayat Al Quran tersebut adalah mengkonsumsinya. Dan darah yang diharamkan itu adalah darah "Ad-Daamul-Masfuh", yaitu darah hewan yang memancar atau mengalir ketika disembelih.

Kategori ini disebutkan dalam ayat Al Quran yang artinya: "Katakanlah: "Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi..." (QS. Al An'am 6 : 145)

Seperti diketahui, sebagian orang, darah dari hewan sembelihan ditampung lalu diolah menjadi makanan "Dadih" atau "Marus", atau yang semacam itu, yang kemudian dimakan, dikonsumsi manusia. Nah, darah jenis seperti itu yang diharamkan.

Hal ini perlu ditegaskan, karena Rasulullah SAW mengecualikan dua macam darah yang diperbolehkan bagi umatnya, sebagaimana Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw bersabda: "Dihalalkan bagi kami dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan dua macam darah itu adalah hati dan limpa." (H.R. Imam Ahmad, dan Ibnu Majah).

Sedangkan untuk transfusi darah, sep-

erti dilansir dari laman Kemenag, menurut ulama yang tergabung dalam Darul Ifta Mesir, bahwa dalam ajaran Islam tidak ada larangan menerima transfusi darah dari umat non muslim. Apalagi jika darah tersebut, sangat dibutuhkan untuk pengobatan, maka hukumnya diperbolehkan. "Permasalahan; Apakah boleh non muslim mendonorkan darahnya untuk muslim yang sedang sakit, atau tidak? Jawaban dari itu adalah bahwa tidak ada larangan bagi non muslim untuk mendonorkan darahnya pada seorang muslim yang sedang sakit. Hal ini, dikarenakan tidak dilakukan, kecuali karena adanya kebutuhan, baik darah tersebut berasal dari orang muslim maupun dari non muslim. Menerima donor darah dalam keadaan ini, menurut para ulama hukumnya boleh karena mendesak."

Sementara itu, Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Shahih Muslim, juga menerangkan bahwa tubuh dari non muslim sejatinya adalah suci, tidak najis. Terkait ayat yang mengatakan bahwa non muslim adalah najis, yang dimaksud ayat itu adalah aqidah mereka.

Imam Nawawi berkata; "Imam Bukhari menyebutkan dalam Shahih Bukhari, bersumber dari Ibnu Abbas secara mu'allaq; Muslim tidaklah najis baik hidup dan matinya. Ini adalah hukum untuk orang muslim. Adapun hukum status orang kafir, maka hukum dalam masalah suci dan najisnya adalah sama dengan hukum seorang muslim (maksudnya suci).

Pendapat tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama salaf maupun khalaf.

Firman Allah dalam Al Quran, yang artinya; (Sesungguhnya orang musyrik itu najis) maksud ayat tersebut adalah najisnya aqidah yang kotor, bukan maksudnya anggota badannya najis seperti najisnya kencing, kotoran, dan sebagainya.

Jika sudah pasti kesucian manusia, baik dia muslim atau kafir, maka keringat, ludah, darah, semuanya suci, sama saja, apakah dia sedang berhadats, atau junub, atau haid, atau nifas. Semua ini adalah ijma' kaum muslimin sebagaimana penjelasannya dalam Bab Haid.

Transfusi darah dengan memakan (mengonsumsi) darah, sangatlah berbeda, karena transfusi darah adalah menyalurkan darah dari donor (pemberi) kepada penerima.

Selain itu, hal tersebut dilakukan dalam kondisi darurat, umumnya adalah sebagai upaya pengobatan untuk menyelamatkan jiwa yang terancam, hidup atau mati.

Tentang hal tersebut, berlaku kaidah Fiqhiyyah yang menyebutkan: *Adh-Dharuratu Tubihul-Mahzhurat*, artinya "dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang, diperbolehkan".

Selain itu, ada pula kaidah Fiqhiyyah: *"Maa hurrima li dzatihi, ubiha lid-dhoruroh"*, apa-apa yang dari sisi dzatnya haram, maka dalam keadaan darurat

menegaskan, akan larangan mengonsumsi produk, makanan maupun minuman yang haram, namun tidak berkaitan langsung dengan praktek transfusi darah.

Dari sisi makna, hadits tersebut termasuk ke dalam *Tadzkiroh* yang bersifat *Tarhib*, atau peringatan yang menakutkan dengan ancaman siksa yang berat, supaya tidak mendekati apalagi melakukan yang haram, dan karenanya harus ditinggalkan.

Namun alangkah baiknya, harus dihindari transfusi darah dari non Muslim

perbuatan yang haram, atau larangan mengonsumsi yang haram. Siapa yang melakukan perbuatan itu, maka dialah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Atau orang yang melanggar larangan yang disebutkan dalam hadits tersebut, maka dialah yang berdosa, bukan orang lain, sekalipun sebagai penerima darah yang didonorkan oleh si pelaku dosa. Hal itu ditegaskan lagi dalam ayat: "Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Q.S. Al Isra 17:15).

Begitu pun dalam konteks transfusi



menjadi boleh.

Dengan demikian maka transfusi darah itu hukumnya boleh, atau bahkan sangat diperlukan dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan hidup bagi orang yang memerlukannya.

Sementara itu, mengenai darah non Muslim. Dalam hal ini, tidak ada pemisahan antara darah seorang Muslim ataupun non Muslim. Memang ada Hadits Nabi SAW yang menyatakan: "Setiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram, maka api neraka lebih utama baginya (lebih layak membakarnya)." (H.R. At Thabrani).

Maksud hadits tersebut adalah untuk

sebisanya mungkin. Sebagai orang beriman, semua umat Muslim itu bersaudara, maka tentu sangat diutamakan agar bisa saling membantu, dalam aspek transfusi darah itu, dengan sesama saudara.

Firman Allah dalam Al Quran surat Al Hujurat, telah menegaskan tentang hal tersebut, yang artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (Q.S. Al Hujurat 49: 10).

Selain itu, hadits tersebut (HR At Thabrani) mengandung makna yang menegaskan tentang larangan melakukan

darah dari non muslim ini, sebagai contoh analogi, kalau ada yang mendonorkan (bola) matanya, maka si penerima donor mata itu, tidak akan menanggung dosa mata, yang dilakukan oleh si pemberi donor tersebut, seperti dosa karena melihat-lihat hal-hal yang dilarang dalam agama.

Secara tegas, bahwa masalah dosa atau pahala itu, terkait erat dengan diri pelaku. Dalam hukum Islam, sangat jelas, siapa yang berbuat, maka dialah yang bertanggung-jawab.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum transfusi darah dari non muslim hukumnya diperbolehkan dalam Islam. Wallahu a'lam. ♦



PAUL POGBA TERLAHIR NON MUSLIM WALAU IBUNYA BERAGAMA ISLAM

Kini, Dia Tetap Puasa sekalipun Sedang Bertanding di Bulan Ramadan

Ayah sudah meninggal, Subhanallah, saya bahagia karena beliau mengucapkan Syahadat sebelum wafat.

Ramadan merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia, tak terkecuali Paul Pogba (31). Sang mega bintang sepakbola internasional asal Prancis ini dikenal sebagai sosok yang sangat religius. Padahal, ia terlahir sebagai seorang Nasrani pada 15 Maret 1993 di Lagny-sur-Marne, Prancis.

Negara Prancis memang tidak melarang pernikahan beda agama. Karena itu, Yeo Moriba Pogba yang beragama Islam bisa menikah dengan Fassou Antoine Pogba yang beragama Kristen. Soal agama anak-anak, Yeo Moriba Pogba dan Fassou Antoine Pogba sepakat bahwa anak pertama mengikuti agama sang ibu. Lalu anak kedua mengikuti agama ayahnya.

Ternyata, anak pertama pasangan ini lahir kembar. Mereka adalah Florentin

Pogba dan Mathias Pogba. Paul Pogba sendiri ketika lahir sudah diberi status beragama Kristen dan diberi nama Paul La-bile Pogba.

Dalam mendidik ketiga putranya, Yeo memberikan kasih sayang dan pengajaran yang sama. Hanya saja ketika Florentin dan Mathias dididik untuk melaksanakan ajaran Agama Islam, Paul Pogba kecil dikesualikan. Ia tidak dipaksa untuk mengikuti, tetapi boleh mendengar dan memperhatikan.

Karena dididik sang bunda bersama dua kakaknya secara Islam, Pogba kecil sebetulnya tidak begitu apakah ia non Muslim atau Muslim. Di usia remaja, barulah batinnya mempersoalkan itu. Ibu adalah inspirasinya. Tapi ibunya beragama Islam sedangkan dia tidak.

Di luar keluarganya, ia berteman den-

gan remaja-remaja Muslim lainnya. Sehingga Pogba lebih banyak lagi mengenal agama Islam. Namun, ia baru resmi menjadi muallaf pada 2013 di saat dirinya berusia 20 tahun.

Begitu resmi menjadi muallaf, Pogba dikenal begitu taat dalam ibadah. Ia terlihat selalu berdoa di lapangan saat menjelang dan setelah pertandingan. Di tengah kesibukannya latihan ataupun menjelang pertandingan, Pogba tetap melaksanakan shalat 5 waktu. Tak pernah ia tinggalkan kendati waktunya mepet sekalipun.

Datangnya bulan Ramadhan selalu disambut Pogba dengan sukacita. Ia akan tetap berpuasa kendati tengah menjalani latihan berat atau bahkan bertanding sekalipun.

Saat para pesohor dunia menikmati liburan ke berbagai destinasi wisata terk-

enal, Pogba justru memilih untuk melaksanakan ibadah Umrah di Makkah, Arab Saudi. Ia memanfaatkan waktu liburnya beribadah umrah di Kota Makkah dan berziarah ke Kota Nabi Muhammad SAW, Madinah.

Ibadah haji perdana dijalani Pogba pada 2016, tiga tahun setelah ia resmi menjadi mualaf. Pada 2020, ia menyentak publik sepakbola dunia. Saat konferensi pers Piala Eropa 2020 itu, Pogba terlihat menggeser botol Heineken Beer dari hadapannya.

Tentu saja itu dipersoalkan. Namun Paul Pogba dengan mantap mengatakan, bir dan minuman beralkohol lainnya haram bagi Muslim.

Fans yang beruntung juga bisa menyaksikan Paul Pogba shalat Jumat di kota-kota di mana ia tengah berada. Karena sebagai Muslim yang taat, Pogba memang tak pernah mau meninggalkan Shalat Jumat walau sekalipun.

Dituduh Melakukan Doping, Pogba Berjuang Keras

PAUL Pogba tengah dalam masalah besar saat ini, dalam posisinya sebagai pemain Juventus dan Tim Nasional (Timnas) Prancis. Ia dituduh menggunakan doping sehingga terancam larangan bermain selama 4 tahun.

Pogba sendiri masih dalam proses penyembuhan cedera saat bermain di Juventus Oktober tahun lalu. Sejak itu ia sudah tidak bermain lagi, selain cedera juga karena tuduhan doping.

Pogba tegas-tegas membantah dirinya menggunakan doping. Rekan-rekannya membela dia. Menurut mereka, tidak mungkin Pogba secara sengaja menggunakan doping. Dikabarkan, Pogba kini berjuang sendiri untuk melawan tuduhan, yang bila dinyatakan terbukti maka karirnya akan tamat.

Tapi para pengamat sepakbola melihat, Klub-klub di Arab Saudi Pro League bisa saja mengontrak Pogba. Di samping dia memang pemain sepakbola yang hebat, bahkan dijuluki Gelandang Terbaik Dunia, Pogba juga beragama Islam secara taat.

Tapi bagi Pogba, tidak ada persoalan berat. Ia pernah mengaku bahwa seberat apapun masalah hidupnya, ia berserah kepada Allah SWT. Tentu saja hal itu yang dilakukannya saat ini, saat ketika ia dihadapkan dengan persoalan hidup mati karirnya

di sepakbola Eropa.

"Islam adalah segalanya. Itu membuat saya bersyukur atas segalanya," tutur Pogba ketika ditanyakan tentang arti menjadi muslim dalam sebuah podcast bernama Life Time pada 2019 silam.

Dalam satu kesempatan, Pogba juga mengaku menjadi lebih tenang setelah mengenal Islam. Dia juga menjelaskan tentang ibadah salat lima waktu yang menjadi



momen dirinya meminta pengampunan serta bersyukur.

"Islam membuat saya berubah, menyadarkan dari segalanya dalam hidup. Islam membuat saya merasa lebih damai. Ini perubahan yang bagus dalam hidup saya," akunya.

"Sejak saat itu, saya tak pernah berhenti. Saya berdoa lima kali sehari, karena itu adalah salah satu pilar Islam. Alasan saya melakukannya adalah untuk meminta pengampunan dan bersyukur atas segala yang saya miliki," kata Pogba.

Lega, Ayahandanya Wafat dalam Status Muslim

PAUL Pogba telah meraih segalanya dari bakat, kepandaian, dan ketekunannya bermain sepakbola. Capaian berupa

popularitas, harta, istri cantik Maria Zulay Pogba, dan seorang anak yang cerdas dan sehat telah dimilikinya. Semua itu sangat dia syukuri.

Bersyukur, menurut Pogba, adalah melaksanakan semua perintah Agama Islam dan menjauhi semua larangannya. Itu yang ia jalani dalam kesehariannya sebagai ungkapan syukur atas semua kebaikan yang telah diberikan Allah SWT kepadanya.

Tak ada yang kurang dalam kehidupannya. Ibundanya Yeo Moriba Pogba adalah muslimah yang taat beragama. Dua kakaknya, Florentin Pogba dan Mathias Pogba, juga beragama Islam. Bagaimana dengan ayahandanya Fassou Antoine Pogba? Saat menikah dengan Yeo Moriba Pogba, ia beragama Kristen.

Sang ayah tetap beragama Kristen, bahkan hingga Pogba menjadi mualaf. Hal itu yang membuat bintang sepakbola yang berjuluk gelandang terbaik dunia ini risau. Ia ingin ayahnya Muslim seperti seluruh anggota keluarganya.

Akhirnya, impian itu jadi kenyataan; Ayahanda Pogba masuk Islam. Ia wafat sebagai seorang Muslim.

Rasa bangganya itu ia ungkapkan ketika menjadi bintang tamu di sebuah acara televisi. Paul Pogba mengatakan rasa syukur karena ayahnya wafat dalam keadaan Islam.

"Ayahku meninggal dunia, subhanallah, dan dia sudah masuk Islam sebelum wafat," kata Paul Pogba seperti dikutip dari short video YouTube Ustadz Patrick.

Pogba telah menunaikan ibadah haji pertamanya pada 2016, tiga tahun setelah dirinya mualaf. Sejak itu ia rajin melaksanakan umrah dan juga haji. Sebagai warga negara Prancis, tidak sulit bagi Pogba untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak ada waiting list seperti di Indonesia.

Pogba memanfaatkan waktu-waktu liburnya untuk umrah baik bersama keluarga atau bersama teman-temannya. Di samping melakukan ibadah untuk dirinya, Pogba melakukan Badal Haji dan Badal Umrah untuk ayahandanya.

"Inilah indahnya Islam. Karena ketika seorang Muslim meninggal, kamu bahkan bisa berhaji atau umrah untuk orang yang mati," ujar Paul Pogba.

"Jadi bayangkan, kamu bisa mendapatkan kebaikan dan segalanya ketika kamu tidak ada lagi di dunia ini," tambahny. ♦

MUALAF, SELVI ANANDA BUKTIKAN KETULUSAN CINTANYA

Ketua TP PKK Kota Solo yang Beranjak Menuju Istana

Selvi Ananda membuat Gibran Rakabuming Raka jatuh cinta pada pandangan pertama di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 2009. Lalu 14 tahun kemudian, tepatnya sejak Oktober 2023, Selvi mendadak menjadi perhatian publik di Tanah Air maupun di mancanegara.

Karena saat partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia (KIM) mendeklarasikan Capres-Cawapres 2024 adalah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Selvi mendampingi sang suami. Sejak hari itu pula, istri Wali Kota Solo sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kota Solo ini selalu mendampingi suaminya, Gibran dalam berkampanye.

Publik seantero negeri langsung jatuh hati padanya. Karena kecantikan, kesopanan dan keramahan serta kerendahan hati bersatu padu dalam diri Selvi Ananda, Putri Solo 2009. Dan, memang begitulah keseharian Selvi. Dia tidak pernah bersikap bossy.

Gaya hidup bersahaja Selvi tidak berubah dari masa kecil hingga remaja dan kini ketika ia sudah menjadi istri orang nomor satu di Kota Solo sekaligus menantu orang nomor satu di Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kendati sesekali ia mengenakan busana atau sepatu atau tas branded, Selvi tetap terlihat wajar. Dalam kedudukannya saat ini, sesekali mengenakan barang mewah tidak membuatnya terlihat lebay apalagi angkuh.

Siapa sebenarnya Selvi sebelum jadi menantu Presiden Jokowi? Selvi ada - lah

Putri Solo ketika Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo. Gibran dalam satu wawancara di televisi mengaku, dirinya langsung kagum begitu melihat salah satu peserta Pemilihan Putri Solo 2009, Selvi Ananda, yang begitu cantik sekaligus pintar.

"Wow, cantik! kata saya dalam hati. Ini mesti dimenangkan," kata Gibran bercanda dengan presenter acara tersebut.

Ternyata, semua juri selain Gibran juga memberikan nilai tertinggi kepada Selvi Ananda, sehingga ia dinobatkan jadi Putri Solo. Ketua TP PKK Kota Solo saat itu, Iriana Joko Widodo pun terkesan dengan kecantikan dan sikap anggun serta sopan Selvi.

"Ini cocok dijadikan mantu," kata Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam satu wawancara di mana ia diminta menceritakan bagaimana dirinya pertama kali bertemu Selvi Ananda.

Kendati sama-sama orang Solo, Gibran dan Selvi tidak langsung bisa pacaran di Solo. Sebab Gibran usai menjadi juri, kembali ke Singapura di mana ia kuliah.

Keduanya baru bertemu

kembali pada 2010

saat Wali Kota Solo melakukan muhibah perdagangan dan kebudayaan ke Singapura, dan Gibran menjadi "pemandu".

Eh, Selvi sebagai Putri Solo, ikut dalam delegasi tersebut.

Saat di
Sin -

gapura itulah, keduanya resmi mengikat cinta, pacaran. Mereka terbilang cukup lama pacaran, 5 tahun lebih. Setelah pacaran sejak 2010, Selvi dan Gibran menikah pada 11 Juni 2015.

Ternyata, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo sempat menolak bermenantukan Selvi. Mereka suka kepribadian gadis cantik ini. Tetapi tersandung masalah perbedaan agama. Selvi adalah non Muslim, sehingga tidak diterima untuk menjadi menantu Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana saat itu.

Selvi dengan tulus dan atas kemauan sendiri pada 20 Februari 2015 resmi jadi mualaf. Ia mengucapkan Kalimat Syahadat di Masjid Istiqlal Jakarta dengan bimbingan Takmir Masjid Istiqlal. Empat bulan kemudian, 11 Juni 2015 Selvi dan Gibran menikah secara Islam di Kota Solo.

Kendati Hadir, Ignatius Didit Tak Nikahkan Selvi

SELVI Ananda lahir di Kota Solo pada 9 Januari 1989, putri pasangan Ignatius Didit Supriyadi dan Fransiska Sri Partini. Ia anak kedua dan kakaknya bernama Dita Andini. Kendati bungsu dari dua bersaudara, Selvi sejak kecil sudah biasa membantu orangtuanya. Ia biasa membantu menjaga warung milik ayah bundanya.

Berbagai usaha pernah digeluti pasangan Didit dan Fran -



siska sampai akhirnya mereka membuka usaha restoran, dengan menu utama Ayam Goreng. Restoran ini laris. Selvi sendiri di samping tekun belajar, rajin pula cari uang. Ia bahkan menjadi penyiar di stasiun televisi lokal Solo.

Saat siaran di TATV, Selvi menggunakan nama layar Selvy Ashyra. Dengan profesinya sebagai presenter televisi, Selvi menjadi salah satu public figure di Kota Solo. Ia pun ikut Pemilihan Putra Putri Solo 2007, tapi tereliminasi di babak-babak awal.

Selvi tak patah arang dengan kegagalan itu. Pada 2009, ia kembali mengikuti Pemilihan Putra Putri Solo, sehingga akhirnya menang dan dinobatkan menjadi Putri Solo 2009. Sebagai keluarga yang sangat solid, Didit bersama Fransiska dan Dita Andini menyambut gembira keberhasilan si bungsu itu.

Dan seiring waktu berjalan, ternyata kemenangan sebagai Putri Solo 2009 tersebut menjadi awal kehidupan Selvi di fase dewasa. Selvi begitu disayang oleh kedua orangtua dan kakaknya. Ia sangat dekat dengan kakaknya Dita Andini. Kemana-mana selalu bersama dengan Dita, sebelum sang kakak menikah.

Selvi sendiri setelah mualaf pada 20 Februari 2015 di Masjid Istiqlal Jakarta, 11 Juni 2015 menikah secara Islam di Kota Solo. Akad nikah dan resepsinya berlangsung sangat meriah.

Ayah dan bundanya hadir pada akad nikah Selvi Ananda dan Gibran Rakabuming Raka. Namun saat ijab qabul sang putri, Ignatius Didit Supriyadi hanya menyaksikan. Ia tidak bisa menikahkan putrinya, karena ia non Muslim. Akad Nikah Selvi dan Gibran digelar secara Islam.

Selvi dinikahkan oleh wali hakim yang ditunjuk ayahandanya yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Mukhtaraji.

Tak ada bias kecewa atau sedih di wajah Ignatius Didit Supriyadi dan Fransiska Sri Partini saat menyaksikan akad nikah Selvi dan Gibran. Karena keduanya tulus melepas Selvi memilih Agama Islam. Didit dan Fransiska bersama Dita Andini tidak menghalangi Selvi, ketika ia menyatakan niatnya untuk memeluk Agama Islam.

Selalu Setia Mendampingi Suami tanpa Peduli Rasa Lelah

INSYA Allah, istri Wali Kota Solo Selvi

Ananda akan berubah status menjadi istri Wakil Presiden Republik Indonesia mulai 20 Oktober 2024. Sejak hari pelantikan itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan istrinya Selvi Ananda bersama putra mereka Jan Srinarendra dan Lalembah Manah bisa tinggal di Istana Wakil Presiden RI.

Jika merunut kembali perjuangan Gibran bersama Selvi, seluruh rakyat Indonesia pasti paham bagaimana kesibukan

Solo 2009. Keluwesan dan keramahannya memang luar biasa.

Walaupun sigap dan setia mendampingi Gibran kemanapun pergi, Selvi sebenarnya merupakan ibu yang mengasuh langsung dua anaknya. Hanya pada saat-saat mendesak seperti ini, ia akan pergi bersama Gibran tanpa menyertakan anak-anak.

Dua anaknya adalah Jan Ethes Srinarendra yang lahir pada 10 Maret 2016.



mereka berdua saat kampanye. Ke mana pun Gibran pergi, Selvi setia mendampingi. Padahal pergi bersama Gibran berarti menikmati perjalanan sangat sederhana.

Ya. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini tidak pernah menggunakan penerbangan berkategori mewah. Ia memilih terbang dengan Lion Air dan Kelas Ekonomi pula. Namun demikian, Selvi tak pernah menampakkan kelelahannya. Ia selalu tampil manis dengan senyum. Terlihat penuh perhatian, dan sangatsigap.

Tak salah jika Selvi sangat charming dan memikat hati masyarakat yang melihatnya. Dia merupakan Duta Pariwisata Kota Solo saat menyandang gelar Putri

Anak kedua adalah Lalembah Manah yang lahir di pada 15 November 2019 di RS PKU Muhammadiyah Solo.

Sisi lain dari Selvi, ia tetap menjalin kebersamaan dengan kedua orangtuanya. Selvi bersama Gibran dan anak-anak mereka selalu hadir saat ayah dan bundanya merayakan Natal. Namun keutuhan kebersamaan mereka saat orangtuanya merayakan Natal hanya berlangsung beberapa kali.

Ayah Selvi, Ignatius Didit Supriyadi meninggal dunia pada April 2018. Sejak itu, Selvi bersama keluarga dan kakaknya Dita Andini bersama keluarga selalu mengunjungi ibunya Fransiska Sri Partini pada Hari Natal. ♦

MENU SAHUR YANG SEHAT BIKIN PUASA BERKUALITAS

Harus mengandung Karbohidrat, Protein, Vitamin, dan Mineral

Marhaban ya Ramadhan. Bulan yang penuh maghfirah telah tiba. Mari berpuasa dengan sehat dan gembira.

Puasa menjadi nyaman dan menyenangkan sangat ditentukan oleh makanan yang dikonsumsi saat sahur. Pilihan menu sahur yang tidak tepat dapat memicu naiknya asam lambung atau memicu dehidrasi, bikin tubuh lemas, dan berbagai keluhan lainnya.

Selain menu, sahur sehat juga ditentukan oleh waktunya. Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengakhirkan makan sahur, tapi bukan berarti sudah mepet ke waktu Imsak. Makan sahur harus dalam keadaan santai. Dengan demikian, makanan terakhir sahur bisa disantap mendekati Imsak.

Kembali ke menu. Sahur harus terdiri dari menu yang memberikan energi cukup agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara optimal. Untuk itu diper-

lukan menu sahur yang memenuhi kebutuhan gizi terdiri dari Karbohidrat, Protein, Vitamin, dan Mineral.

Kesimpulannya; jangan sepelekan Sahur jika ingin puasa berkualitas. Sahur yang baik dan tepat waktu menjadikan tubuh tetap sehat dan nyaman menjalankan ibadah Puasa, aktivitas sehari-hari tidak terganggu.

INILAH 5 MENU SAHUR YANG SEHAT:

1. Air Putih

Minum air putih yang cukup saat sahur sangat perlu agar tidak terjadi dehidrasi. Di bulan puasa, kecukupan asupan air putih minimal 2 liter sehari harus dipenuhi dalam kurun berbuka puasa hingga sahur.

Cukupnya asupan air putih itu

mencegah dehidrasi yang menyebabkan tubuh terasa lemas dan mudah lelah selama berpuasa.

2. Buah-buahan

Dianjurkan mengonsumsi buah-buahan segar di waktu sahur. Tidak usah dijus, makan saja buah segar tersebut secara langsung. Pilih buah yang disukai. Semangka, Apel, Pisang, Pepaya, Melon, Pear, Jambu Biji, Al Pukat.

Buah-buahan ini memiliki kandungan vitamin dan mineral yang tinggi sehingga mampu menjaga daya tahan tubuh. Buah segar ini juga mengandung banyak air yang dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh selama berpuasa.

3. Sup Sayur atau Sayur Bening Bayam dan Jagung

Sup Sayur dikonsumsi waktu sahur



dapat membantu menjaga kesehatan tubuh selama berpuasa. Karenakan Sup Sayur terbuat dari berbagai macam jenis sayuran, seperti wortel, kentang, kembang kol, dan brokoli, yang memiliki kandungan serat tinggi.

Selain dapat memelihara kesehatan saluran cerna, Sup Sayur ini membuat tubuh merasa kenyang lebih lama.

Selain Sup Sayur, bisa juga dipilih menu Sayur Bening Bayam dan Jagung. Bahannya mudah didapat, praktis dan cepat memasaknya, Sayur Bening Bayam dan Jagung mencegah kita mengalami lemas saat berpuasa.

Alasannya, bayam dan jagung merupakan sumber serat yang baik untuk tubuh. Makanan yang mengandung serat tinggi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dicerna oleh usus sehingga dapat menimbulkan efek kenyang lebih lama dan membuat energi di dalam tubuh tidak cepat berkurang.

Tak hanya itu, mengonsumsi makanan yang mengandung banyak air, termasuk sayur bening bayam dan jagung, dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh.

4. Makanan Berprotein Tinggi

Makanan berprotein tinggi juga direkomendasikan sebagai menu sahur sehat karena dapat membantu membangun serta memperbaiki jaringan di dalam tubuh.

Sejumlah makanan yang mengandung protein tinggi di antaranya susu, telur, daging ikan, daging ayam, dan daging sapi.

Namun, sebelum mengolah daging-dagingan, Anda disarankan untuk membuang lemak yang masih menempel agar tidak memicu peningkatan kadar kolesterol jahat (LDL) di dalam tubuh.

Semur Daging bisa menjadi pilihan. Karena praktis sekali cara memasaknya.

sebagai makanan protein tinggi, daging membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna. Karena itu kita menjadi kenyang lebih lama dan lebih bertenaga.

Nutrisi lain yang terkandung dalam daging, seperti zinc, zat besi, fosfor, vitamin B6, dan vitamin B12, juga bisa membantu Anda kuat menjalani puasa sehari-hari.

5. Karbohidrat Kompleks

Karbohidrat kompleks merupakan makanan sehat untuk sahur yang dapat menjaga tubuh agar tetap berenergi selama menjalani puasa.

Karbohidrat kompleks akan dicerna secara perlahan yang membuat tubuh

merasa kenyang lebih lama.

Adapun beberapa jenis karbohidrat kompleks yang mudah disiapkan dalam menu sahur sehat di antaranya, oatmeal, gandum utuh, nasi (beras) merah, dan ubi jalar.

Agar lebih sehat, karbohidrat kompleks ini dapat dimasak atau diolah dengan cara direbus atau dikukus.

Yang paling dianjurkan adalah beras merah yang diolah menjadi nasi tim. Karena menambah pasokan energi untuk tubuh, juga memberikan efek kenyang lebih lama.

Karena makanan berkarbohidrat kompleks memerlukan lebih banyak waktu untuk dicerna oleh tubuh.

6. Lemak Sehat

Lemak merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan oleh tubuh sebagai cadangan energi. Karena itu, tak ada salahnya



ya untuk mengonsumsi lemak sehat secukupnya saat sahur guna memenuhi kebutuhan energi tubuh.

Adapun beberapa jenis makanan yang mengandung lemak sehat dan dapat dihidangkan dalam menu sahur sehat adalah buah alpukat, ikan, yogurt, minyak zaitun, dan kacang-kacangan.

7. Kacang-Kacangan

Kacang-kacangan, seperti kacang

merah dan kacang kedelai, direkomendasikan sebagai hidangan sahur sehat karena kaya akan serat dan protein sehingga mampu mengontrol nafsu makan selama berpuasa.

Kacang-kacangan juga mengandung polifenol yang dapat menjaga tubuh dari radikal bebas serta menurunkan risiko berbagai macam penyakit kronis.

Kacang-kacangan ini dapat Anda jadikan sebagai camilan setelah mengonsumsi hidangan utama saat sahur.

SAHUR, HINDARI MINUM KOPI DAN TEH

Makanan yang Sebaiknya Dihindari dalam Menu Sahur

Kopi dan teh serta minuman soda, jangan dikonsumsi saat sahur ya. Karena memang kita dianjurkan untuk membatasi konsumsi beberapa jenis makanan yang

dapat memicu rasa lapar selama berpuasa, seperti:

- ▶ Makanan yang mengandung karbohidrat rafinasi, seperti roti, pasta, dan kue.
- ▶ Kopi dan teh karena mengandung kafein yang dapat memicu dehidrasi.
- ▶ Makanan atau minuman yang mengandung gula tinggi.
- ▶ Makanan yang diolah dengan cara digoreng. ♦

PRABOWO MENANGI PILPRES 2024, PILKADA SUMSEL JADI SERU

Mawardi Yahya akan Head to Head dengan Herman Deru

Sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumatera Selatan (Sumsel), Mawardi Yahya puas dengan perolehan suara Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang lebih dari 65 persen di seluruh wilayah Provinsi Sumsel. Capaian itu jauh di atas perolehan suara nasional Prabowo-Gibran yaitu 58 persen lebih.

Kegembiraan itu diungkapkan Wakil Gubernur Sumsel Periode 2018-2023 ini usai menyaksikan hasil Quick Count Pilpres pada 14 Februari 2024. Kerja keras semua pihak yang terlibat diakuinya telah membuahkan hasil memuaskan. Sumsel menjadi salah satu daerah penyumbang suara signifikan bagi kemenangan Prabowo-Gibran satu putaran.

Di samping sosok Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memang mampu menarik hati masyarakat Sumsel, kampanye yang dilancarkan TKD pimpinan Mawardi Yahya terbukti jitu. Pada Minggu 21 Januari 2024, TKD memberi makan gratis bagi para pengunjung di Kambang Iwak Palembang.

TKD Sumsel Pasangan Nomor Urut 02 ini memborong semua makanan yang dijual 52 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mangkal di Kambang Iwak Palembang. Dengan itu, semua pengunjung dipersilakan

menyantap makanan tersebut gratis. Para pedagang dan pengunjung Kambang Iwak Palembang pun sangat berterima kasih dengan Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran.

Kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, oleh para pengamat, dinilai akan berpengaruh besar pada peta politik di Provinsi Sumsel khususnya Pilkada Serentak 2024. Mawardi Yahya sebagai salah satu petinggi di DPP Partai Gerindra, hampir dapat dipastikan akan dimandati mencalonkan diri pada Pemilihan Gubernur Sumsel nanti.

Saat itu ditanyakan padanya, Mawardi Yahya tidak secara eksplisit menyatakan dirinya maju ke Pilkada Provinsi Sumsel 2024. Namun secara implisit terbaca dari ucapannya bahwa dirinya siap maju.

Publik memahami sikap santun Mawardi Yahya dalam berpolitik. Ia memang belum pernah menyatakan dirinya akan maju di Pilkada Provinsi Sumsel sebagai Calon Gubernur (Cagub). Mawardi tetap menunjukkan penghormatan pada mantan pasangannya, Gubernur Sumsel Periode 2018-2023 Herman Deru. Apalagi Herman Deru tahun lalu sudah mempublikasi, di-

rinya akan maju di Pilkada Provinsi Sumsel 2024 dengan kembali menggandeng Mawardi Yahya.

"Kita tunggu perintah Pak Prabowo. Seandainya nanti diperintahkan beliau untuk bisa membangun Sumsel yang lebih baik, saya kira kita siap," katanya.

Menurut dia, jika keputusan sudah dibuat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, maka dirinya akan menaati perintah tersebut.

"Mau tidak mau, apalagi pimpinan kita seorang jenderal, seorang tentara, jadi kita tunggu perintah beliau," tandas Mawardi.

Mengenai kemenangan signifikan Prabowo-Gibran di Sumsel, menurut Mawardi, memang pada Pilpres 2019 Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno lebih dari 50 persen. Saat ini mencapai 65 persen, jauh lebih tinggi dari perolehan nasional 58 persen.

Kenaikan perolehan suara Prabowo-Gibran melejit, berkat kerja keras semua pihak dalam mengkanter berbagai isu negatif yang dihembuskan para rival politiknya.

Juga berkat sosialisasi yang disampaikan TKD bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat di Provinsi Sumsel.

"Pemilu 2024 ini suara beliau naik signifikan, saya kira perlu disyukuri bersama. Keber-



hasilan meraih suara ini karena kita mampu menghadapi dan meng-counter isu, sosialisasi tersampaikan dan mampu memberi pemahaman ke masyarakat. Alhamdulillah masyarakat mengerti tujuan kita, bahwa ini semua bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk pembangunan Sumsel yang lebih baik lagi," ungkapnya.

Mawardi Yahya Maju, Herman Deru Dapat Rival Seimbang

Hingga tanggal 14 Februari 2024, bursa calon gubernur (cagub) untuk Pilkada Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun ini belum memanas. Jika diibaratkan turnamen olahraga, maka di Pilkada Provinsi Sumsel ini Herman Deru merupakan

man Deru dipastikan bakal mendominasi Pilkada Provinsi Sumsel 2024, bila Mawardi benar-benar menjadi Cagub. Akan terjadi adu strategi dan kepiawaian dua politisi ulung ini. Terlebih, Mawardi Yahya merupakan king maker yang senantiasa bersikap tenang dan menghanyutkan.

Herman Deru menjabat Bupati Kabupaten OKU Timur Periode 2005-2010 dan Periode 2010-2015. Di periode yang sama, Mawardi Yahya menjadi Bupati Ogan Ilir. Ia juga menjadi bupati untuk dua kali masa jabatan.

Mawardi sukses menjadikan putra sulungnya Ahmad Noviadi Mawardi menjadi Bupati Ogan Ilir Periode 2015-2020. Selanjutnya pada Pilkada Kabupaten Ogan Ilir

hanya berpasangan sebagai Gubernur dan Waki Gubernur. Keduanya bahkan lebih terlihat sebagai adik dan kakak. Mawardi selalu setia mendampingi Herman Deru, terlebih ketika sang Gubernur berdukacita atas kepergian putri sulungnya Hj Percha Leanpuri.

Kedekatan tersebut tidak sebatas antara Herman Deru dan Mawardi. Istri Herman Deru Hj Febrita Lustia dan istri Mawardi Yahya Hj Fauziah pun sangat karib. Mereka saling isi mengisi dan selalu terlihat akrab bagaikan dua saudara perempuan.

Bila Herman Deru dan Mawardi Yahya sama-sama menjadi Cagub Sumsel dan bersaing di Pilkada 2024, agenda demokrasi di Provinsi Sumsel jadi semarak.



Cagub unggulan pertama. Sebab belum ada bakal calon yang dianggap sebanding dengannya.

Namun kemenangan Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipastikan membuat seru Pilkada Provinsi Sumsel. Herman Deru dan Mawardi Yahya yang begitu akur sebagai Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Periode 2018-2023 akan saling bersaing memperebutkan posisi Orang Nomor Satu di Provinsi Sumsel.

Mawardi Yahya telah secara menyatakan, dirinya siap menjadi Cagub 2024 jika diperintahkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang juga Capres Terpilih 2024. Ini kali pertama Mawardi mengungkapkan kesiapannya. Selama ini ia terlihat tidak ingin membuka front atau bersikap konfrontatif dengan Herman Deru. Kalem saja.

Kompetisi Mawardi Yahya dan Her-

2020, Mawardi sukses menjadikan putra bungsunya Akbar Panca Wijaya Bupati Ogan Ilir Periode 2020-2025.

Sebelumnya, tangan dingin Mawardi juga berperan dalam memenangkan adiknya Ridho Yahya di Pilkada Kota Prabumulih. Ridho Yahya pun menjadi Wali Kota Prabumulih Periode 2013-2018 dan Periode 2018-2023.

Sulit Membayangkan Bagaimana Mawardi-Deru Head to Head

PASANGAN Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Periode 2018-2023 Herman Deru dan Mawardi Yahya sangat solid. Keduanya membuat masyarakat kagum, karena berbeda dengan para pendahulu mereka yang selalu diwarnai pecah kongsi. Dalam artian, Gubernur dan Wakil Gubernur tidak sejalan. Jalan sendiri-sendiri.

Herman Deru dan Mawardi Yahya tak

Herman Deru dapat rival seimbang.

Namun di sisi lain, masyarakat pasti awalnya sulit untuk membayangkan bagaimana dua sosok yang selama 5 tahun terakhir ini memimpin Provinsi Sumsel dengan sejiwa-sekata tiba-tiba bersaing sengit di Pilkada 2024.

Tapi masyarakat yang mengikuti perkembangan Pemilu 2024 pasti sudah melihat pemanasan persaingan Herman Deru dan Mawardi Yahya di mana putra-putri mereka berkompetisi memperebutkan kursi untuk DPR RI, Senayan, Jakarta.

Putri Herman Deru Samantha Tiffany dan putra Mawardi Yahya sama-sama mencalonkan diri di Daerah Pemilihan Sumsel 1 dan sama-sama unggul dalam perolehan suara.

Putri bungsu Herman Deru menjadi Anggota DPD RI sementara putri Mawardi Yahya Zaitun Mawardi SH MKn menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumsel. ♦

PILKADA PROVINSI SUMATERA SELATAN 27 NOVEMBER 2024

DUA CAGUB SUDAH SIAP, NAMA-NAMA LAIN BARU SEBATAS PEMANASAN

Sejumlah nama disebut-sebut potensial menjadi bakal calon gubernur (cagub) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Sumatera Selatan 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis jadwal Pilkada Serentak yang Pemungutan Suara dilakukan pada 27 November 2024. Namun sejauh ini, baru dua yang dinilai siap yaitu menjadi cagub yaitu Herman Deru dan Mawardi Yahya.

Nama-nama lain yang sudah meramaikan bursa cagub cukup banyak. Ada Heri Amalindo, Eddy Santana Putra, Ishak Mekki, dan Ridho Yahya. Santer juga disebut-sebut nama kemenakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dari almarhum suaminya Taufik Kiemas, Giri Ramanda N Kiemas.

Herman Deru menjelang mengakhiri jabatan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Periode 2018-2023 menegaskan, dirinya akan menjadi Cagub Pilkada Provinsi Sumsel 2024. Saat itu ia menegaskan akan kembali menggandeng Mawardi Yahya untuk menjadi pasangannya sebagai calon wakil gubernur (cawagub). Dan Mawardi Yahya sendiri ketika itu menyatakan bersedia.

Namun hingga sebelum 14 Februari 2024, Mawardi Yahya menurut orang-orang dekatnya lebih mendukung sang adik M Ridho Yahya untuk menjadi Cagub. Demi mendorong karir adiknya mantan Wali Kota Prabumulih Periode 2013-2018 dan Periode 2018-2023 itu, Mawardi takkan mencalonkan diri sebagai cawagub sekalipun.

Namun situasi berubah pada saat Quick Count Pilpres 2024 menunjukkan keme-

nangan satu putaran Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mawardi mengatakan, jika Prabowo terpilih jadi Presiden RI 2024 maka dirinya diperintahkan menjadi Cagub Pilkada Provinsi Sumsel

2024. Dirinya dalam posisi tidak bisa menolak, jika Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra memerintahkan itu.

"Jika Ketua Umum Partai Gerindra mengamanahkan, kita siap. Se jauh ini kami menunggu arahan Ketua Umum," katanya



usai Quick Count Pilpres 14 Februari 2024.

Lantas, bagaimana dengan Ridho Yahya? Ridho Yahya sudah blak-blakan menyatakan akan menjadi Cagub 2024. Ia bahkan sudah mempersiapkan program sebagai Cagub 2024. Yaitu 14 program andalannya yang sukses di Kota Prabumulih, akan diterapkan di 17 kabupaten-kota di Provinsi Sumsel.

Majunya Mawardi Yahya tentu juga membuat rencana Eddy Santana Putra untuk menjadi Cagub dipertanyakan. Sebab tidak mungkin Partai Gerindra mengusung 2 cagub sekaligus. Apalagi Eddy Santana pada Pemilihan Legislatif (Pileg) ini gagal untuk kembali ke DPR RI. Padahal Eddy Santana, yang mencatat sukses besar saat menjadi Wali Kota Palembang Periode 2003-2008 dan Periode 2008-2013, sudah mendeklarasikan dirinya maju ke Pilkada Sumsel tahun ini.

Heri Amalindo, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dua periode, sejak jauh-jauh hari sudah memastikan akan maju ke Pilkada Sumsel. Ia siap mengalahkan cagub-cagub lain dengan membawa filosofi berke-bun. Namun jika Giri Ramanda N Kiemas benar-benar menjadi Cagub, apakah langkah Heri Amalindo tidak terjejal? Sebab Heri dan Giri sama-sama dari PDIP.

Ishak Mekki, Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, sudah memastikan diri untuk maju. Karena ia sudah mendapatkan restu dari DPP Partai Demokrat untuk itu. Pada Pilkada Provinsi Sumsel 2018, Ishak Mekki hanya kalah dari Pasangan Cagub-Cawagub Herman Deru-Mawardi Yahya.

Pj Gubernur: Jaga Kondusivitas hingga Pilkada Serentak

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah merilis Jadwal Pilkada Serentak 2024. Ditetapkan bahwa Pemungutan Suara Pilkada Serentak dilaksanakan 27 November 2024. Tak lama lagi. Saat ini sudah mulai memasuki Tahapan Pilkada Serentak 2024. Kian mendekati hari Pemungutan Suara, biasanya situasi kian panas.

Banyak sekali kabupaten-kota di Provinsi Sumsel yang melaksanakan Pilkada pada 2024. Berdasarkan pengalaman pilkada sebelum-sebelumnya, beberapa daerah memiliki tingkat kerawanan sangat tinggi. Bahkan di beberapa daerah sempat terjadi baku serang antar para pendukung pasangan calon kepala daerah.

Sehubungan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr Agus Fatoni meminta seluruh elemen masyarakat terus menjaga iklim kondusif di Provinsi ini. Pelaksanaan Pemilu 2024 telah usai dan berjalan dengan kondusif. Ia mengimbau

masyarakat untuk tetap menjaga iklim kondusif ini hingga pelaksanaan Pilkada 2024 pada 27 November mendatang.

"Mari bersama kita sukseskan itu semua dan program prioritas ini agar menjadi perhatian semua," ajaknya saat memimpin Apel Gabungan Pegawai Pemprov Sumsel di Halaman Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Senin (19/2/2024).

Menurutnya, Sumsel sebagai provinsi yang besar memiliki banyak potensi membutuhkan dukungan dari seluruh pihak guna mewujudkan daerah yang maju dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dia meminta para pegawai terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian serta prestasi saat ini.*

Kendarai Motor Memastikan Pemungutan Suara Berjalan Lancar

Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni



mengajak seluruh masyarakat Sumsel menyukuri pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung lancar, aman, dan damai. Kondusivitas ini hendaklah terus dipertahankan sehingga Pilkada Serentak 2024 pun sukses seperti Pemilu yang telah usai dilaksanakan.

Bercermin pada Pemilu 2024 itu, terlihat betapa Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni bekerja keras dan penuh kesungguhan. Ia bahkan meninjau sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Palembang, Rabu (14/2/2024) pagi.

Selain untuk memastikan pemungutan suara dan rangkaianannya berjalan sukses tanpa hambatan, Fatoni berkeliling TPS itu juga untuk memberikan motivasi kepada masyarakat pemilih. Mereka dimotivasi agar datang ke TPS dan menggunakan hak pilih.

Dengan mengendarai sepeda motor, Fatoni mendatangi TPS-TPS bersama Kapolda Sumsel Irjen A Rachmad Wibowo, Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Yanuar Adil, Kajati

Sumsel, Yulianto serta Forkopimda Provinsi Sumsel lainnya. Hadir juga Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya, Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan dan Pj Wali Kota Palembang Ratu Dewa.

"Hari ini Saya bersama Forkopimda lengkap meninjau beberapa TPS dengan menggunakan sepeda motor. Ini untuk menunjukkan kepada masyarakat kekompakan kita bersama baik pemerintah daerah, TNI, POLRI dan instansi vertikal lainnya," ungkap Fatoni.

Fatoni berharap masyarakat datang ke TPS untuk memilih. "Kita harapkan semua masyarakat Sumsel menggunakan hak pilihnya. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya karena pesta demokrasi ini hanya 5 tahun sekali," ucapnya.

Agus Fatoni juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat Sumsel yang telah menjaga iklim kondusif di

Provinsi Sumsel selama ini sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik tanpa kendala berkat kerjasama semua pihak dan perlu terus dijaga bersama.

"Dari peninjauan TPS ini, kesimpulannya semua berlangsung baik dan lancar serta masyarakat juga sangat antusias," ujar Fatoni.

Sejumlah TPS yang ditinjau Pj Gubernur Sumsel yakni TPS 12 di Jalan Kelapa Gadang 4 No. 667 Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang dan TPS 17 berlokasi di Depan Kantor Lurah Talang Semut Jl. K.H. Mansyur Azhari, RT 028 RW 001, Kel. Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Palembang.

Kemudian TPS 32 berlokasi di Jl. D.I. Pandjaitan, Lr. Jama Jama, Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Palembang dan TPS 26 di Jl. Urip Sumoharjo Lrg. Suka Damai 1 No.18 RT. 14, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang. ♦

PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN DIMULAI DARI TUBUH SEHAT DAN BERPIKIR POSITIF

Buku berjudul *Jurus Ampuh Memperbaiki Cacat Kepribadian* yang ditulis oleh Yusuf al-Aqshari luar biasa. Setiap orang, terlebih yang tengah mencari jati diri, wajib membacanya. Mereka akan dituntun menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi orang banyak.

Bagi orang-orang yang gemar mencari dan menceritakan aib orang lain, maka buku ini adalah obatnya. Sebab di buku ini ditunjukkan bahwa orang yang suka mengamati-amati aib orang lain sudah pasti dirinya memiliki berbagai kekurangan atau aib jauh lebih banyak.

Jurus Ampuh Memperbaiki Cacat Kepribadian merupakan buku petunjuk dan motivasi bagi pembaca untuk melakukan pengembangan kepribadian. Aslinya, buku ini berbahasa Arab dengan judul *Uyub Al-Syakhsyiyah* ditulis motivator terkenal di Timur Tengah Yusuf Al-Aqshari.

Buku *Uyub Al-Syakhsyiyah* diterjemahkan secara apik dan menarik oleh Jamaluddin ke dalam Bahasa Indonesia. Membaca buku ini, kita takkan merasa sedang membaca buku terjemahan. Bahasanya tidak bertele-tele.

Jamaluddin sukses menerjemahkan *Uyub Al-Syakhsyiyah* menjadi *Jurus Ampuh Memperbaiki Cacat Kepribadian*. Bahasanya sederhana dan mudah dipahami. Ia menerjemahkannya dengan penggunaan bahasa yang pas dan tepat.

Yusuf al-Aqshari mengajak para pembaca untuk melihat ke dalam diri sendiri. Melakukan introspeksi, lalu

JUDUL BUKU:
JURUS AMPUH MEMPERBAIKI
CACAT KEPERIBADIAN

PENULIS:
YUSUF AL-AQSHARI

PENERJEMAH:
JAMALUDDIN

PENERBIT:
GEMILANG

TEBAL BUKU:
200 HALAMAN

TAHUN TERBIT:
JUNI, 2022

ISBN:
978-623-7162-95-7

melakukan hal-hal positif untuk memantaskan diri. Agar menjadi sosok dengan kepribadian yang indah. Kepribadian dengan citra yang baik. Dan, memang baik.

Ditegaskan Yusuf al-Aqshari, tiada seorangpun manusia terlahir sempurna. Semuanya memiliki cacat atau kekurangan. Jika secara fisik sempurna, maka cacatnya berpangkal pada kepribadian. Cacat kepribadian ini pasti berasal dari masalah kesehatan. Kondisi kesehatan yang tidak baik.

Masalah kondisi kesehatan seseorang secara umum itulah yang merupakan sumber cacat kepribadian. Tubuh yang lemah, badan yang sakit akan mengganggu jernihnya akal. Kesehatan fisik menjadikan sistem tubuh bekerja dengan rapi dan seimbang, baik otak maupun syaraf.

Cacat kepribadian itu dapat diperbaiki dengan tiga langkah praktis:

Pertama buat daftar cacat kepribadian yang tidak akan bisa diterima oleh orang lain. Dengan menulis daftar ini, kita akan selalu mengontrol dan mengingat hal-hal yang cacat dalam diri kita, dan bertekad kuat menghilangkan kecacatan itu.

Kedua, mengubah keyakinan yang menghalangi untuk mewujudkan keinginan. Mengubah kesenangan demi mewujudkan keinginan dan kekal dalam kepribadian. Meningkatkan percaya diri bahwa kita mampu memegang prinsip yang sudah dicatat. Optimis bahwa kita bisa menghilangkan cacat itu dalam diri kita. Dan, ini perlu kerja nyata untuk mewujudkannya.

Ketiga, menggunakan metode dan strategi yang paling utama untuk memperbaiki cacat setiap hari. Meniti hari dengan menata diri. Hingga pada akhirnya ada keyakinan dalam diri untuk menemukan keteladanan yang memungkinkan kita untuk mewujudkan yang ingin dicapai.

Yusuf Al-Aqshari mengingatkan agar umat manusia tidak lari dari kekurangan diri, hadapi dan perbaiki. Kita dituntut untuk memperbaiki kesalahan dan menutupi kekurangan. ♦



MOESLIMCHOICE

مەنگۈچكەن
سەلامەت مەنجالەنكەن
ئىپادەھ پۈتۈر

مەرھابەن
يە رەمادەن

KISAH BUDAK YANG NIKAH PEREMPUAN CANTIK ANAK KONGLOMERAT

Diceritakan, pada masa dahulu ada seorang pria bernama Nuh bin Maryam yang tinggal di sebuah kota Marw, Persia. Ia adalah seorang hakim, yang sekaligus juga seorang Gubernur di kota itu.

Selain itu, ia juga seorang ulama karena seorang yang memiliki kualifikasi hakim pada saat itu, merupakan orang yang terhormat. Tak hanya itu, ia juga dikenal sebagai sosok konglomerat yang kaya raya. Nuh memiliki seorang putri yang berparas sangat cantik, serta memiliki karier yang bagus.

Sang putri ini telah tumbuh dewasa dan menjadi gadis yang cantik. Ia pun telah memasuki usia untuk menikah. Nuh pun berencana mulai mencari putrinya tersebut seorang pria untuk menjadi pasangannya.

Banyak laki-laki kaya raya dan berpangkat tinggi yang datang untuk melamar sang gadis. Namun, semua itu malah membuat Nuh bingung hingga tidak terburu-buru untuk memilih. Nuh beranggapan, jika dirinya memilih salah satu

laki-laki itu, maka khawatir yang lain akan tersinggung.

"Aku bingung, kalau harus memilih salah satu dari mereka, sebab nanti yang lain akan tersinggung," kata Nuh dalam hati, seperti dikutip dari laman NU Online.

Nuh pun masih terus dalam kebingungan, sementara itu, putrinya sudah harus segera dinikahkan karena usianya terus bertambah.

Sementara itu, Nuh juga memiliki seorang budak laki-laki, yang sangat bertakwa kepada Allah SWT bernama Mubarak. Ia adalah seorang pria miskin yang dipekerjakan oleh Nuh untuk mengurus perkebunan yang ditanami berbagai macam pohon-pohonan dan buah-buahan,

Pada suatu hari, Nuh meminta tolong pada Mubarak untuk memetik segenggam anggur untuknya.

"Wahai Mubarak, petikkan aku segenggam anggur," kata Nuh pada Mubarak.

"Baik, Tuan. Segera saya ambilkan," jawab Mubarak dengan baik dan patuh.

Setelah memetik segenggam anggur, Mubarak lalu bergegas memberikannya kepada tuannya, Nuh. Semua anggur yang dipetiknya ternyata rasanya masam. Nuh pun lalu menyuruh Mubarak memetik segenggam lagi. Namun hal yang sama terjadi, semua anggur yang dipetik Mubarak rasanya masam. Nuh pun merasa heran dan berkata kepada budaknya tersebut.

"Mubarak, dari anggur sebanyak ini, kenapa kamu tidak bisa membedakan mana yang manis dan mana yang masam?!"

"Maaf, Tuan. Aku benar-benar tidak tahu mana yang manis dan mana yang masam," jawab Mubarak jujur.

"Kamu ini bagaimana?! Sudah satu bulan penuh kau mengurus kebun ini, tapi membedakan jenis anggur saja tidak bisa," ucap Nuh sedikit kesal.

"Benar, Tuan. Aku memang tidak bisa membedakan rasanya," sekali lagi Mubarak menjawab dengan jujur.

"Kau kan bisa mencicipinya, agar

tahu mana yang manis dan mana yang masam," tambah Nuh mengomentari jawaban Mubarak.

"Maaf, Tuan. Engkau hanya memerintahkanku untuk menjaganya, bukan



mencicipi. Aku tidak ingin mengkhianatimu," jawab Mubarak.

Mendengar jawaban Mubarak, Nuh tertegun dan tahu bahwa budaknya adalah lelaki yang cerdas dan memiliki moral luhur.

"Wahai anak muda, aku sangat sen-

ang dengan prinsipmu. Sekarang aku punya satu perintah untukmu,” kata Nuh.

Sebagai pria sholeh, tentu saja Mubarak siap menerima tugas apapun dari majikannya.

“Aku punya putri yang sangat cantik. Sudah banyak laki-laki penting dan kaya raya yang datang untuk melamar, tapi belum juga aku menentukan pilihan. Apakah kamu punya saran untukku?” kata Nuh.

Mendengar perintah tersebut, Mubarak tertegun, lalu menjawab: “Dalam memilih menantu, dulu orang-orang kafir zaman jahiliah melihat siapa orang tuanya, bagaimana reputasinya,

tuan pilih di antara empat ini,” jawab Mubarak seraya menjelaskan.

Nuh pun kemudian mengatakan:

“Wahai pemuda, aku lebih memilih calon menantu yang agamanya kokoh, bertakwa, dan amanah. Sebab itu, aku ingin kau yang menjadi menantuku. Aku sudah menemukan kebaikan dalam dirimu. Agamamu kokoh dan moralmu luar biasa,” ungkap Nuh, terus terang.

Mendengar permintaan Nuh tersebut, tentu saja membuat Mubarak kaget.

“Tapi, tuan, aku hanya seorang budak India berkulit hitam yang dulu engkau beli. Kenapa sekarang justru tuan ingin mengangkatku sebagai menantu?”

mendengar jawabannya dulu,” kata istri Nuh.

Kemudian, setelah mendengar tawaran tersebut, putri Nuh menyerahkan pilihan sebagai pasangan hidupnya pada kedua orang tuanya.

“Jika hal ini sudah menjadi keputusan ibu dan bapak, aku akan mematuhi. Aku tidak akan pernah menentang perintah kalian berdua,” ucap Putri Nuh dengan patuh.

Mubarak pun akhirnya menikah dengan putri Nuh bin Maryam. Dari kedua pasangan ini, kemudian lahir Abdullah bin Mubarak, yang kelak menjadi seorang ulama besar.



seperti apa rumahnya, dan berapa besar kekayaannya. Sementara umat Yahudi dan Nasrani, melihat sejauh mana kecantikan dan kemolekannya. Pada zaman Rasulullah sendiri, yang jadi pertimbangan adalah kualitas agama dan ketakwaan. Pada zaman kita sekarang, kekayaan menjadi prioritas utama. Silakan,

jawab Mubarak, setengah tidak percaya.

Namun, ia hanya bisa mematuhi ke-mauan tuannya. Nuh kemudian menyampaikan keinginannya tersebut kepada istri untuk berembuk.

“Suamiku, semua keputusan ada di tanganmu. Tetapi, aku akan sampaikan dulu hal ini kepada putri kita. Aku ingin

Abdullah bin Mubarak dikenal sebagai seorang ‘alim yang zuhud dan banyak meriwayatkan hadits-hadits Rasulullah. Namanya begitu harum dan sangat familiar dalam dunia intelektual Muslim.

(Sumber: Imam al-Ghazali, At-Tibrul Masbûk fi Nashihatul Mulûk, 1988: 122-123). Wallahu a’lam. ♦

1445 KALI RAMADAN DATANG DAN PERGI

Ramadan selalu datang dan pergi lagi. Terlewat sekali, tak kan pernah kembali.

Yang pasti, Ramadan adalah bulan yang bernilai mulia. Banyak penjelasan mengapa Ramadan menjadi bulan yang mulia di antara bulan-bulan lainnya. Namun dalam Alquran terdapat penjelasan bahwa pada Ramadan terdapat malam yang mulia (lailatul qadar) karena nilainya lebih baik dari seribu bulan.

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Alquran) pada lailatul qadar (malam kemuliaan). Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan." (QS 97, Al Qadr: 1-3).

Penjelasan lebih jauh lagi, sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat 2, Al Baqarah ayat 185, "Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil)."

Jadi, Ramadan menjadi mulia karena pada bulan itulah turun secara bertahap firman Allah melalui Rasulullah (utusan Allah) Muhammad Saw yang menjadi induk ajaran Islam bagi segenap umat manusia. Islam (dari kata salama yang berarti damai) dan Muhammad hadir untuk menebar nilai kasih sayang bagi semesta yang dinarasikan dalam Surat 21, Al Anbiya ayat 107: "Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam."

Begitulah, di Abad ke-15 sejak Islam turun, Ramadan datang silih berganti. Setiap Ramadan memiliki persamaan dan perbedaan setelah lebih 1.455 kali datang dan pergi.

Di tingkat perorangan, pengalaman Ramadan juga akan memiliki persamaan dan perbedaan. Berapa kali mengalami Ramadan, tergantung usia. Selain konteks waktu, tentu juga konteks ruang.

Sama halnya, setelah tingkat perorangan, pengalaman Ramadan mencakup pula ruang kehidupan keluarga inti maupun luas (yang mencakup keluarga besar dan kerabat) hingga akhirnya berada dalam konteks global umat manusia di seluruh dunia.

Ramadan di Palestina pada 1445 Hijriyah tahun ini, misalnya, tentu berbeda dengan Ramadan di negara-negara Skandinavia yang terkenal sebagai welfare states (negara kesejahteraan) meskipun berada di wilayah yang berdekatan dengan kutub utara. Juga tentu berbeda dengan wilayah yang berada di dekat kutub selatan seperti Selandia Baru.

Nah, Ramadan 1445 Hijriyah dalam konteks Indonesia yang berada di khatulistiwa pun memiliki banyak segi untuk mencirikan persamaan dan perbedaannya. Salah satu yang tercatat, Ramadan 1445 adalah yang ketiga kali pasca pandemi Covid-19 diumumkan selesai pada 2022. Sejak itu, pemerintah telah memperbolehkan masyarakat Indonesia melakukan mudik pada libur Lebaran pada 1443 Hijriyah.

Kala itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa sebelumnya masyarakat sudah dua tahun tidak dapat melakukan mudik sewaktu Idul Fitri. Nantinya, menurut hasil survei Kementerian Perhubungan akan ada 76-86 juta masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan mudik. "Angka yang akan melaksanakan mudik berkisar antara 76-86 juta warga Indonesia yang akan melaksanakan mudik Idul Fitri setelah 2 tahun absen tidak ada mudik," kata Muhadjir, pada April 2022 lalu.

Pada tahun berikutnya, 2023 seiring dengan 1444 hijriyah, Kementerian Perhubungan memproyeksikan jumlah pemudik

sebanyak 123,8 juta orang pada Idul Fitri, naik sekitar 45 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional Kemenhub, Abdulhamid Dipopramono, menyebutkan dari hasil survei yang dilakukan, sebanyak 45 persen masyarakat mengaku ingin mengikuti mudik kali ini. Angka itu naik dari 31,6 persen pada tahun lalu.

"Sementara yang tidak pergi mudik tahun lalu 68,4 persen, sekarang cuma 54,2 persen. Hal ini disebabkan oleh penghapusan PPKM, pemulihan ekonomi, dan tidak adanya larangan mudik dari pemerintah," ujarnya dalam Dialog FMB9 yang mengangkat tema 'Mudik Aman Berkesan', di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin, 10 April 2023.

Untuk tahun ini, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan survei proyeksi jumlah pemudik masih berjalan. Ia memperkirakan hasilnya baru bisa dipublikasikan pada awal Maret 2024. "Sementara, hasilnya memang memperlihatkan minat mudik lebih besar dibandingkan tahun lalu," ucap Adita, Rabu, 28 Februari 2024.

Adita menjelaskan, puncak mudik lebaran tahun ini akan terjadi pada H-3 hingga H-1 hari raya. "Mengenai tanggalnya (puncak mudik lebaran) diperkirakan hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kira-kira seminggu sebelum lebaran sudah akan mulai terjadi peningkatan mobilitas," kata dia.

Sedangkan Menteri Perhubungan Budi



Karya Sumadi memperkirakan pemudik pada lebaran tahun ini akan lebih banyak ketimbang 2023 lalu. Ia menyebut Kemenhub tengah bersiap untuk berkoordinasi dengan lintas sektoral terkait persiapan infrastruktur maupun transportasi saat mudik.

Survei awal Korps Lalu Lintas Polri mencatat bahwa jumlah pemudik lebaran 2024 diperkirakan mencapai 200 juta orang. Jumlah ini lebih tinggi enam persen dibandingkan dengan pemudik lebaran tahun lalu yang tercatat 187 juta orang. Toh angka ini

Alasannya, bepergian jarak jauh menggunakan sepeda motor memiliki potensi kecelakaan yang sangat tinggi. "Selain penumpang, sepeda motornya juga akan kami angkut secara gratis, sehingga bisa digunakan untuk bermobilitas di tempat tujuan," ujarnya.

Toh Program Mudik Gratis Kemenhub tersedia melalui jalur darat, laut, serta kereta api, yang digelar di beberapa titik simpul transportasi. Untuk jalur darat, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat

April 2024, sedangkan keberangkatan arus balik terjadwal pada 14-15 April 2024.

Untuk jalur laut, Ditjen Perhubungan Laut mengadakan program Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Kapal Laut, dengan kuota sebanyak 9.800 penumpang dan 4.800 unit sepeda motor, yang dijadwalkan berangkat pada 3-17 April 2024. Selanjutnya di jalur kereta api, Ditjen Perkeretaapian menyelenggarakan program Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Kereta Api yang tiketnya dapat dipesan selama 4 Maret-18 April 2024.

Kuota mudik gratis dengan kereta api sementara tersedia sebanyak 28.196 penumpang dan 12.180 unit sepeda motor. Keberangkatan arus mudik terjadwal pada 2-8 April 2024, sedangkan keberangkatan arus balik terjadwal pada 13-19 April 2024.

Bagaimana dengan nuansa tahun politik? Paling tidak, Ramadan kali ini beririsan dengan puncak perhelatan demokrasi Pemilihan Umum 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih wakil rakyat di lembaga legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi, juga DPRD Kabupaten dan Kota. Pengumuman hasil penghitungan suara Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 20 Maret 2024 yang berada di tengah perjalanan Ramadan 1445 H.

Tambahan pula, Pilkada serentak 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024 di seluruh Indonesia. Pilkada kali ini serentak untuk memilih gubernur di tingkat provinsi, serta bupati di kabupaten dan wali kota di wilayah kota yang totalnya sekitar 500 wilayah pemerintahan daerah otonom.

Terkait dengan iring-iringan Ramadan 1445 Hijriyah dengan rangkaian kegiatan pemilihan politik, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Buya Amirsyah mengatakan dalam halaqah siaran Ramadan MUI 2024 bahwa MUI memiliki dua tanggung jawab secara bersamaan. "Ramadan merupakan momentum penting untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT sehingga MUI memiliki dua tanggung jawab secara bersamaan, yaitu tanggung jawab keagamaan (mas'uliyah diniyah) dan tanggung jawab kebangsaan (mas'uliyah wathaniyah)," ungkap Buya Amirsyah pada Rabu, 21 Februari 2024.

Buya Amirsyah menambahkan penjelasan mas'uliyah diniyah dan mas'uliyah wathaniyah. "Tanggung jawab keagamaan untuk memperkuat pemahaman umat terhadap ajaran agama Islam serta tanggung jawab kebangsaan dalam menciptakan kehidupan beragama yang harmonis di tengah masyarakat yang berbangsa



di atas perkiraan awal yang diproyeksikan hanya 123,8 juta warga.

Kemenhub pun telah menegaskan program mudik gratis Lebaran 2024 untuk pemudik sepeda motor menggunakan bus, kereta api, dan kapal laut sudah terprogram. Adita mengatakan, program mudik gratis untuk pemudik sepeda motor dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang ingin mudik menggunakan kendaraan pribadi terutama sepeda motor.

menggelar program Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Bus dan Truk. Pendaftaran program gratis ini dapat dilakukan melalui aplikasi Mitra Darat yang diterapkan pada 5 Maret-3 April 2024.

Kuota mudik gratis Kemenhub dengan melalui jalur darat ini tersedia 722 unit bus untuk 30.088 penumpang dan 30 unit truk yang dapat menampung 900 unit sepeda motor. Keberangkatan arus mudik gratis dengan bus dan truk ini terjadwal pada 5-7

dan bernegara,” tambah Buya Amirsyah menyoroti pentingnya dua hal tersebut diperkuat MUI ke depan.

Ia menegaskan pula, MUI mendorong literasi media sosial dan media massa arus utama (mainstream). “MUI melalui Komisi Infokom harus melakukan literasi, sosialisasi dan edukasi agar media sosial dan media massa dapat menjadi alat yang kuat dalam menyebarkan syiar agama,” ungkap Amirsyah.

Menurut dia, literasi, sosialisasi dan edukasi guna mengurangi kesenjangan di masyarakat. “Kita melihat umat kita ini, tidak semuanya sama, pasti ada kesenjangan baik dalam konteks ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga diperlukan literasi, sosialisasi, dan edukasi,” kata Amirsyah.

Buya Amirsyah menekankan Ramadan diharapkan dapat menjadi momen bagi umat Islam untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa. “Menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk menciptakan kehidupan agama yang kondusif,” ucap Buya Amirsyah.

Ia berharap di bulan yang penuh keberkahan tetap damai dan tentram walaupun di tahun politik. “Di tengah tahun politik, berharap tetap aman dan tentram dengan menjadikan Ramadan bulan penuh ampunan dan penuh keberkahan,” sambung Buya Amirsyah.

Semua pihak, sambungnya, termasuk aktivis dan media, memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi saat ini. “Jika kondisi belum baik, tugas kita untuk mengubah, jika kondisi sudah baik, tugas kita menjaganya. Soal hasil Allah yang menentukan, yang penting sudah berikhtiar,” ujar Buya Amirsyah.

Dengan tema yang menginspirasi dan semangat yang membara, Halaqah Siaran Ramadan MUI tahun ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam merajut persatuan umat dan memperkokoh nilai-nilai keagamaan serta kebangsaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Lebih dari sekadar dakwah lisan mengenai literasi, MUI juga menyelenggarakan dakwah bil hal dengan menyelenggarakan Tarhib Ramadhan (ungkapan selamat datang Ramadan) di Masjid Istiqlal, Jakarta, yang terjadwal berlangsung pada Jumat, 1 Maret 2024.

Dari asal-usul kata (etimologi), tarhib berasal dari bahasa Arab ra-hi-ba, yarhabu, rahbun yang artinya luas, lapang, dan lebar. Kata tersebut lalu berubah menjadi fi’il rahhaba, yurahhibu, tarhiban yang berarti menyambut, menerima dengan penuh ke lapangan, kelebaran dan keterbukaan hati. Dengan begitu, tarhib Ramadhan adalah

upaya memantaskan diri menyambut bulan suci Ramadhan.

Sedangkan menurut Kementerian Agama RI, kata tarhib dalam bahasa Arab digunakan untuk sambutan, sambutan apa saja. Bukan diperuntukkan untuk Ramadan saja. Seperti kalimat al-Tarhib (kata sambutan), menyambut mudir, presiden, dan lainnya.

Ringkasnya, tarhib adalah ungkapan selamat datang atas kedatangan seseorang, atau kehadiran sesuatu yang indah. Untuk Ramadan, umat Islam secara umum akrab dengan ungkapan marhaban yaa Ramadhan, selamat datang wahai Ramadhan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tarhib Ramadhan adalah menyambut bulan Ram-

pada 1 Maret Jumat sore sampai malam,” Kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, Rabu, 28 Februari 2024.

Kiai Cholil menjelaskan acara tersebut diawali dengan doa bersama dan tausiyah dari KH Anwar Iskandar dan insya Allah datang Prof Dr Muhammad Quraish Shihab. Hadir juga Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Dr KH Nasaruddin Umar.

Ia menegaskan, kegiatan ini resmi dari MUI dan tidak ada hubungannya dengan agenda politik apapun. “Ini resmi dari MUI, saya yang ketua panitia penyelenggaraannya dan Ketua Umum MUI sebagai penanggung jawabnya, tidak ada hubun-



adhan dengan senang hati, dengan tangan terbuka, dengan penuh kebahagiaan baik jiwa dan raga. Hal yang sama disampaikan pada buku Informasi Kapuas (2021) karya Jum’atil Fajar. Menurut dia, tarhib Ramadhan berarti menyambut Ramadhan dengan upaya meningkatkan kualitas ibadah selama bulan Ramadhan.

Sedangkan salah satu rangkaian kegiatan Tarhib Ramadhan MUI kali ini adalah khataman Alquran dan rangkaian Tausiyah dari para ulama dan habaib setelah salat Isya berjamaah. Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar akan menyampaikan tausiyahnya juga. Sementara itu Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI diagendakan hadir.

“Alhamdulillah wa syukurillah Insya Allah Majelis Ulama Indonesia secara resmi di bawah pimpinan Ketua Umum KH Anwar Iskandar dan saya sebagai ketua panitia akan menyelenggarakan Tarhib Ramadhan

gan dengan politik tidak ada untuk mengagalkan apapun kecuali kita ingin membangun persatuan dan kesatuan,” ujar dia merespons beredarnya pesan singkat di masyarakat bahwa Tarhib Ramadhan MUI ini merupakan agenda politik, pengalihan isu, pengumpulan massa, dan sebagainya.

Kiai Cholil menegaskan acara ini merupakan program MUI murni tidak ada kaitannya dengan politik, acara ini untuk mendoakan bangsa. “Jadi kalau ada WA (WhatsApp) yang menyebar itu sama sekali bukan yang berkenaan dengan acara kami,” kata dia.

Ia pun mengimbau seluruh ormas Islam bersama-sama mengajak masyarakat menyambut Ramadhan dengan riang gembira. “Kepada ormas-ormas MUI dan masyarakat untuk menyambut ramadhan dengan baik dan gembira tentunya dalam rangka ingin mendapatkan berkah dan ridha Allah subhanahu wa ta’ala,” Kiai Cholil. ♦

RAMADAN TERAKHIR PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKOWI

Apapun, Ramadan 1445 di Indonesia yang mayoritas warganya adalah umat Islam, selalu terkait dengan penyelenggaraan negara. Inilah Ramadan terakhir selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam pengantarnya saat memimpin sidang kabinet paripurna (SKP) yang membahas persiapan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriyah, di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran pemerintahannya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan sekaligus mempercepat pembagian bantuan kepada masyarakat.

"Saya minta seluruh kementerian/ lembaga yang terkait supaya waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusus. Oleh sebab itu, saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan, terutama bahan pokok. Dan juga, percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial," kata Presiden.

Di samping itu, Kepala Negara juga memerintahkan kepada kementerian terkait untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan moda transportasi untuk mendukung arus mudik Lebaran tahun 2024. "Cek betul kesiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan mudik oleh masyarakat. Saya kira itu setiap tahun kita selalu persiapkan, karena ini ada-

lah event tahunan," ujarnya.

Dalam sidang kabinet paripurna itu dibahas pula Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025. Presiden menekankan kepada jajarannya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dalam penyusunan RKP dan kebijakan fiskal tersebut.

"RKP Tahun 2025 dan Kebijakan Fiskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres [pemilihan presiden] 2024. Tapi, ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU [Komisi Pemilihan Umum], maka RAPBN [Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara] Tahun 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," tandasnya.

Selain itu, Presiden juga menekankan agar Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025 disiapkan dengan memperhatikan situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global saat ini. "Kita tahu semuanya bahwa beberapa negara ekonominya sudah masuk ke resesi, seperti Jepang, Inggris, baru saja masuk ke resesi itu, sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian, tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus kita jaga.



Lakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan contingency plan, jika terjadi gejolak dan krisis,” ujarnya.

Presiden menambahkan, penyusunan kebijakan fiskal juga harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi yang tengah dilakukan di Tanah Air. “Untuk postur makro fiskal dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, transformasi ekonomi harus yang telah kita jalani selama sepuluh tahun terakhir harus terus berlanjut, sehingga kebijakan fiskal harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah akan terus melakukan intervensi pasar

Intervensi pertama melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang juga dilaksanakan oleh Bulog. Kemudian intervensi selanjutnya adalah program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan ke ritel modern, pasar tradisional, dan pasar induk.

Sebagai tindak lanjut Rapat Kabinet, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) meninjau stok sejumlah komoditas pangan, termasuk beras di Pasar Klender, Cakung, Jakarta Timur, pada Senin, 26 Februari 2024. Selain mengecek harga, Mendag juga memastikan ketersediaan stok pangan menjelang bulan Ramadan aman.

Sesampainya di Pasar Klender, Zulhas langsung mengecek sejumlah harga pan-

kurang, ya pasti harganya naik,” kata Mendag.

Dia menjelaskan jika sebelumnya musim panen terjadi pada September hingga Oktober karena musim hujan di sejumlah daerah, maka musim panen bergeser ke Maret, April, dan Juni. “Karena kita tanamnya geser, mestinya September, Oktober, November, Desember sudah hujan, hujannya kan baru,” kata Zulhas.

Toh Mendag Zulhas memastikan, panen awal akan terjadi pada Maret sehingga diharapkan bisa menstabilkan harga beras yang masih tinggi. “Panennya paling cepat Maret, Mei, Juni,” ujarnya.

Di berbagai wilayah, pada kewenangan administrasinya masing-masing, se-



guna menyeimbangkan harga pangan di pasaran. Dia menegaskan bahwa memang diperlukan waktu agar tercapainya keseimbangan harga baik di tingkat produsen dan konsumen.

Namun, katanya, hal ini telah diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir terhadap harga pangan yang saat ini belum menentu. “Jadi ya benar, pemerintah memiliki beberapa program sebagai bentuk intervensi pasar untuk menyeimbangkan harga pangan,” ujar Arief.

la juga menyempatkan berinteraksi dengan sejumlah pedagang daging ayam dan telur.

Mendag membeli pula beberapa kilogram beras dan ayam dari pedagang untuk dibagikan kepada masyarakat yang datang ke pasar. Zulhas menyebut, harga beras, baik premium maupun medium masih tinggi karena pasokan dan kebutuhan tidak seimbang akibat pergeseran musim panen.

“Memang beras premium, beras lokal harganya naik, karena apa? Supply-nya kurang, kalau supply-nya kurang, belinya enggak

julah pemerintah daerah di Indonesia menyelenggarakan pasar murah menjelang Ramadan pada awal 2024. Di Aceh, ujung barat Sumatera, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Perum Bulog Aceh menggelar pasar murah selama empat hari dalam menyambut bulan suci Ramadan 1445.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad mengatakan, bahwa sudah dilakukan

pasar murah pada tanggal 26 Februari 2024 di Halaman Parkir Taman Ratu Safiatuddin dan di Halaman Masjid Syuhada Lamgugop. "Kemudian, akan dilakukan pada tanggal 6 Maret 2024 di Halaman Parkir Kapal Apung dan tanggal 7 Maret 2024 di Halaman Masjid Bustanushshalihin Ulee Kareng," kata Tuanku Muhammad, Rabu, 28 Februari 2024.

Setidaknya empat komoditi yang dijual di pasar murah Banda Aceh itu antara lain

kan syarat bagi warga yang ingin membeli di pasar murah tersebut adalah membawa KTP asli dan Foto Copy KTP. Kemudian, untuk kupon antrean mulai dibagi pada pukul 07.00 WIB dan pelaksanaannya dilakukan pada pukul 08.30 WIB.

Sedangkan di Sumatera Utara, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hasanuddin mengemukakan, sejumlah kabupaten dan kota di provinsinya juga menggelar pasar murah. Tujuannya untuk mengendalikan harga

sung mulai 1 Februari hingga 7 Maret 2024 di 14 kabupaten/kota se-Sumut. Kabupaten dan kota yang sudah terjadwal menyelenggarakannya antara lain, Karo 1 Februari, Padangsidimpuan 5 Februari, Mandailing Natal 6 Februari, Batubara 16 Februari, Sibolga 19 Februari, Tapanuli Tengah 20 Februari, Simalungun 23 Februari, Pematangsiantar 26 Februari, Kisaran 29 Februari, Tanjungbalai 1 Maret, Labuhanbatu Utara 5 Maret, Labuhanbatu 6 Maret, Medan 27-29 Maret, dan Deliserdang 5-7 Maret.

Setiap penyelenggaraan pasar murah, beras yang dijual di pasar murah tersebut mencapai 5 ton, minyak goreng 2 ton, telur ayam 200 papan, gula pasir 1 ton, dan lainnya. "Semoga dengan pasar murah ini, harga-harga cepat terkendali apalagi menjelang Ramadan," kata Hasanuddin.

Selain pasar murah, Pemprov Sumut bersama dengan Satgas Pangan dan pihak terkait melaksanakan Sidak (inspeksi atau pemeriksaan mendadak) ke mata rantai arus barang. Mulai dari pasar tradisional, modern, produsen dan distributor. Sidak ini dilakukan secara periodik.

Lanjut ke Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga menggelar pasar murah di wilayahnya. Pj. Bupati Banyuasin H. Hani S Rustam terus berkomitmen menjalankan program operasi pasar murah setiap minggunya yang akan terus digelar di 21 Kecamatan 25 Kelurahan dan 288 Desa Se-Kabupaten Banyuasin.

Tampak terlihat ratusan masyarakat memadati lokasi operasi pasar murah yang diselenggarakan oleh Pemkab Banyuasin didukung Bank Sumsel Babel (BSB) Cabang Pangkalan Balai, adapun komoditi yang banyak diserbu masyarakat antara lain sembako seperti beras, cabe, dan bawang. Meskipun antusias serta respon masyarakat cukup tinggi proses pembelian berlangsung dengan tertib dan kondusif, ini menunjukkan kesiapan panitia dalam mengatur kegiatan operasi pasar murah yang berlangsung di Auditorium Pemkab Banyuasin, Rabu, 27 Februari 2024.

Pasar murah juga berlangsung di berbagai daerah lainnya. Sejauh ini beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mulai pula menggelar pasar murah. Antara lain di Banjarbaru, Tapin, serta Tanah Laut di Kalsel. Sedangkan di Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas dan Kotawaringin Timur tercatat pula menggelar pasar murah Ramadan.

Sedangkan di Kalimantan Timur, masih terkait dengan persiapan Ramadan dan Idul Fitri 1445 H, Presiden Jokowi berkunjung antara lain untuk meresmikan Terminal Bus Tipe A Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Samarinda



beras premium 10 kilogram seharga Rp93 ribu, minyak goreng kemasan 2 liter seharga Rp31 ribu, gula 2 kilogram seharga Rp26 ribu, dan telur 1 papan atau 30 butir seharga Rp40 ribu.

Untuk harga jualnya Rp190 ribu per paket, harga tersebut sudah disubsidi sebesar 80 ribu per paket oleh pemerintah. Sedang-

Bahan Pangan Pokok (Bapok), terutama menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1445 H.

"Yang pertama kita gencarkan itu operasi pasar atau pasar murah di beberapa kabupaten/kota se-Sumut," kata Hassanudin di Medan, Rabu, 28 Februari 2024.

Pasar murah di Sumut, lanjutnya, berlang-

Seberang. Selain ke Samarinda, Presiden dijadwalkan berkunjung ke Kota Bontang, dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Mendarat di Bandara APT Pranoto Samarinda, Rabu 28 Februari 2024 petang Waktu Indonesia Tengah, Presiden beserta rombongan langsung menuju lokasi peresmian terminal di Jalan Bung Tomo Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda.

Peresmian Terminal Samarinda Seberang ditandai dengan penekanan tombol klakson dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi. Turut mendampingi Jokowi dalam giat tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, dan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Revitalisasi terminal bus antar provinsi ini, dibangun di atas lahan seluas 6.682 meter persegi. Sedangkan luas bangunannya 3.600 meter persegi dan merupakan aset Direktorat Jenderal Hubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Dalam sambutannya, Jokowi menyebut pemerintah terus berupaya menghadirkan fasilitas transportasi umum yang memadai. Harapannya, adalah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi. Dengan demikian, persoalan kemacetan yang sering terjadi di kota-kota besar, dapat semakin dikurangi.

"Di Jakarta, di Samarinda, dan di semua titik kota-kota besar permasalahannya sama. Kemacetan. Kita harus dorong penggunaan transportasi umum biar macet berkurang," kata Jokowi saat peresmian.

Presiden pun mengapresiasi revitalisasi pembangunan Terminal Samarinda Seberang yang akan melayani rute antarkota dan antarprovinsi di Kalimantan. "Saya senang melihat pembangunan Terminal Samarinda Seberang ini. Dimana-mana, terminal itu terkesan kumuh, tidak tertata, dan banyak preman. Tapi ini saya lihat bersih, rapi, dan tertata," puji Jokowi.

Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi sudah mengecek pembangunan prasarana perkeretaapian untuk mendukung pengoperasian Kereta Api (KA) Makassar-Parepare antara Mandai-Palanro. "Tahun ini, ada beberapa prasarana yang akan dibangun, di antaranya overpass Tonasa yang saat ini sedang dalam proses pembebasan lahan serta pengadaan dan pemasangan peralatan di Depo Maros," ujarnya.

Selain itu, akan dilakukan pula pembangunan jalan akses dan fasilitas pendukung

di stasiun lintas Makassar-Parepare, salah satunya fasilitas keselamatan di emplasemen Stasiun Mandai dan Jalan Damai Ongkoe. Terkait hal ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kemenhub dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros telah menandatangani Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Keselamatan pada Perlintasan Tidak Sebidang Jalur Kereta Api antara Mandai-Maros.

Rencana akses Ongkoe didesain untuk mengoptimalkan fungsi jalan, sehingga tidak mengganggu perjalanan kereta api

Ini merupakan salah satu proyek strategis nasional berupa pembangunan KA Trans-Sulawesi. Rencananya Trans Sulawesi akan menghubungkan transportasi antarprovinsi di Sulawesi, mulai dari Sulawesi Selatan (Makassar) sampai ke Sulawesi Utara (Manado).

KA Makassar Parepare melayani empat perjalanan setiap harinya, dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 270 kursi. Waktu tempuh untuk sekali perjalanan adalah maksimal dua jam. Adapun jumlah penumpang KA Makassar-Parepare hingga saat ini telah



dan mengoptimalkan panjang spoor efektif track Stasiun Mandai. "Tak kalah penting, dampak kecelakaan kereta api dengan kendaraan lain pun bisa dimitigasi dengan adanya pembangunan ini," ungkap Budi.

Sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 29 Maret 2022, load factor (tingkat keterisian penumpang) KA Trans-Sulawesi lintas Makassar-Parepare telah mencapai 75 persen. Maknanya, minat masyarakat di Sulawesi untuk menggunakan angkutan massal, khususnya kereta api meningkat.

menyentuh angka 259.994 orang per Februari 2024. "Kita berharap minat masyarakat di Sulawesi semakin tinggi menggunakan kereta api, dan beralih dari kendaraan pribadi," ungkap Menhub Budi.

Tampak jelas pemerintah berupaya serius menyediakan pasok pangan dengan harga terjangkau serta menjaga kesiapan infrastruktur menjelang Ramadan 1445 Hijriyah. Pada akhirnya setiap warga negara berhak menilainya. Sampailah Ramadan dan Idul Fitri terakhir di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2024. ♦

MOVE ON, DAN ISI RAMADHAN DENGAN AMALIAH TERBAIK!

Pemilihan Umum (Pemilu) yang terdiri dari Pemilihan Legislatif (Pilleg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) sudah usai. Siapa Capres-Cawapres Terpilih sudah pula diketahui, walau pengumuman resminya baru akan disampaikan KPU tanggal 20 Maret 2024.

Kita tentu sedih melihat Capres-Cawapres yang kita dukung kalah. Padahal kita sudah share semua posting baik yang benar maupun hoax, demi memenangkan Capres-Cawapres yang kita idolakan. Banyak di antara kita yang ber-sitengang dengan teman-teman di grup-grup percakapan di media sosial gegara memposting cacian dan hinaan terhadap Capres-Cawapres lain.

Setelah hasil hitungan cepat yang merupakan petunjuk awal hasil Pilpres dikeluarkan, situasi tidak menjadi tenang. Tambah panas. Banyak yang emosional dan tidak terima hingga hari ini.

Mari tenangkan diri. Simak, Kitab Suci Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 216;

Artinya: .. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah



oleh Rosyidah Rozali,
Moeslim Choice

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Pilpres 2024 yang menjadi urusan rakyat Indonesia sudah usai. Biarlah pihak yang berwenang menyelesaikannya. Misalkan dirasa hasil Pilpres ini pahit, tak sesuai harapan, tetap harus diterima. Bagi yang merasa puas dengan hasil Pilpres ini, hendaklah rendah hati, tidak jumawa. Tengganglah rasa saudara-saudara se-

bangsa yang sedang kecewa dan terluka karena jago mereka kalah.

Sebab semua ketentuan di tangan Allah SWT, seperti yang ditegaskan dalam Kitab Suci Al Quran Surat Al An'am Ayat 59: Kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).

Marilah kita semua move on. Hidup harus terus berjalan. Tugas kita bukan pelototi Pilpres yang sudah usai. Kita sudah harus fokus pada urusan yang lain seperti perintah Allah SWT dalam Kitab Suci Al Quran Surah Al Insyirah Ayat 7; Apabila engkau telah selesai dengan suatu urusan, teruslah bekerja keras untuk urusan yang lain.

Kini, kita sambut dan isi Bulan Ramadhan 1445 Hijriah ini dengan ibadah-ibadah terbaik. Kita bermohon semua dosa diampuni-Nya dan diberi kebaikan yang lebih baik dari 1000 bulan pada Ramadhan ini. ♦





IKLAN 1 HALAMAN FC
Rp50.000.000



IKLAN BACK COVER FC
Rp75.000.000



IKLAN 1/2 HALAMAN FC
Rp25.000.000

**Media yang Tepat Untuk
Promosi Usaha Anda**

MOESLIM CHOICE

- ADVERTORIAL/INFORIAL (FC)
- IKLAN 1/2 CENTERSPEAD (FC)
- IKLAN 1/2 FACING PAGES (FC)
- IKLAN 1/2 HALAMAN (FC),
- IKLAN ADVERTORIA L/INFORIAL (FC)
- IKLAN CENTERSPREAD (FC), DILUAR EDISI KHUSUS
- IKLAN COVER 2 (FC)
- IKLAN COVER 3 (FC)
- IKLAN COVER 4 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN DISPLAY (FC), 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 13, 15 & 17 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 3 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 5 (FC) 1 HALAMAN

MANFAAT PLUS BERIKLAN DI MAJALAH MOESLIM CHOICE

- Lebih Akurat dengan Target Pesan Iklan Sesuai dengan Topik Bahasan
- Pilihan Halaman Iklan yang mudah disimak Pembaca
- Harga Iklan Bertabur Diskon



IKLAN CENTER SPREAD FC
Rp80.000.000



CONTACT PERSON: NIKEN

021 - 791 96 781

0896 4369 4121

Email: moeslimchoice@gmail.com



MOESLIM CHOICE



ISSN_2614-2783



Rp 75.000

MENANTI KIPRAH MUSLIMAH DI SENAYAN

MERINTIS
PEMERINTAHAN
DIGITAL
DARI SUMSEL

MEMBIDIK
HILAL
AWAL
RAMADAN

JALAN
TERJAL
SERTIFIKASI
HALAL

AGAR
KONFLIK
PERTANAHAN
SELESAI

KISAH
MUALAF
SELVI ANANDA
GIBRAN